



**WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Walikota adalah Walikota Singkawang.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah, Kecamatan serta Kelurahan.

4. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017, yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Singkawang, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA SINGKAWANG TAHUN 2015

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.

Pasal 3

Isi dan Uraian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2015, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 menjadi :

- a. Pedoman SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2015;
- b. Acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 30 Mei 2014
WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

td
SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,



YASMALIZAR, S.H.

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1. Latar Belakang	I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I.2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I.4
1.5. Maksud dan Tujuan	I.5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN.....	II.1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II.1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II.31
2.3. Permasalahan Pembangunan	II.33
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.6
BAB IV TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ...	IV.1
4.1. Tema Pembangunan Daerah	IV.1
4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV.4
4.3. Prioritas Pembangunan Daerah	IV.15
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ...	V.1
1. Dinas Pendidikan	V.2
2. Dinas Kesehatan	V.9
3. RSUD dr. Abdul Azis	V.14
4. Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM	V.18
5. Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya	V.22
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	V.25
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	V.30
8. Badan Lingkungan Hidup	V.33
9. Dinas Kebersihan dan Perumahan	V.35
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V.38

Halaman

11. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	V.41
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	V.44
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V.48
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	V.27
15. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	V.50
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	V.53
17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	V.58
18. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	V.60
19. Sekretariat Daerah	V.62
20. Sekretariat DPRD	V.71
21. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan, dan Aset	V.73
22. Inspektorat Daerah	V.77
23. Badan Kepegawaian Daerah	V.79
24. Kecamatan Singkawang Tengah	V.82
25. Kecamatan Singkawang Utara	V.85
26. Kecamatan Singkawang Selatan	V.88
27. Kecamatan Singkawang Timur	V.91
28. Kecamatan Singkawang Barat	V.94
29. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	V.97
30. Dinas Pertanian dan Kehutanan	V.99
31. Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	V.103
32. Dinas Kelautan dan Perikanan	V.105
BAB VI PENUTUP.....	VI.1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah	II.3
Tabel 2.2 Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Kota Singkawang	II.5
Tabel 2.3 Inflasi Harga Konsumen Menurut Kelompok Jenis Barang/ Jasa Tahun 2008 - 2013	II.8
Tabel 2.4 Tabungan Masyarakat dalam Perbankan Menurut Jenis Tabungan Tahun 2008 - 2013	II.9
Tabel 2.5 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 - 2013	II.10
Tabel 2.6 Nilai APK dan APM Tahun 2008 - 2013	II.13
Tabel 2.7 Status Gizi Buruk Tahun 2008 - 2013	II.15
Tabel 2.8 Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2008 - 2013	II.18
Tabel 2.9 Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tahun 2013	II.19
Tabel 2.10 Proporsi Perempuan Tahun 2008 - 2013	II.20
Tabel 2.11 Jumlah Grup Kesenian, Klub dan Gedung Olahraga Tahun 2009 - 2013 .	II.21
Tabel 2.12 Aspek Pelayanan Umum Tahun 2009 - 2013 Kota Singkawang	II.21
Tabel 2.13 Realisasi PMDN 2008 - 2012	II.30
Tabel 2.14 Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah serta Perda yang Mendukung Iklim Usaha	II.30
Tabel 2.15 Proporsi Sumberdaya Manusia Tahun 2008 - 2013	II.31
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun 2012 - 2016	III.3
Tabel 3.2 Prospek Perekonomian Tahun 2015	III.5
Tabel 3.3 Evaluasi/ Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2014	III.6
Tabel 3.4 Proyeksi/ Target Penerimaan Daerah Kota Singkawang Tahun 2015	III.7
Tabel 3.5 Rata - Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Singkawang	III.8
Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 - 2015	III.13
Tabel 3.7 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 - 2015	III.15
Tabel 3.8 Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 - 2015	III.17
Tabel 4.1 Hubungan Visi dan Misi Tujuan/ Sasaran Pembangunan	IV.5
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2015	IV.16
Tabel 4.3 Penjelasan Program Pembangunan Daerah	IV.22
Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kota	

	Halaman
Singkawang Tahun 2015	V.2
1. Dinas Pendidikan	V.2
2. Dinas Kesehatan	V.9
3. RSUD dr. Abdul Azis	V.14
4. Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM	V.18
5. Dinas Tata Kota Pertanahan dan Cipta Karya	V.22
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	V.25
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	V.30
8. Badan Lingkungan Hidup	V.33
9. Dinas Kebersihan dan Perumahan	V.35
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	V.38
11. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB	V.41
12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	V.44
13. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	V.48
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	V.27
15. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	V.50
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	V.53
17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	V.58
18. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	V.60
19. Sekretariat Daerah	V.62
20. Sekretariat DPRD	V.71
21. Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan, dan Aset	V.73
22. Inspektorat Daerah	V.77
23. Badan Kepegawaian Daerah	V.79
24. Kecamatan Singkawang Tengah	V.82
25. Kecamatan Singkawang Utara	V.85
26. Kecamatan Singkawang Selatan	V.88
27. Kecamatan Singkawang Timur	V.91
28. Kecamatan Singkawang Barat	V.94
29. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	V.97
30. Dinas Pertanian dan Kehutanan	V.99
31. Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan	V.103
32. Dinas Kelautan dan Perikanan	V.105
Tabel 5.2 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 dan Rencana Plafon Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Urutan Per SKPD Tahun Anggaran 2015	V.109

		Halaman
Tabel 5.3	Rencana Plafon Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2015	V.111
Tabel 5.4	Rencana Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun Anggaran 2015	V.112

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	1.4
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Singkawang	II.2

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	1.4
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Singkawang	II.2

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1	Luas Wilayah Kota Singkawang II.1
Grafik 2.2	Komposisi Penduduk Tahun 2013 II.5
Grafik 2.3	PDRB Kota Singkawang Tahun 2008 - 2013 II.6
Grafik 2.4	Kontribusi Sektoral Kota Singkawang Tahun 2013 II.7
Grafik 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2008 - 2013 II.7
Grafik 2.6	Income Per Kapita Kota Singkawang Tahun 2008 - 2013 II.7
Grafik 2.7	Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 - 2013 II.10
Grafik 2.8	Posisi Relatif Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 II.11
Grafik 2.9	Angka Rata - Rata Lama Sekolah Tahun 2008 - 2013 II.12
Grafik 2.10	Posisi Relatif Angka Rata - Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 II.12
Grafik 2.11	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat 2013 II.14
Grafik 2.12	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008 - 2013 II.16
Grafik 2.13	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Singkawang Tahun 2008 - 2013 II.16
Grafik 2.14	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat 2013 II.17
Grafik 2.15	Angka Kriminalitas Berdasarkan Jenis Kasus Tahun 2012 - 2013 II.19
Grafik 2.16	Posisi Daya Saing Singkawang Dalam Lingkup Kalbar II.29
Grafik 2.17	Daya Saing Daerah Tahun 2010 II.29
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2015 III.2

Lampiran : Peraturan Walikota Singkawang
Nomor : 12 Tahun 2014
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah, RPJP Daerah, RPJM Nasional, serta RKP.

Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2013 – 2017 dan juga mengacu pada sasaran dan arah kebijakan tahapan ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang 2005 – 2025.

Proses penyusunan RKPD didasarkan pada penjabaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya dan disusun melalui proses teknokratik (birokratik), proses politik, dan proses partisipatif (aspiratif), baik secara *bottom-up* dan *top-down*. Lebih lanjut penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah.

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yang menjembatani keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum

Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan acuan dan kerangka tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Singkawang serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif, diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat terwujud keselarasan antara perencanaan dan penganggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Singkawang tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Tahun 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/ M. PAN/ 05/ 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013;
26. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2013-2017.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Singkawang Tahun 2015 memperhatikan keterkaitan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan pembangunan nasional. RKPD menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Renja SKPD. Disamping itu, RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Keterkaitan tersebut diilustrasikan dalam gambar dibawah ini :

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk memberikan arah pembangunan Kota Singkawang dan sinergitas program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kota Singkawang pada Tahun 2015.

Tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam RKP 2015, RKPD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 dan rencana program prioritas Kota Singkawang Tahun 2015.
2. Sebagai operasionalisasi RPJMD dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun mendatang.
3. Menjadi dasar penyusunan Renja SKPD dalam rangka penentuan kegiatan prioritas.
4. Pedoman bagi Pemerintah Kota Singkawang guna penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.
5. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2015.
6. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan hasil evaluasi RKPD tahun 2014, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang pencapaian kinerja pemerintahan, dengan demikian hal-hal yang diuraikan yaitu kondisi geografi dan demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan permasalahan pembangunan.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

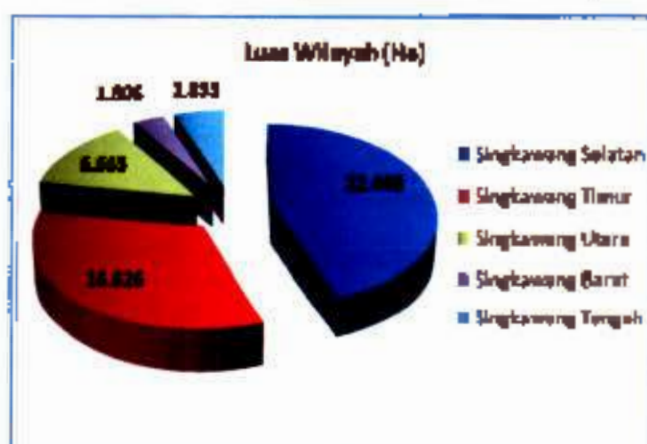
1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Kota Singkawang merupakan salah satu Pemerintahan Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Terletak di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Dibandingkan dengan luas wilayah daerah kabupaten/ kota se-Kalimantan Barat, Kota Singkawang merupakan yang terkecil luas wilayahnya setelah kota Pontianak.

Kota Singkawang terletak pada $0^{\circ} 44' 55,85''$ - $010^{\circ} 01' 21,51''$ Lintang Utara dan $108^{\circ} 51' 47,6''$ - $109^{\circ} 10' 19''$ Bujur Timur di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

Kota Singkawang terdiri dari lima kecamatan dengan luas wilayah 50.400 ha atau sekitar 0,34 persen dari luas wilayah Kalimantan Barat. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Singkawang Selatan (22.448 Ha atau 44,54 persen) dan terkecil adalah kecamatan Singkawang Barat (1.806 Ha atau 3,58 persen) dari wilayah kota.

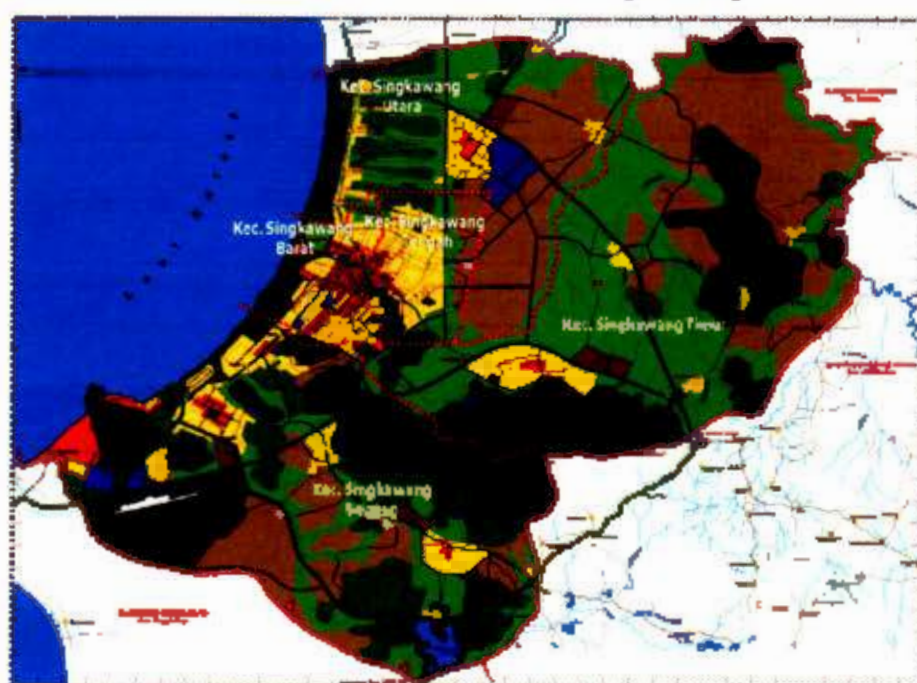
Grafik 2.1
Luas Wilayah Kota Singkawang



Kota Singkawang yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 dengan ibukota Singkawang merupakan pecahan dari Kabupaten Bengkayang dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sambas
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkayang
- Sebelah Barat : Laut Natuna
- Sebelah Timur : Kabupaten Bengkayang

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Singkawang



2. Jenis Tanah

Dari Lima jenis tanah yang terdapat di Kota Singkawang sebagian besar merupakan tanah Aluvial (25.338 Ha) sedangkan yang terkecil adalah tanah Lasotol (2.988 Ha), berikut uraian jenis tanah dengan luas areanya.

- **Organosol** yaitu tanah yang tersusun dari bahan organik/ campuran bahan mineral dan bahan organik. Jenis tanah ini mudah mengering tak balik dan bila kering pekat terhadap erosi serta mudah terbakar. Terdapat seluas 3.752 ha atau sekitar 7,44 persen dari total wilayah kota.
- **Alluvial** yaitu jenis tanah yang berwarna kelabu, coklat sampai hitam, mempunyai sifat tidak peka terhadap erosi dan cocok digunakan untuk usaha budidaya pertanian, dan terbentuk dari endapan laut, sungai dan danau terdapat seluas 25.338 ha atau 50,27 persen dari total wilayah kota.
- **Podsol** yaitu tanah yang bersifat basa dengan tingkat kejenuhan yang rendah, berwarna kuning putih, pada umumnya bertekstur kasar karena terbentuk dari batuan endapan serta termasuk miskin unsur hara. Terdapat 14.276 ha atau 28,33 persen dari total wilayah kota.

- **Latasol** yaitu jenis tanah yang memiliki solusi tanah yang tebal antara 130-200 cm, berwarna coklat, merah sampai kekuning-kuningan. Tanah ini sangat peka terhadap erosi tetapi sangat potensial dikembangkan sebagai usaha pertanian. Terdapat seluas 2.988 ha atau 5,93 persen dari total wilayah kota.
- **PMK (Podsolid Merah Kuning)** yaitu jenis tanah ini berwarna kuning merah, bereaksi masam dengan tingkat kejenuhan basa rendah, sebagian telah dibudidayakan untuk perkebunan karet dan ladang dengan luas 4.046 ha atau 8,03 persen dari total luas wilayah kota.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Area		Jenis Tanah (Ha)				
		(Ha)	(%)	Organosol	Ahorial	Podsol	Latasol	PMK
1.	Singkawang Selatan	22.448	44,54	1.052	11.784	2.880	2.988	3.744
2.	Singkawang Timur	16.626	32,99	2.280	3.926	10.500	-	-
3.	Singkawang Utara	6.665	13,22	500	6.165	-	-	-
4.	Singkawang Barat	1.806	3,58	-	906	600	-	302
5.	Singkawang Tengah	2.855	5,66	-	2.359	296	-	-
Jumlah		59.400	100,00	3.782	26.330	14.276	2.988	4.046
Persentase (%)			100,00	7,44	50,27	28,33	5,93	8,03

Sumber/ Source : Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang/ KDA Kota Singkawang 2014

3. Geomorfologi

Berdasarkan topografi, wilayah kota di Singkawang sebagian besar merupakan wilayah dataran dan selebihnya wilayah bukit dan gunung. Wilayah dataran mencapai 31.904 hektar tersebar di 5 kecamatan, sedang bukit dan gunung seluas 18.496 hektar sebagian besar di wilayah Singkawang Timur dan Singkawang Selatan, sedikit di sebelah Barat dan Tengah, sedangkan di Singkawang Utara tidak terdapat wilayah pegunungan dan perbukitan. Luas wilayah tergenang mencapai 14.147 hektar (28,07 persen dari total luas wilayah) tersebar di seluruh kecamatan. Untuk daerah tergenang, Kecamatan Singkawang Timur merupakan kecamatan yang paling luas tergenang (6.126 hektar), sedangkan Kecamatan Singkawang Barat wilayahnya paling sedikit tergenang (1.206 hektar). Luas wilayah yang tidak tergenang mencapai 36.253 hektar (71,93 persen dari total wilayah), dari 36.253 hektar yang tidak tergenang 8,32 persen jenis porous dan sisanya 91,68 persen bukan porous.

Dilihat dari tekstur tanah, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang terdiri dari jenis tanah halus yang meliputi areal 24.238 hektar (48,09 persen), berikutnya jenis tanah sedang 18.496 hektar (36,70 persen), jenis tanah kasar 3.168 hektar (6,29 persen), jenis tanah gambut 3.940 hektar (7,82 persen), jenis tanah rawa 256 (0,51 persen) dan jenis tanah lainnya 302 (0,60 persen). Jika berdasarkan kelas lereng, maka sebagian besar luas wilayah Kota Singkawang berada pada kelas kurang dari 2 persen (37.236 hektar atau 73,88 persen), dan luas

wilayah paling kecil berada pada kelas diatas 40 persen (812 hektar atau 1,61 persen).

4. Penggunaan Tanah

Berdasarkan penggunaan tanah, sebagian besar luas tanah di Kota Singkawang adalah perkebunan (45,60 persen), hutan (15,19 persen) dan sawah irigasi non teknis (12,92 persen). Dari 50.400 hektar luas wilayah Kota Singkawang, areal untuk pemukiman hanya 358,0 hektar (0,71 persen), sementara areal untuk industri merupakan yang areal yang paling kecil yaitu hanya sekitar 10 hektar (0,02 persen). Areal-areal yang lain adalah berupa padang/ semak (10,73 persen), hutan belukar (6,51 persen), kebun campuran (5,22 persen), pertambangan (2,61 persen), dan lain-lain (0,50 persen).

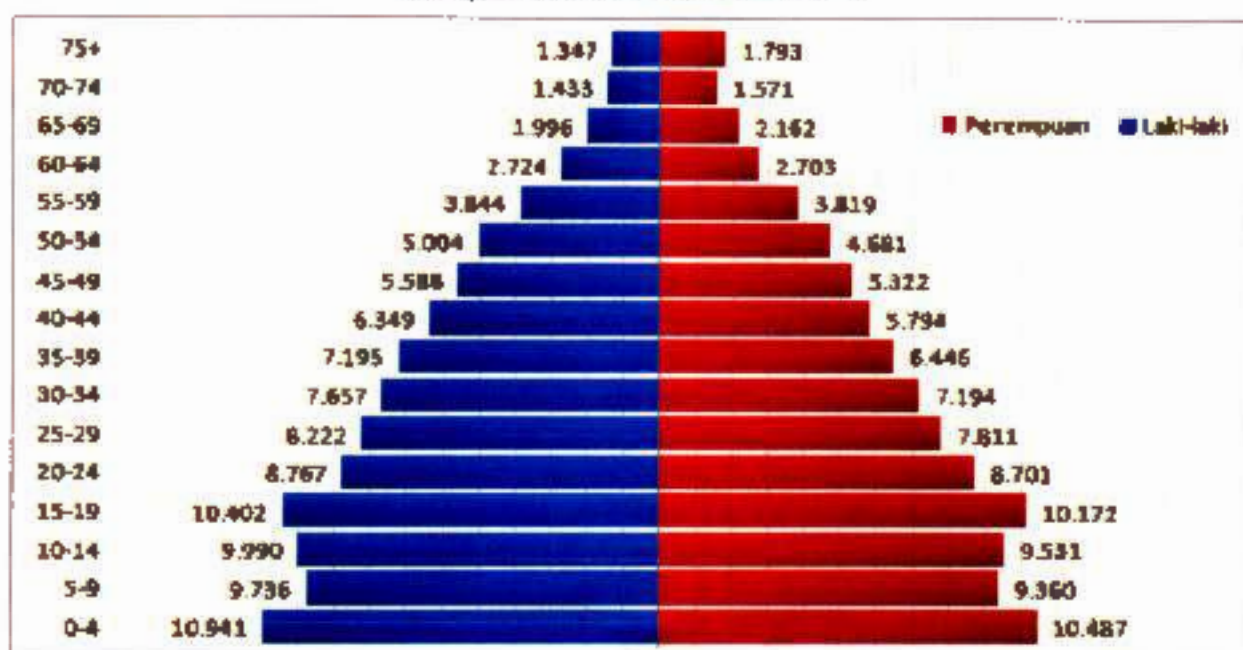
5. Demografi

Kota Singkawang merupakan salah satu daerah berpenduduk multi etnis, dengan keragaman corak budayanya. Kemajemukan penduduk ini berdampak pada terjadinya pembauran (asimilasi) budaya dan sosial. Asimilasi terjadi diantaranya melalui perkawinan, hubungan kerja, dan interaksi hubungan bertetangga yang kemudian melahirkan model kehidupan berkeluarga dan sosial.

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Jumlah penduduk Kota Singkawang tahun 2013 adalah sebanyak 198.742 jiwa, dimana 101.195 jiwa adalah laki-laki dan 97.547 jiwa perempuan, dengan kata lain perbandingan antara penduduk laki laki dan perempuan (sex ratio) sebesar 103,74.

Dengan luas wilayah Kota Singkawang sebesar 504 Km², maka kepadatan penduduk Kota Singkawang sebesar 394 jiwa per kilometer persegi. Penyebaran penduduk di Kota Singkawang tidak merata antar kecamatan. Kecamatan Singkawang Barat dan Singkawang Tengah kepadatannya masing-masing sebesar 3.334 jiwa per Km² dan 1.921 jiwa per Km², sedangkan di Kecamatan Singkawang Selatan, Singkawang Timur, dan Singkawang Utara kepadatannya dimasing-masing kecamatan berturut-turut hanya sebesar 196, 123, dan 350 jiwa per Km². Dilihat dari kepadatan penduduk per kelurahan, kepadatan tertinggi juga terjadi di Kecamatan Singkawang Barat dengan kepadatan 12.539 jiwa per kelurahan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Pasiran, Roban dan Sedau dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 30.824 jiwa, 28.577 jiwa dan 28.487 jiwa. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:

Grafik 2.2
Komposisi Penduduk Tahun 2013



Sumber/ Source : KDA Kota Singkawang 2014

Jumlah kepadatan penduduk di Kota Singkawang Tahun 2012 -2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Kelurahan, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Di Kota Singkawang

Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km²)	Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk Per Kelurahan	Kepadatan Penduduk Per KM	
1	2	3	4	5	6	
1. Singkawang Selatan	4	224,48	44.071	11.017,75	196,32	
2. Singkawang Timur	5	166,26	20.477	4.095,40	123,16	
3. Singkawang Utara	7	66,65	23.391	3.341,57	350,95	
4. Singkawang Barat	4	15,04	50.156	12.539,00	3334,84	
5. Singkawang Tengah	6	31,57	60.647	10.107,83	1921,03	
Jumlah/ Total	2013	26	504	198.742	7.643,92	394,33
	2012	26	504	194.902	7.496,23	386,71
	2011	26	504	190.801	7.338,90	378,57
	2010	26	504	186.462	7.171,62	369,96

Sumber/ Source : KDA Kota Singkawang 2014

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan PDRB

Kota Singkawang memiliki tingkat aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja ekonomi secara makro adalah dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

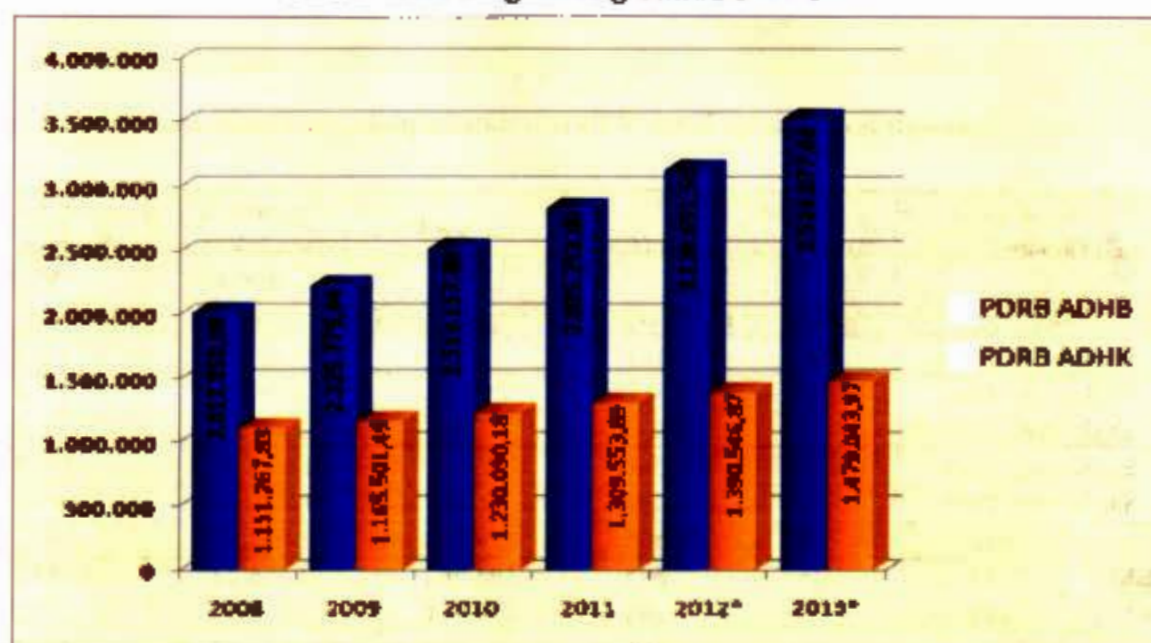
PDRB kota Singkawang atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 yaitu sebesar 3,525 triliun rupiah atau mengalami peningkatan dari tahun

2012 sebesar 12,74 persen. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan pada periode yang sama meningkat sebesar 6,36 persen menjadi sebesar 1,480 triliun rupiah.

Peningkatan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan produksi yang relatif lebih tinggi. Sejak tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang terus tumbuh secara positif. Hal ini membawa dampak pada peningkatan nilai PDRB secara cukup signifikan.

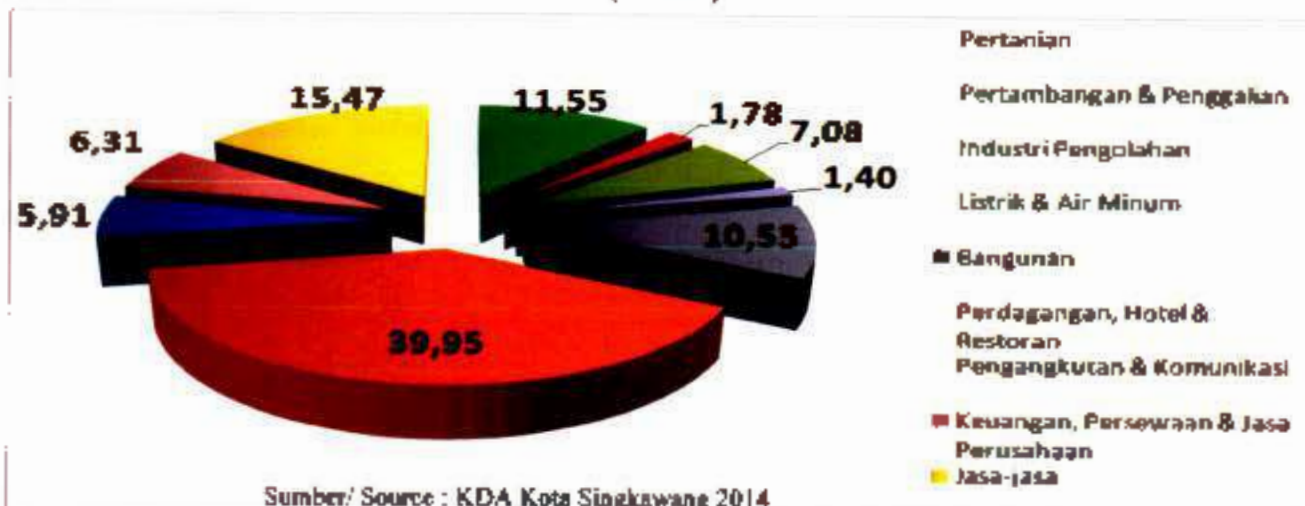
Dalam kurun waktu enam tahun, yakni dari tahun 2008 hingga tahun 2013, nilai PDRB Kota Singkawang tumbuh sebesar 75,11 persen dari semula hanya sebesar 2,012 triliun rupiah meningkat menjadi sebesar 3,525 triliun rupiah pada tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang terutama di dorong oleh kontribusi sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, disusul kemudian oleh sektor Jasa-jasa, sektor Pertanian, dan sektor Bangunan.

Grafik 2.3
PDRB Kota Singkawang Tahun 2008-2013

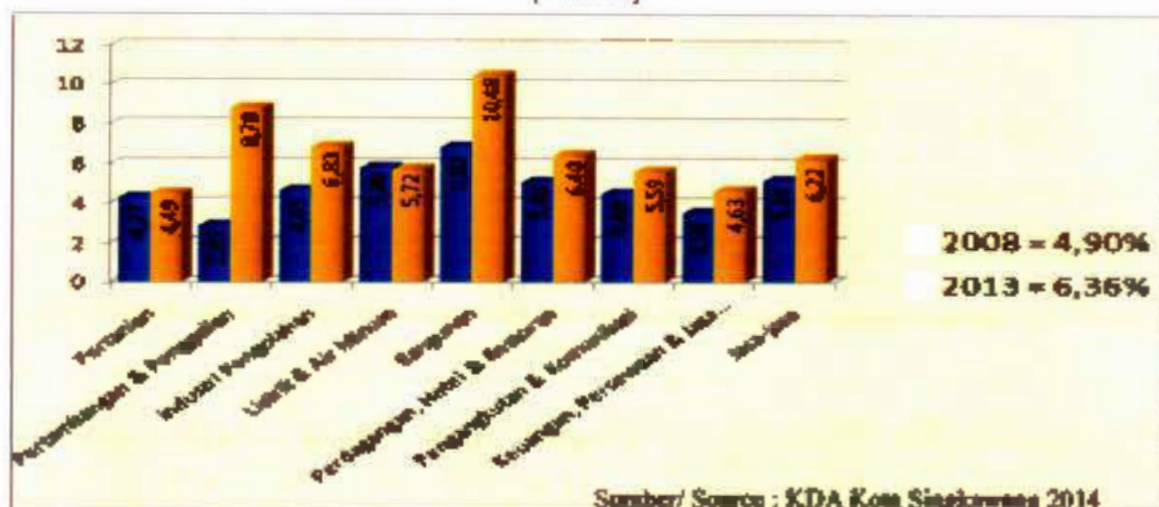


Sumber/ Source : KDA Kota Singkawang 2014

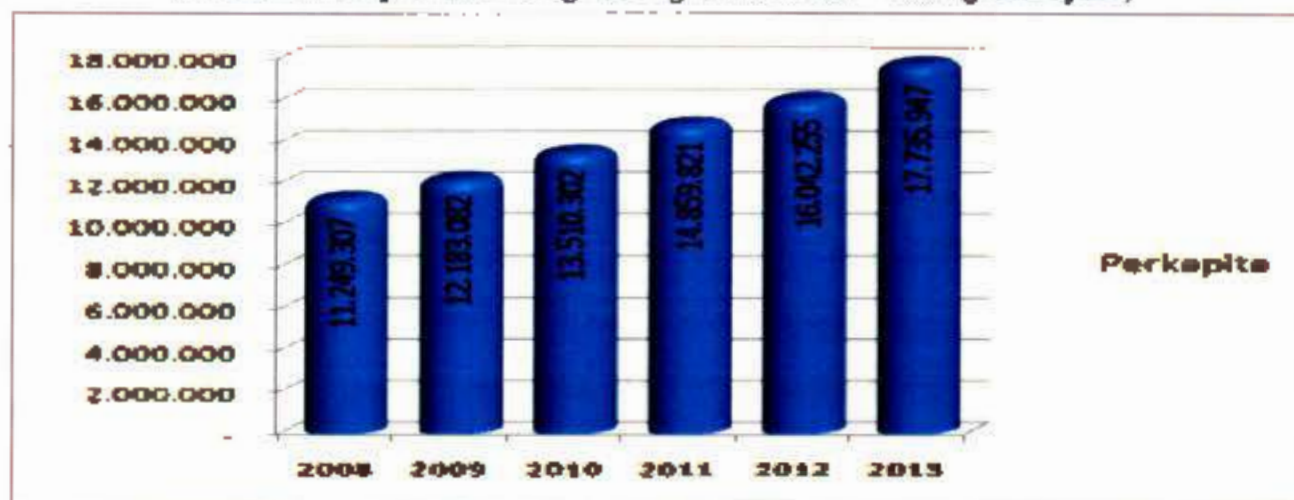
Grafik 2.4
Kontribusi Sektoral Kota Singkawang Tahun 2013
(Persen)



Grafik 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2008 – 2013
(Persen)



Grafik 2.6
Income Per Kapita Kota Singkawang Tahun 2008 – 2013 (juta rupiah)



Sumber/ Source : KDA Kota Singkawang 2014

Dari grafik 2.6 terlihat bahwa pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Secara berangsur pendapatan per kapita naik mulai dari Rp. 11,25 juta pada tahun 2008 hingga mencapai sebesar Rp. 17,74 juta pada tahun 2013. Dari perspektif kesejahteraan masyarakat, kenaikan pendapatan perkapita tersebut memiliki makna sebagai kenaikan status ekonomi masyarakat pula. Dengan lain kata, kondisi empiris tersebut, mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Singkawang mengalami pergerakan positif hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduknya.

B. Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Sedangkan kondisi sebaliknya, dimana harga-harga pada umumnya turun, disebut deflasi. Fluktuasi harga barang-barang kebutuhan pokok tercermin dalam perkembangan laju inflasi suatu daerah. Angka inflasi dan deflasi Kota Singkawang disajikan dalam 6 (enam) tahun yang lalu, dan hitung rata-rata pertumbuhannya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Inflasi Harga Konsumen Menurut Kelompok Jenis Barang/ Jasa
Tahun 2008 – 2013

No	Rincian	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
	UMUM/TOTAL	12,66	1,15	7,10	6,72	4,21	6,15
1	Bahan Makanan	16,45	-1,05	13,10	4,90	7,33	6,31
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	11,59	6,05	3,74	13,28	2,15	6,89
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	14,56	0,81	4,40	8,77	2,08	3,55
4	Sandang	2,49	3,22	2,14	7,54	2,24	1,98
5	Kesehatan	7,26	4,21	1,92	4,44	1,94	5,34
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	4,12	3,04	3,29	8,77	4,98	8,88
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	12,26	-1,31	8,62	0,49	5,08	9,31

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Singkawang

Pada tahun 2013 inflasi Kota Singkawang berada di level yang cukup tinggi mencapai 6,15 persen (qta), lebih tinggi dibandingkan inflasi di tahun 2012 yakni mencapai 4,21 persen (qta). Tingginya tekanan inflasi pada triwulan 2013 tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan inflasi pada kelompok komoditas Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan yakni sebesar 9,31(qta) persen. Kenaikan tarif angkutan udara seiring

berlangsungnya perayaan Cap Go Meh harga, Imlek dan Sembahyang Kubur pada pertengahan triwulan menjadi salah satu faktor pemicu inflasi pada kelompok komoditas tersebut.

C. Tabungan dan Pinjaman Masyarakat terhadap Sektor Perbankan

Penghimpunan dan penyaluran dana diperbankan memegang peranan penting dalam suatu perekonomian. Biasanya tingkat pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap besarnya tabungan. Disisi lain, pinjaman masyarakat untuk modal kerja dan investasi sangat tergantung pada iklim usaha, terutama pangsa pasar, keamanan serta kemudahan-kemudahan yang diperoleh dari kebijakan pemerintah.

Tabel 2.4
Tabungan Masyarakat dalam Perbankan Menurut Jenis Tabungan
Tahun 2008 – 2013 (Milyar)

No	Rincian	Realisasi Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
-1	-2	-3					
1	Giro	311,39	109,49	173,53	169,47	152,62	161,55
	%	22,51	7,94	7,90	7,25	6,98	6,71
2	Simpanan Berjangka	347,98	336,93	417,95	427,35	449,72	564,74
	%	25,16	24,42	19,03	18,29	20,64	23,46
3	Tabungan	723,75	933,45	1605,31	1740,13	1577,38	1680,96
	%	52,33	67,65	73,07	74,46	72,39	69,83
Total		1383,14	1379,88	2196,80	2336,96	2179,12	2407,25
%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dappeda Kota Singkawang

Jumlah dana yang tersimpan di bank pada tahun 2013 mencapai 2,41 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 10,47 persen dibanding tahun 2012. Komposisi dari ketiga simpanan masyarakat berupa giro, simpanan berjangka, dan tabungan masih didominasi oleh tabungan yakni mencapai 70 persen dari total dana yang tersimpan di bank, atau senilai 1,68 triliun rupiah. Bahkan jika dilihat berdasarkan jumlah rekening yang ada, rekening tabungan yang ada di Bank pada tahun 2013 mencapai 154.564 rekening atau mencapai 96,35 persen dari seluruh rekening yang ada. Posisi simpanan berjangka mencapai 564 milyar rupiah yang terkumpul dari 3.9888 rekening deposito. Sementara posisi giro mencapai 161 milyar rupiah yang berasal dari 1.875 rekening giro.

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf (AMH)

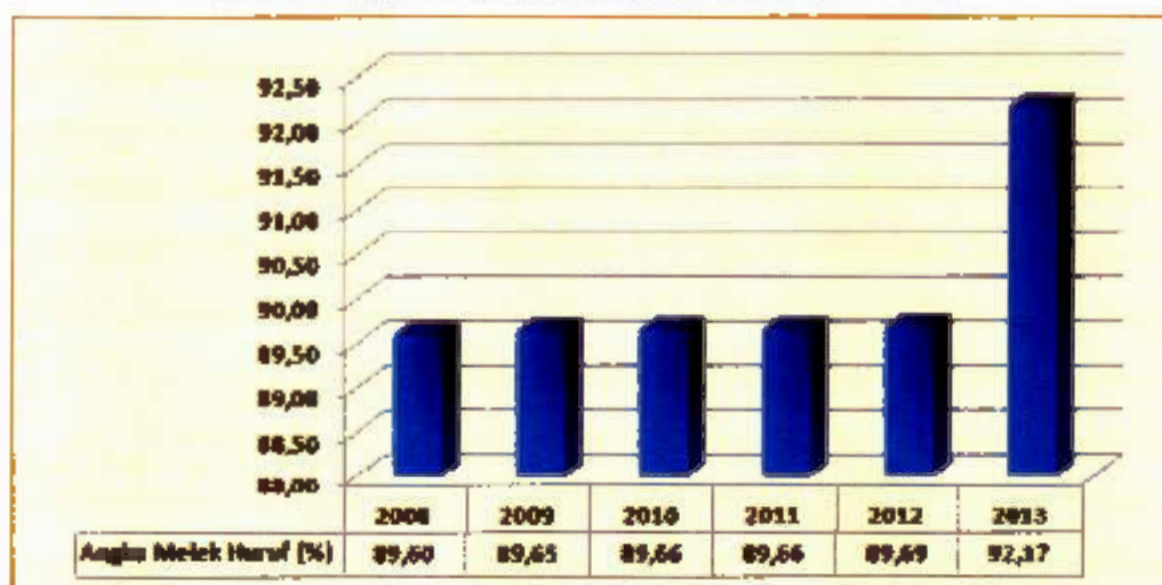
Angka Melek Huruf adalah salah satu indikator dasar penentu kualitas pembangunan manusia. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 AMH Kota Singkawang tidak mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2008 AMH tercatat sebesar 89,60 persen kemudian hanya meningkat sebesar 2,86 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 92,17 persen. Secara umum, pada tahun 2013 penduduk laki-laki di Kota Singkawang memiliki kemampuan baca lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Berdasarkan data Susenas 2013, sebanyak 90,23 persen penduduk Kota Singkawang dapat membaca huruf latin; 33,19 persen dapat membaca huruf arab; dan 5,10 persen dapat membaca huruf lainnya (seperti huruf cina dan sebagainya). Deskripsi dalam bentuk tabel dan grafik disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 – 2013

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis (Jrwa)	105.783	108.099	113.610	116.324	118.525	124.342
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (Jrwa)	118.061	120.578	126.712	129.739	132.193	138.682
3	Angka Melek Huruf (%)	89,60	89,65	89,66	89,66	89,69	92,17

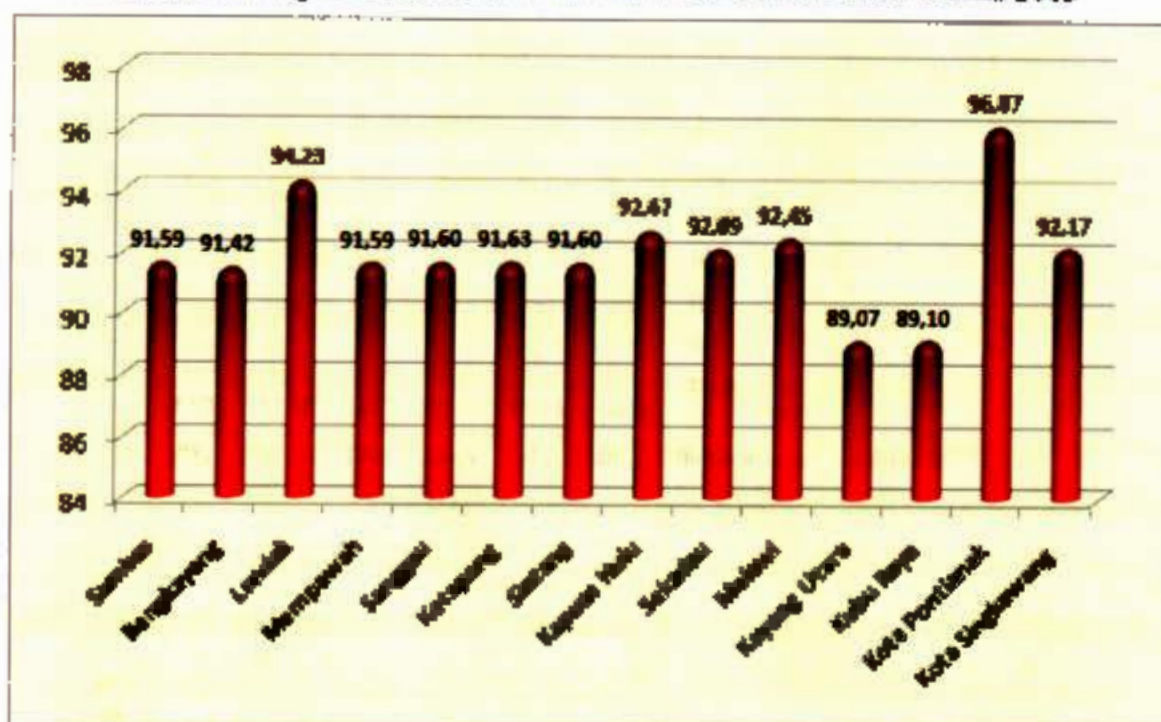
Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Singkawang

Grafik 2.7
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2008 – 2013



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Singkawang

Grafik 2.8
Posisi Relatif Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013



Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Singkawang

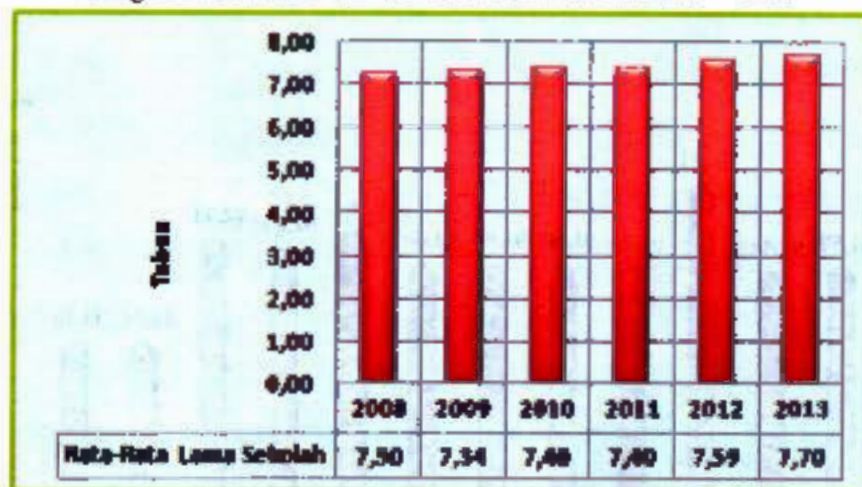
Berdasarkan grafik 2.8 diatas, menunjukkan pada tahun 2013 Angka Melek Huruf Kota Singkawang berada pada posisi peringkat lima dari 14 Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat dengan angka harapan hidup sebesar 92,17 persen dan berada diatas angka melek huruf Provinsi Kalimantan Barat sebesar 91,70 persen.

2. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Angka Rata – Rata Lama Sekolah merupakan salah satu indeks penentu pembangunan manusia yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Dalam kurun waktu 2008-2013 terdapat peningkatan dengan kecenderungan positif yakni naik dari 7,30 tahun menjadi 7,70 tahun pada akhir periode 2013. Ini artinya, pada tahun 2013 secara rata-rata penduduk Kota Singkawang baru bersekolah selama 7,7 tahun atau setara dengan tingkat dua pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

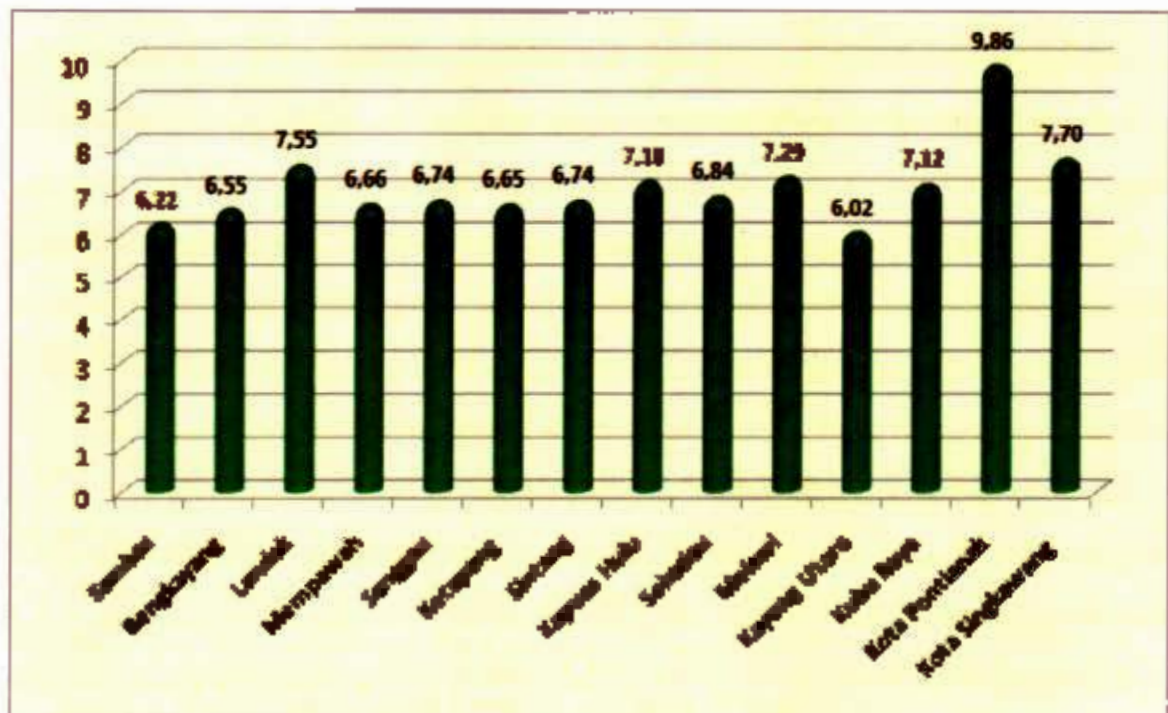
Grafik 2.10, menunjukkan pada tahun 2013 Angka Rata – Rata Lama Sekolah Kota Singkawang berada pada posisi peringkat dua dari 14 Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat dengan angka rata – rata lama sekolah sebesar 7,70 tahun. Berada dibawah angka rata – rata lama sekolah Kota Pontianak sebesar 9,86 tahun serta berada diatas angka melek huruf Provinsi Kalimantan Barat sebesar 7,17 tahun. Deskripsi dalam bentuk grafik disajikan sebagai berikut:

Grafik 2.9
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2008 – 2013



Sumber : Bappeda Kota Singkawang

Grafik 2.10
Posisi Relatif Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013



Sumber : Bappeda Kota Singkawang

3. Angka Partisipasi Kasar dan Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan proporsi anak yang bersekolah terhadap penduduk usia sekolah. Idealnya bernilai 100 dengan pengertian bahwa anak yang bersekolah benar-benar anak usia sekolah. Bila APK bernilai di atas 100 maka artinya ada anak yang di luar usia sekolah tetapi bersekolah. Bila dibawah 100 dapat dipastikan bahwa sebagian dari anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan. Komposisi APK menunjukkan bahwa APK SD diatas 100 sedangkan untuk SMP dan SMA dibawah 100. APK tingkat pendidikan dasar dan menengah Tahun 2011/ 2012 mencapai 81,15 persen dan pada akhir Tahun 2012/ 2013 mencapai 105,96 persen atau mengalami peningkatan 24,81 persen.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan cakupan anak usia sekolah yang bersekolah. Idealnya angka APM bernilai 100, yang artinya bahwa seluruh anak usia sekolah sesuai dengan levelnya mengenyam bangku pendidikan. APM tingkat pendidikan dasar dan menengah mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Angka APM Tahun 2011/ 2012 adalah 69,42 persen dan Tahun 2012/ 2013 adalah 82,62 persen yang berarti mengalami kenaikan sebesar 13,20 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan pada tahun 2012/ 2013 sebanyak 82,62 persen dari anak usia sekolah telah memperoleh pendidikan dan sisanya sebanyak 17,38 persen belum mengenyam pendidikan dimasing-masing tingkat pendidikan sekolah.

Tabel 2.6
Nilai APK dan APM Tahun 2008-2013

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran					
		2007/ 08	2008/ 09	2009/ 10	2010/ 11	2011/ 12	2012/ 13
1	APK						
	- SD/ MI	127,31	124,77	105,53	118,46	116,41	119,17
	- SMP/ MTs	80,63	84,60	78,18	82,04	44,20	104,81
	- SMA/ MA/ SMK	67,37	69,48	65,64	73,12	82,83	93,90
	Rata-rata	91,77	92,95	83,12	91,21	81,15	105,96
2	APM						
	- SD/ MI	97,48	94,42	83,95	94,10	94,08	99,36
	- SMP/ MTs	53,88	56,75	55,08	55,68	58,49	81,81
	- SMA/ MA/ SMK	37,05	34,01	42,71	49,58	55,69	66,70
	Rata-rata	62,80	61,73	60,58	66,45	69,42	82,62

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Bappeda Kota Singkawang

B. Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator yang sangat penting dalam pencapaian pembangunan pada suatu daerah, Kota Singkawang dalam hal ini menggunakan berbagai indikator-indikator kesehatan diantaranya sebagai berikut :

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Rata-rata jumlah anak lahir hidup menurut kelompok umur ibu usia 15-49 tahun pada tahun 2008 adalah sebesar 4.493 jiwa. Sementara itu, pada tahun 2011 adalah sebesar 3.761 jiwa atau mengalami penurunan sebesar 16 persen.

Persentase balita pada tahun 2008 menurut Penolong Waktu Lahir oleh tenaga medis sebesar 82,03 persen dan bukan oleh tenaga medis sebesar 17,97 persen. Sedangkan pada tahun 2011 persentase balita menurut Penolong Waktu Lahir oleh tenaga medis menurun menjadi 80,87 persen dan bukan oleh tenaga medis mengalami kenaikan menjadi

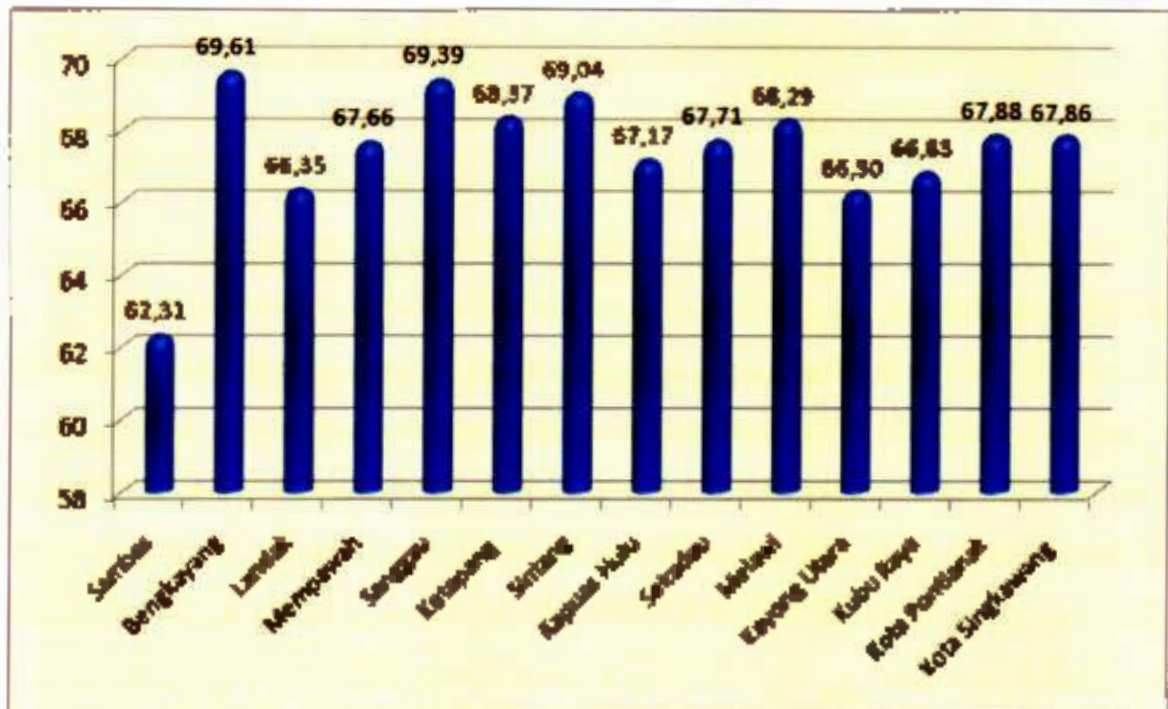
19,13 persen.

Pada tahun 2007 jumlah bayi yang telah memperoleh imunisasi BCG sebanyak 4.421 bayi, imunisasi DPT sebanyak 3.991 bayi, imunisasi Polio sebanyak 1.138 bayi dan imunisasi Campak sebanyak 1.025 bayi. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah bayi yang telah memperoleh imunisasi BCG mengalami penurunan menjadi 4.397 bayi, imunisasi DPT mengalami penurunan menjadi 3.944 bayi, sedangkan imunisasi Polio mengalami kenaikan menjadi 3.916 bayi dan imunisasi Campak meningkat menjadi 3.971 bayi.

2. Angka Usia Harapan Hidup

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian selama bertahun-tahun, sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS. Tahun 2008 dan tahun 2012 Angka Harapan Hidup masing-masing sebesar 67,00 tahun dan 67,48 tahun. Pada tahun 2013 Angka Harapan Hidup meningkat menjadi 67,86 tahun.

Grafik 2.11
Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat 2013



Sumber : Bappeda Kota Singkawang

Berdasarkan grafik 2.11 diatas, menunjukkan pada tahun 2013 angka harapan hidup Kota Singkawang berada pada posisi peringkat tujuh dari 14 Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat dengan angka harapan

hidup sebesar 67,86 tahun dan berada diatas angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 67,40 tahun.

3. Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Selengkapanya status gizi buruk balita di Kota Singkawang yang dihitung berdasarkan pendekatan kasus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Status Gizi Buruk Tahun 2008-2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Balita (Jiwa)	21.663	18.294	21.375	20.164	20.606
2	Jumlah Balita Gizi Buruk (Jiwa)	8	17	12	4	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Singkawang

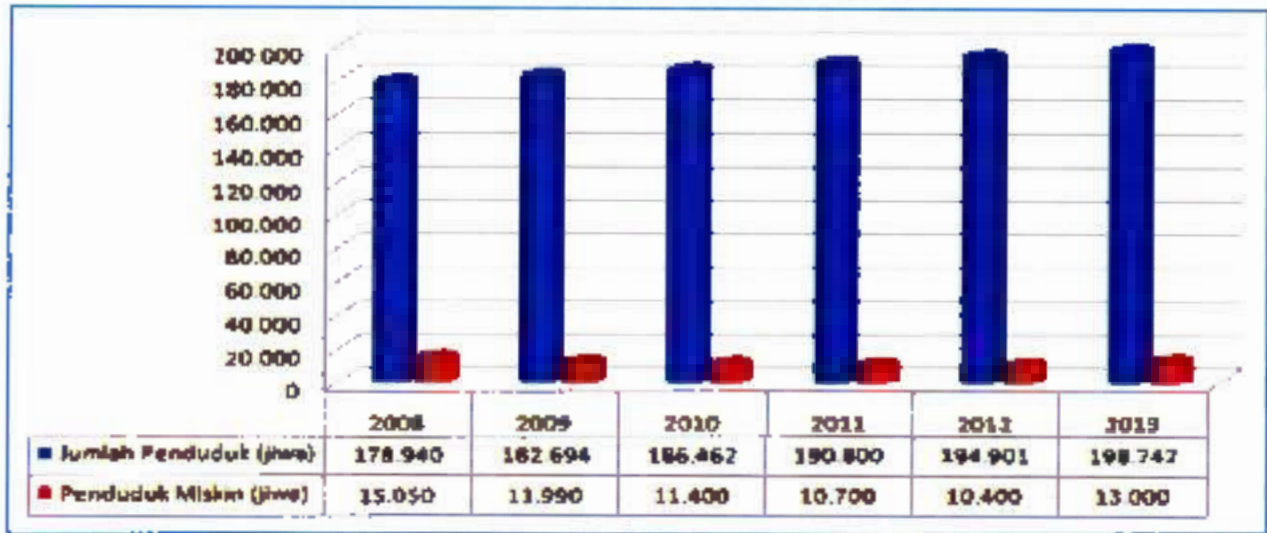
C. Kemiskinan

Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Oleh sebab itu kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Berdasarkan data BPS , jumlah penduduk miskin di Kota Singkawang dari tahun 2008 – 2012 mengalami penurunan, hal ini berkorelasi positif dengan menurunnya jumlah pengangguran di Kota Singkawang. Program dan kegiatan yang responsif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan masih sangat urgen untuk dilanjutkan dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin secara lebih signifikan. Jumlah penduduk miskin di Kota Singkawang

dapat dilihat pada grafik berikut:

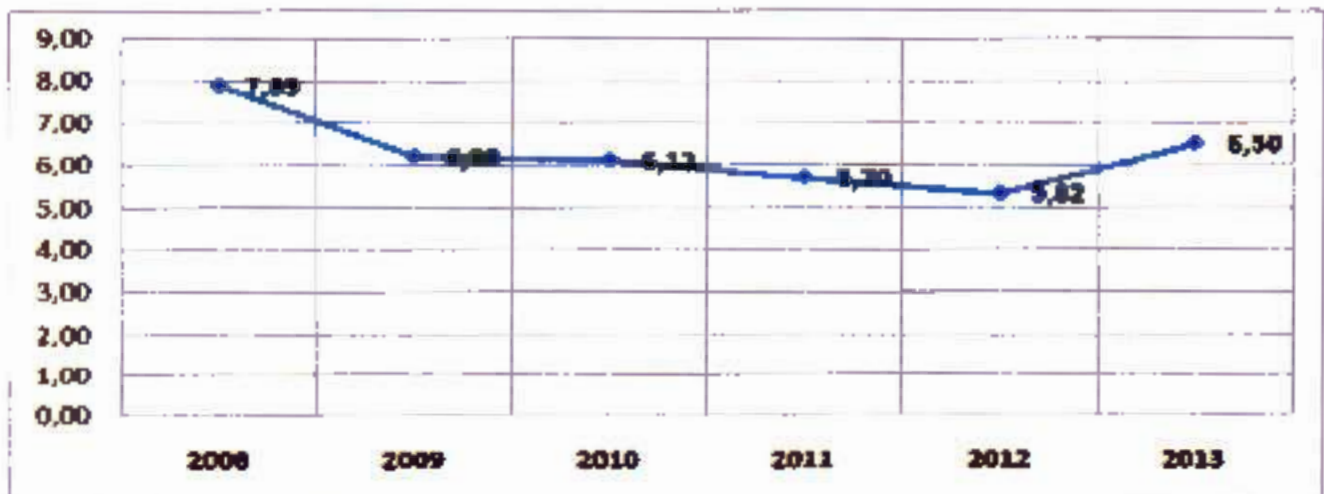
Grafik 2.12
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2008-2013



Sumber : Bappeda Kota Singkawang

Grafik 2.12 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Singkawang dari tahun 2008 sampai tahun 2013. Berdasarkan grafik tersebut diketahui pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin di Kota Singkawang adalah sebanyak 15.050 jiwa dan berkurang sebesar 20 persen di tahun 2009 menjadi sebanyak 11.993 jiwa dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2012 menjadi sebanyak 10.400 jiwa atau mengalami rata-rata penurunan sebesar 4,44 persen. Pada tahun 2013, penduduk miskin di Kota Singkawang berjumlah sebanyak 13.000 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 198.742 jiwa dengan nilai rasio kemiskinan adalah sebesar 65,41 atau dapat diartikan per 1.000 jumlah penduduk, masih terdapat sebanyak 65 penduduk miskin di Kota Singkawang.

Grafik 2.13
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Singkawang
Tahun 2008 – 2013

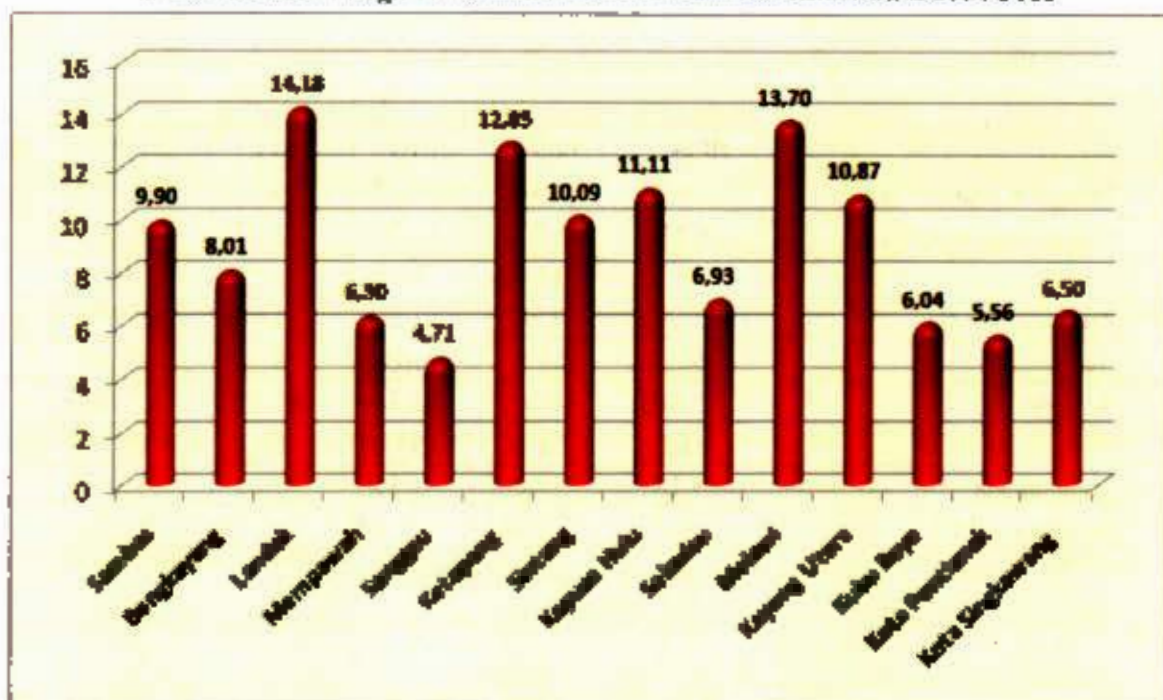


Sumber : Bappeda Kota Singkawang

Data diatas, menunjukkan dalam lima tahun terakhir (2008-2012)

tingkat kemiskinan di Kota Singkawang cenderung mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan terjadinya peningkatan per kapita Kota Singkawang dimana pada tahun 2008 per kapita Kota Singkawang adalah sebesar Rp. 11,25 juta dan mencapai Rp. 16,04 juta pada tahun 2012. Pada tahun 2013 tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2012 sebesar 1,18 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan ini diantaranya dipengaruhi kenaikan inflasi yang cukup tinggi sebesar 6,15 persen yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM pada bulan juni 2013, kenaikan harga komoditas bahan pokok serta terjadinya peningkatan tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 4,58 persen.

Grafik 2.14
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat 2013



Sumber : Bappeda Kota Singkawang

Berdasarkan grafik 2.14 diatas, menunjukkan pada tahun 2013 tingkat kemiskin Kota Singkawang berada pada posisi peringkat lima terendah dibandingkan Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat dengan angka tingkat kemiskinan sebesar 6,50 persen sementara angka tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 8,74 persen dan secara Nasional sebesar 11, 47 persen.

D. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja pada suatu daerah merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber ekonomi dalam proses produksi untuk mencapai kesejahteraan. Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan menghasilkan pendapatan. semakin meningkat

pembangunan, semakin besar pula kesempatan kerja yang tersedia. Kesempatan kerja juga meliputi kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja berarti semakin luas kesempatan kerja

. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Pada tahun 2013 nilai TPT adalah sebesar 4,58 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 4-5 orang merupakan pengangguran. Untuk mengetahui kondisi penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja Kota Singkawang tahun 2008-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2008-2013

No.	Uraian	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Tenaga Kerja (15 thn+)	123.674	121.340	127.453	126.339	128.412	128.395
2	Bukan Angkatan Kerja	46.692	41.777	42.557	41.475	39.236	42.974
	%	37,75	34,43	33,39	32,83	30,55	33,47
3	Angkatan Kerja	76.982	79.563	84.896	84.864	89.176	85.421
	%	62,25	65,57	66,61	67,17	69,45	66,53
4	Bekerja	71.801	74.502	80.346	81.817	87.189	81.505
	%	58,06	61,40	63,04	64,76	67,90	63,48
5	Menganggur	5.181	5.060	4.550	3.047	1.987	3.916
6	Persentase TPT	6,73	6,36	5,36	3,59	2,23	4,58

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Singkawang

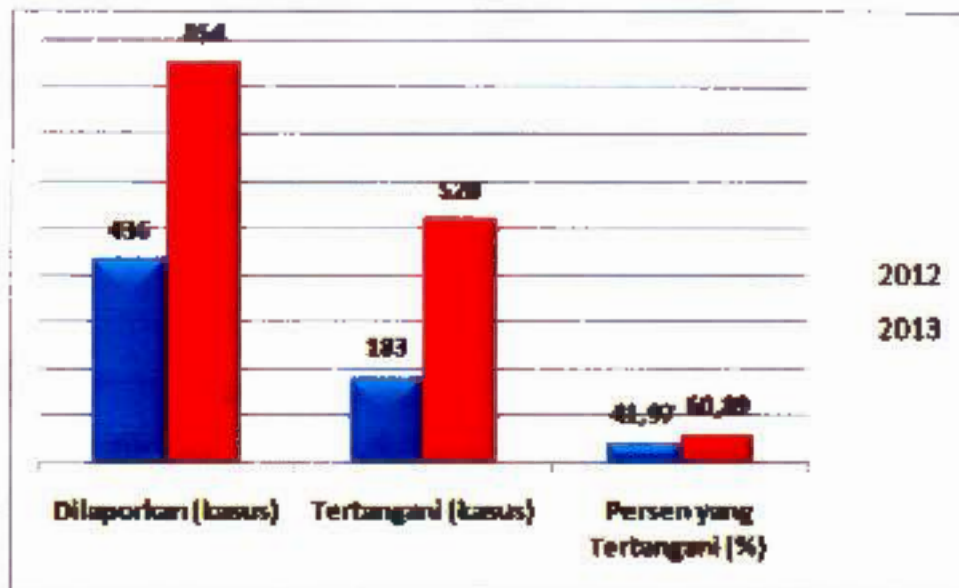
E. Kriminalitas

Angka kriminalitas yang tertangani menunjukkan jumlah tindakan kriminal yang telah ditangani oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Berdasarkan Grafik 2.15, pada tahun 2012 total jumlah kasus yang dilaporkan kepada kepolisian adalah sebanyak 436 kasus dengan persentase kasus yang tertangani sebesar 41,97 persen atau sebanyak 183 kasus. Pada tahun 2013 total jumlah kasus yang dilaporkan kepada kepolisian adalah sebanyak 854 kasus, meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 95,87 persen atau bertambah sebanyak 418 kasus.

Pada tahun 2013 jumlah kasus tertangani adalah sebanyak 520 kasus dengan persentase sebesar 60,89 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 18,92 persen. Sedangkan untuk kasus yang tidak tertangani pada tahun 2012 adalah sebanyak 253 kasus atau sebesar 58,03 persen dan pada tahun 2013 sebanyak 334 kasus tidak tertangani dengan persentase sebesar 39,11 persen. Untuk melihat angka

kejahatan di Kota Singkawang tahun 2012-2013 yang tertangani oleh aparat penegak hukum berdasarkan laporan masyarakat dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.15
Angka Kriminalitas Berdasarkan Jumlah Kasus Tahun 2012-2013



Sumber: Polres Kota Singkawang

F. Agama

Agama merupakan salah satu karakteristik sosial yang menjadi ciri keberagaman kultur di Kota Singkawang. Selama ini terjalin harmonis hubungan multikulturalisme, selengkapny jumlah fasilitas tempat ibadah tahun 2013 dimana Masjid sebanyak 120, Mushala sebanyak 76, Gereja sebanyak 79, Vihara sebanyak 23 dan Cetya sebanyak 267.

Tabel 2.9
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Jenis Tahun 2013

No	Kecamatan	Islam			Kristen Protestan		Kristen Katolik		Hindu	Budha	
		Masjid	Surau	Mushalla	Gereja	Pus. Pengabd.	Gereja	Kapel	Para	Vihara	Cetya
1	Singkawang Selatan	34	23	5	16	8	6	0	0	7	73
2	Singkawang Timur	13	4	2	16	3	14	2	0	1	21
3	Singkawang Utara	22	16	6	1	1	0	0	0	1	11
4	Singkawang Barat	13	10	1	15	2	2	6	0	11	114
5	Singkawang Tengah	38	21	12	8	2	1	0	0	3	46
	Kota Singkawang	120	76	33	56	16	23	8	0	23	267

Sumber: KDA Kota Singkawang

G. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai praktek diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan lainnya mencakup kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Pemerintah Kota Singkawang secara bertahap berupaya

untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki. Organisasi wanita dimaksud ada yang bersifat sosial diantaranya Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Wanita Bhayangkari, dan Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI). Bersifat profesi diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI. Bersifat kemasyarakatan diantaranya Tim Penggerak PKK, Posyandu, dan Penyuluh kesehatan serta organisasi wanita yang bersifat keagamaan diantaranya Majelis Ta'lim/ Pengajian. Untuk melihat partisipasi perempuan diberbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki di Kota Singkawang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Proporsi Perempuan Tahun 2008-2013

No	Uraian	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	-	21,9	49,28	60,17	60,24	56,46
2	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	21,49	22,07	39,82	38,82	52,58
3	Jumlah Organisasi Perempuan	22	26	28	36	36	36
4	Jumlah Legislatif Perempuan	-	2	2	2	2	2

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB Kota Singkawang

H. Seni Budaya dan Olahraga

Organisasi pemuda disuatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memperdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Di Kota Singkawang terdapat beberapa organisasi yang menaungi aktifitas kepemudaan yang bergerak dibidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Diantaranya KNPI, Karangtaruna, Remaja Masjid dan lain-lain. Beberapa organisasi kepemudaan seperti sanggar seni, dan olahraga dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.11
Jumlah Grup Kesenian, Klub dan Gedung Olahraga Tahun 2009-2013

No	Kategori	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Grup Kesenian	27	27	26	26	26
2	Jumlah Klub Olah Raga	116	119	124	127	127
3	Jumlah Gedung Olah Raga	4	4	4	4	4
4	Jumlah Lapangan Olahraga	36	36	36	31	31

Sumber : Dinas Kebudayaan Partisipasi Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum mencakup pelayanan dasar dan pelayanan penunjang. Kondisi pelayanan dasar dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang yakni bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan. Sedangkan kondisi pelayanan penunjang dapat diketahui dari beberapa bidang yakni penanaman modal, KUKM, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, KB dan KS, komunikasi dan informatika, pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perpustakaan, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pemuda dan olah raga.

Tabel 2.12
Aspek Pelayanan Umum Kota Singkawang Tahun 2009-2013

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN					SKPD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
Fokus Layanan Urusan Wajib							
	Pendidikan						
	Pendidikan Dasar:						
1	Angka partisipasi sekolah/ SD/ MI	103,95	103,43	103,97	103,92	103,92	Dinas Pendidikan
2	Rasio guru terhadap murid	17	18	19	18	18	Dinas Pendidikan
3	Jumlah sekolah SD/ MI	0	98	98	99	103	Dinas Pendidikan
4	Rasio jumlah sekolah SD/ MI terhadap penduduk usia sekolah	0	4,03	3,6	4,09	3,7	Dinas Pendidikan
5	Angka putus sekolah/ SD/ MI	0,73	0,78	0,7	0,56	0,56	Dinas Pendidikan
6	Angka kelulusan SD/ MI	98,26	99,97	99,79	99,79	99,79	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Menengah:						
7	Angka partisipasi sekolah/ SMP/ MTs	83,78	89,14	92,05	91,9	91,9	Dinas Pendidikan
8	Rasio guru terhadap murid	13	15	14	14	8	Dinas Pendidikan
9	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	89,65	89,66	89,66	90,84	92,17	Dinas Pendidikan
10	Jumlah sekolah SMP/ MTs	0	45	45	45	45	Dinas Pendidikan
11	Rasio jumlah sekolah SMP/ MTs terhadap penduduk usia sekolah	0	3,69	3,66	3,63	4,04	Dinas Pendidikan
12	Angka putus sekolah SMP/ MTs	1,22	1,68	1,57	1,02	1,02	Dinas Pendidikan
13	Angka kelulusan SMP/ MTs	62,82	95,32	93,25	96,74	96,74	Dinas Pendidikan
	SMA/ SMK						
14	Angka partisipasi sekolah/ SMA/ MA	31,87	35,65	63,76	63,59	63,59	Dinas Pendidikan
15	Rasio guru terhadap murid SMA	10	11	11	11	11	Dinas Pendidikan
16	Rasio guru terhadap murid SMK	11	16	14	15	12	Dinas Pendidikan
17	Jumlah sekolah SMA/ SMK	0	31	32	34	34	Dinas Pendidikan
18	Rasio jumlah sekolah SMA/ SMK terhadap penduduk usia sekolah	0	2,73	3,07	2,98	3,48	Dinas Pendidikan
19	Angka putus sekolah SMA/ SMK	1,36	1,4	0,9	1,19	1,19	Dinas Pendidikan
20	Angka kelulusan SMA/ SMK	82,45	94,56	98,64	99,53	99,53	Dinas Pendidikan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN					SKPD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kesehatan							
21	Jumlah Posyandu	131	134	135	135	134	Dinas Kesehatan
22	Jumlah Balita	18.294	21.375	20.164	20.606	21.374	Dinas Kesehatan
23	Rasio jumlah Posyandu per satuan balita	7,16	6,27	6,70	6,55	6,27	Dinas Kesehatan
24	Jumlah Puskesmas	5	5	5	5	5	Dinas Kesehatan
25	Jumlah Balai Pengobatan	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
26	Jumlah Pustu	13	13	13	13	13	Dinas Kesehatan
27	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Dinas Kesehatan
28	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	Dinas Kesehatan
29	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
30	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan penyakit khusus lainnya milik Pemerintah	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
31	Jumlah Rumah Sakit AD/ AU/ AU/ POLRI	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
32	Jumlah Rumah Sakit Swasta	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan
33	Jumlah seluruh Rumah Sakit	6	6	6	6	6	Dinas Kesehatan
34	Rasio Rumah Sakit per jumlah penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	Dinas Kesehatan
35	Jumlah Dokter	68	84	76	74	73	Dinas Kesehatan
36	Jumlah Tenaga Paramedis	588	584	770	760	785	Dinas Kesehatan
37	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	3,22	3,13	4,04	3,91	3,95	Dinas Kesehatan
Pekerjaan Umum							
38	Panjang jalan dalam kondisi baik	201,86	206,19	210,06	214,39	260,68	BSE
39	Total panjang jalan	495,44	500,96	503,00	507,01	564,71	BSE
40	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	40,74	41,16	41,76	42,29	46,16	BSE
41	Persentase RT bersanitasi baik	89,12	87,45	87,25	85,89	85,89	BSE
42	Luas wilayah banjir (ha)	5.200	5.200	3.155	3.300	3.300	BSE
43	Jumlah titik genangan (titik lokasi)	14	14	14	14	14	BSE
44	Lama genangan air (jam)	48	30	24	24	24	BSE
45	Rasio luas wilayah banjir	10,32	10,32	6,26	6,55	6,55	BSE
46	Panjang sungai (m)	43.353	43.353	43.353	43.353	43.353	BSE
47	Panjang sungai tertangani (m)	2.002	0	0	0	0	BSE
48	Panjang saluran primer/ sekunder (m)	17.709	38.350	2.599	19.340	19.340	BSE
49	Panjang saluran primer/ sekunder tertangani (m)	9.779	31.976	299	172	172	BSE
50	Rasio panjang sungai tertangani	4,62	0	0	0	0	BSE
51	Rasio panjang saluran primer/ sekunder tertangani	55,22	83,38	11,5	0,89	0,89	BSE
52	Panjang jaringan irigasi	3.559	3.559	3.559	3.559	3.559	BSE
53	Panjang jaringan irigasi tertangani (m)	30,46	30,76	456,94	2.867	2.867	BSE
54	Luas daerah irigasi (Ha)	11.391	11.391	11.391	11.391	11.391	BSE
55	Luas daerah irigasi tertangani (Ha)	4.757	4.757	6.362	6.362	6.362	BSE
56	Rasio panjang jaringan irigasi tertangani	0,86	0,86	12,84	80,56	80,56	BSE
57	Rasio luas daerah irigasi tertangani	41,76	41,76	55,85	55,85	55,85	BSE

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN					SKPD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Luas irigasi dalam kondisi baik (ha)	0	0	2.648	2.544	2.544	BSE
<i>Perumahan</i>							
59	Jumlah rumah tinggal	40.802	40.924	41.047	41.047	41.047	Dinas Tata Kota
60	Jumlah rumah tidak layak huni	1.700	1.750	1.875	1.650	1.650	Dinas Tata Kota
61	Luas kawasan pemukiman kumuh (ha)	47	39	31	28	28	Dinas Tata Kota
62	Rasio rumah tidak layak huni terhadap total rumah	4,17	4,28	4,57	4,02	4,02	Dinas Tata Kota
63	Bantuan rumah tidak layak huni	50	100	225	407	407	Dinas Tata Kota
64	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih	62.358	62.140	62.010	62.660	62.660	Dinas Tata Kota
65	Persentase penduduk berakses air bersih (%)	34,13	33,33	32,50	32,23	32,23	Dinas Tata Kota
66	Jumlah penduduk yang mendapatkan listrik	32.443	33.756	35.069	36.382	36.382	Dinas Tata Kota
67	Jumlah RT	35.133	35.858	36.693	37.387	37.387	Dinas Tata Kota
68	Persentase RT menggunakan listrik (%)	92,34	94,14	95,58	97,31	97,31	Dinas Tata Kota
69	Jumlah RT yang bersanitasi	31.309	31.357	32.014	32.110	32.110	Dinas Tata Kota
70	Persentase rumah tinggal bersanitasi baik (%)	76,73	76,62	77,99	78,23	78,23	Dinas Tata Kota
<i>Penataan Ruang</i>							
71	Luas RTH (ha)	3.414,19	3.414,19	3.414,19	3.418,70	3.418,70	Bappeda / Dinas Tata Kota
72	Luas wilayah ber-HPL/ HGB (ha)	33,14	35,2	35,54	38,12	38,12	Bappeda / Dinas Tata Kota
73	Luas wilayah (ha)	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	Bappeda / Dinas Tata Kota
74	Rasio luas RTH terhadap luas wilayah	6,77	6,77	6,77	6,78	6,78	Bappeda / Dinas Tata Kota
<i>Perencanaan Pembangunan</i>							
75	Tersedianya dokumen perencanaan RPID yang telah ditetapkan dengan PERDA	Tidak ada	Tidak ada	ada	ada	ada	Bappeda
76	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
77	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
78	Tersedianya dokumen perencanaan : RTRWK yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
<i>Perhubungan</i>							
79	Jumlah pelabuhan	1	1	2	2	2	Disperhubkominfo
80	Jumlah bandara	0	0	0	0	0	Disperhubkominfo
81	Jumlah terminal	3	3	3	3	3	Disperhubkominfo
82	Jumlah izin trayek	271	271	229	229	229	Disperhubkominfo
83	Rasio izin trayek	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	Disperhubkominfo
84	Jumlah uji KIR angkutan umum	3.902	4.015	4.207	4.207	4.207	Disperhubkominfo
<i>Lingkungan Hidup</i>							
85	Jumlah sampah yang ditangani (m ³)	62.780	64.240	71.905	81.760	81.760	Dinas Kebersihan dan Perumahan
86	Jumlah produksi sampah (m ³)	69.946	70.664	79.095	89.936	89.936	Dinas Kebersihan dan Perumahan
87	Rasio jumlah sampah yang	90	91	91	91	91	Dinas Kebersihan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN					SKPD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ditangani (m3) terhadap Jumlah produksi sampah (m3)						dan Perumahan
89	Jumlah TPS (unit)	68	68	70	72	72	Dinas Kebersihan dan Perumahan
90	Jumlah daya tampung TPS (m ³)	529	529	536	576	576	Dinas Kebersihan dan Perumahan
91	Persentase daya tampung TPS per satuan penduduk (%)	0,29	0,28	0,28	0,3	0,3	Dinas Kebersihan dan Perumahan
Perumahan							
92	Luas tanah bersertifikat (ha)	20.949,34	21.811,20	22.427,68	23.405,19	23.405,19	Dinas Tata Kota
93	Luas wilayah (ha)	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400	Dinas Tata Kota
94	Persentase luas tanah terhadap luas wilayah (%)	41,57	43,28	44,5	46,44	46,44	Dinas Tata Kota
95	Jumlah izin yang diterima	17	68	50	67	67	Dinas Tata Kota
96	Jumlah pemohon	17	68	52	75	75	Dinas Tata Kota
97	Persentase izin yang diterima terhadap total permohonan	100	100	96,15	89,33	89,33	Dinas Tata Kota
Kependudukan dan Catatan Sipil							
98	Rasio penduduk ber-KTP SIAK per satuan penduduk	0,04	0,32	0,55	0,6	0,6	Disdukcapil
99	Rasio pasangan non muslim ber-akte nikah	0,67	1,73	88,5	86,8	86,8	Disdukcapil
100	Rasio bayi ber-akte kelahiran	13,4	39,4	48,6	53,1	53,1	Disdukcapil
101	Rasio kepemilikan KK SIAK	22,7	64,3	77,7	83,8	83,8	Disdukcapil
102	Rasio kepemilikan KTP SIAK	8,25	32,3	54,9	60,5	60,5	Disdukcapil
103	Rasio kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	64,05	78,85	91,19	96,01	96,01	Disdukcapil
104	Jumlah penduduk (jiwa)	207.822	222.821	233.936	241.677	241.677	Disdukcapil
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
105	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3	3	3	3	BPMPKB
106	Rasio akseptor KB	0	81,6	89,95	74,43	74,43	BPMPKB
107	Cakupan peserta KB aktif (%)	80,41	73,26	86,6	79,34	79,34	BPMPKB
108	Program usia subur	43.651	44.381	46.663	47.863	47.863	BPMPKB
109	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	11.246	10.403	13.061	10.403	10.403	BPMPKB
Sosial							
110	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,57	66,61	67,17	69,45	66,53	Disosnakertrans
111	Tingkat kesempatan kerja	93,64	94,64	96,41	99,86	99,86	Disosnakertrans
112	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	12	12	12	12	12	Disosnakertrans
113	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	4.354	4.718	4.010	1.919	1.919	Disosnakertrans
114	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	6,76	7,33	6,23	2,98	2,98	Disosnakertrans
115	Keluarga fakir miskin (KUBE FM & Dhuafa)	1.250	1.250	1.550	1.490	1.490	Disosnakertrans
102	Anak terlantar	130	130	120	-	-	Disosnakertrans
103	Lanjut usia terlantar (JSLU&UEP LU)	125	117	101	190	190	Disosnakertrans
Kebudayaan							
104	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12	4	3	6	6	Disbudparpora
105	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	96	97	97	97	97	Disbudparpora
Kesatuan Bangsa dan Politik							

NO	BIDANG URUSAN/INDEKATOR	TAHUN					SKPD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
106	Jumlah Pol PP	105	105	105	105	105	Satuan Pol PP
107	Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk	5,75	5,63	5,5	5,4	5,4	Satuan Pol PP
108	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	77,45	75,89	74,16	72,71	72,71	Kesbangpolinmas
109	Rasio Poskamling per kecamatan	1,58	1,31	1	1	1	Kesbangpolinmas
Otonomi Daerah, Pemberdayaan Ummat, Administrasi Kemangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandikan							
110	Pertumbuhan ekonomi	4,88	5,54	6,46	6,18	6,36	Bappeda
111	Kemiskinan	6,20	6,12	5,70	5,32	6,50	Bappeda
112	Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintahan	tidak ada	tidak ada	ada	ada	ada	Bappeda
113	Sistem informasi manajemen Penda	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
Statistik							
114	Buku "Kota Dalam Angka"	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
115	Buku "PDRB kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada	Bappeda
Komunikasi dan Informatika							
116	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	9	9	9	9	9	Dishubkominfo
117	Jumlah penyiaran radio/ TV lokal	7	6	6	6	6	Dishubkominfo
118	Website milik Pemerintah Daerah	ada	ada	ada	ada	ada	Dishubkominfo
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
119	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	5	5	5	5	5	BPMPKB
120	Jumlah LSM	5	9	9	13	13	Kesbangpolinmas
121	PKK aktif	32	32	32	32	32	BPMPKB
122	Posyandu aktif	134	134	133	121	121	BPMPKB
Perpustakaan							
123	Jumlah perpustakaan	1	1	6	19	19	Kantor Perpustakaan
124	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	5.050	7.964	12.286	19.939	19.939	Kantor Perpustakaan
125	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.238	2.361	1.300	1.140	1.140	Kantor Perpustakaan
Fokus Layanan Urusan Pilihan							
Pertanian							
126	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	13,27	12,5	12,18	11,89	11,55	Dinas Pertanian dan Kehutanan
127	Kontribusi sub sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	2,51	2,31	2,23	2,36	2,17	Dinas Pertanian dan Kehutanan
128	Jumlah produksi padi (ton)	17.901	21.523	21.456	16.560	17.447	Dinas Pertanian dan Kehutanan
129	Jumlah produksi palawija (ton)	5.133	2.649	2.885	2.093	2.093	Dinas Pertanian dan Kehutanan
130	Luas lahan karet (ha)	10.270	6.226	6.226	10.095	10.095	Dinas Pertanian dan Kehutanan
131	Jumlah produksi karet (ton)	4.846	4.855	4.860	5.221	5.221	Dinas Pertanian dan Kehutanan
132	Luas lahan kelapa (ha)	2.737	2.761	2.761	2.835	2.835	Dinas Pertanian dan Kehutanan
133	Jumlah produksi kelapa (ton)	1.410	1.424	1.437	1.548	1.548	Dinas Pertanian dan Kehutanan
134	Luas lahan kelapa sawit (ha)	2.369	5.953	5.953	5.047	5.047	Dinas Pertanian dan Kehutanan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN					SKPD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
135	Jumlah produksi kelapa sawit (ton)	355	1.770	1.925	19.847	19.847	Dinas Pertanian dan Kehutanan
136	Luas lahan kopi (ha)	22	13	17	20	20	Dinas Pertanian dan Kehutanan
137	Jumlah produksi kopi (ton)	18	18	15	26	26	Dinas Pertanian dan Kehutanan
138	Luas lahan kakao (ha)	193	315	193	727	727	Dinas Pertanian dan Kehutanan
139	Jumlah produksi kakao (ton)	82	190	136	41	41	Dinas Pertanian dan Kehutanan
140	Luas lahan lada (ha)	77	55	54	61	61	Dinas Pertanian dan Kehutanan
141	Jumlah produksi lada (ton)	68	68	60	60	60	Dinas Pertanian dan Kehutanan
142	Luas lahan cengkeh (ha)	8	5	0	5	5	Dinas Pertanian dan Kehutanan
143	Jumlah produksi cengkeh (ton)	1	1	0	1	1	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Peternakan							
144	Jumlah populasi ternak sapi potong (ekor)	6.516	6.811	5.918	6.025	5.067	Dinas Pertanian dan Kehutanan
145	Jumlah populasi ternak kambing (ekor)	2.705	3.217	3.234	2.962	2.654	Dinas Pertanian dan Kehutanan
146	Jumlah populasi ternak babi (ekor)	20.250	19.266	14.019	23.765	23.873	Dinas Pertanian dan Kehutanan
147	Jumlah populasi ternak ayam buras (ekor)	435.251	474.826	499.688	519.413	533.970	Dinas Pertanian dan Kehutanan
148	Jumlah populasi ternak ayam ras petelur (ekor)	1.682.687	1.833.407	2.071.177	2.026.917	1.963.570	Dinas Pertanian dan Kehutanan
149	Jumlah populasi ternak ayam ras pedaging (ekor)	1.824.195	1.984.692	1.856.875	5.158.914	1.908.300	Dinas Pertanian dan Kehutanan
150	Jumlah populasi ternak itik (ekor)	10.816	11.344	10.763	13.255	15.120	Dinas Pertanian dan Kehutanan
151	Jumlah populasi ternak puyuh (ekor)	0	33.317	21.873	27.677	19.530	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Kehutanan							
152	Hutan lindung/ cagar alam (ha)	TAD	TAD	TAD	2.255	3.951	Dinas Pertanian dan Kehutanan
153	Hutan peruntakan khusus (ha)	TAD	TAD	TAD	700	2.351	Dinas Pertanian dan Kehutanan
154	Hutan produksi (ha)	TAD	TAD	TAD	6.712	4.598	Dinas Pertanian dan Kehutanan
155	Hutan kota (ha)	TAD	TAD	TAD	532,10	1.432	Dinas Pertanian dan Kehutanan
156	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1,55	1,40	1,39	1,12	1,06	Bappeda
Energi dan Sumber Daya Mineral							
157	Pertambangan tanpa ijin	40	32	25	12	12	BSE
158	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1,83	1,69	1,59	1,73	1,77	Bappeda
Pariwisata							
159	Kunjungan wisata	438.921	428.961	543.434	445.709	367.282	Disbudparpora
160	Jumlah penginapan/ hotel	21	22	23	24	24	Disbudparpora
161	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,73	0,71	0,71	0,71	0,70	Bappeda
Kelautan dan Perikanan							
162	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	967,6	1114,7	940,9	1024,4	845,44	DKP
163	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	182,88	117,65	459,9	577,14	506,41	DKP
164	Jumlah kelompok nelayan	54	72	73	79	79	DKP
165	Jumlah kelompok budidaya	37	40	42	528	506	DKP

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN					SKPD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
166	Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan	45	53	56	57	57	DKP
<i>Perdagangan dan Industri</i>							
167	Jumlah usaha industri kecil (unit)	304	304	319	334	334	Disperindagkop
168	Jumlah tenaga kerja industri kecil (orang)	856	856	983	1.499	1.499	Disperindagkop
169	Jumlah produksi industri kecil (juta Rp)	18.610	18.610	19.520	23.529	23.529	Disperindagkop
170	Jumlah usaha industri menengah (unit)	18	19	20	22	22	Disperindagkop
171	Jumlah tenaga kerja industri menengah (orang)	343	352	363	399	399	Disperindagkop
172	Jumlah produksi industri menengah (juta Rp)	2.923	3.315	3.752	4.246	4.246	Disperindagkop
173	Jumlah usaha industri besar (unit)	0	1	1	1	1	Disperindagkop
174	Jumlah tenaga kerja industri besar (orang)	0	141	141	141	141	Disperindagkop
175	Jumlah produksi industri besar (juta Rp)	0	36.000	36.000	36.000	36.000	Disperindagkop
176	Jumlah usaha industri RT (unit)	184	189	195	201	201	Disperindagkop
177	Jumlah tenaga kerja industri RT (orang)	490	502	514	526	526	Disperindagkop
178	Jumlah produksi industri RT (Juta Rp)	0	0	0	0	0	Disperindagkop
179	Pasar tradisional milik Pemerintah	3	3	3	3	3	Disperindagkop
180	Jumlah kios (unit)	69	79	79	79	79	Disperindagkop
181	Jumlah los (unit)	230	290	290	290	290	Disperindagkop
182	Pasar tradisional milik non Pemerintah	21	21	21	21	21	Disperindagkop
183	Pasar swalayan/ supermarket/ Toserba	18	18	23	25	25	Disperindagkop
184	Jumlah koperasi aktif	51	55	58	62	62	Disperindagkop
185	Jumlah koperasi	140	144	147	152	152	Disperindagkop
186	Persentase koperasi aktif (%)	36,43	38,19	39,46	40,79	40,79	Disperindagkop
187	Jumlah UKM non BPR/ LKM UKM	3.643	3.643	3.701	3.721	3.721	Disperindagkop
188	Jumlah BPR/ LKM	6	8	8	8	8	Disperindagkop
189	Usaha mikro dan kecil	3.225	3.468	3.815	4.382	4.382	Disperindagkop
<i>Penanaman Modal</i>							
190	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	101	777	1.110	1047	1047	KPMPT
191	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA) (juta Rp)	156.100	435.082	2.154.205	3.481.619	3.481.619	KPMPT
192	Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar Rp)	71,88	178,72	395,13	61,62	61,62	KPMPT
<i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>							
193	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	21,9	49,28	60,17	60,24	56,46	BPMPKB
194	Partisipasi angkatan kerja perempuan	21,49	22,07	39,82	38,82	52,58	BPMPKB
<i>Ketenagakerjaan</i>							
195	Angka partisipasi angkatan kerja	79.563	84.896	84.864	89.176	85.421	Bappeda
196	Tingkat partisipasi angkatan kerja	65,57	66,61	67,17	69,45	66,53	Bappeda

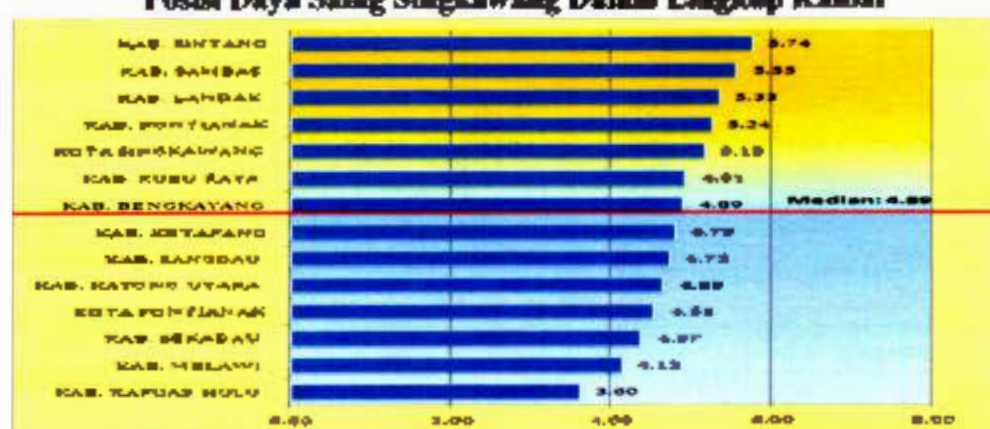
NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN					SKPD
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8
197	Tingkat pengangguran terbuka	6,36	5,36	3,59	2,23	4,58	Bappeda
Kepemudaan dan Olahraga							
198	Jumlah organisasi pemuda	36	36	36	37	37	Disbudparpora
199	Jumlah organisasi olahraga	24	27	28	28	28	Disbudparpora
200	Jumlah kegiatan kepemudaan	37	37	37	37	37	Disbudparpora
201	Lapangan olahraga	36	36	36	31	31	Disbudparpora

Sumber : Diolah oleh Bappeda 2014

2.1.4. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, pada tahun 2010 GIZ (*Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit*) bekerja sama dengan Pemprov Kalbar dan Pontianak Post melaksanakan Survei Iklim Usaha Daerah (*Business Climate Survey*) pada 14 kabupaten/ kota di Kalimantan Barat. Hasil survei dimaksud menempatkan posisi daya saing Kota Singkawang berada di atas median Kalbar, sebagaimana grafik di bawah ini.

Grafik 2.16
Posisi Daya Saing Singkawang Dalam Lingkup Kalbar



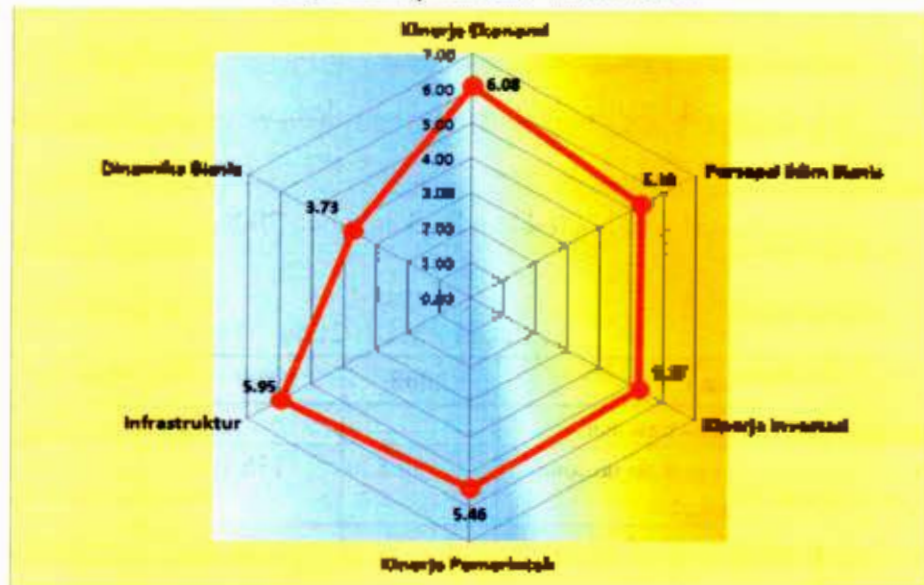
Sumber : GIZ-RED Programme Kalbar 2010

Indikator penilaian keseluruhan yang digunakan dalam survei Iklim Usaha Daerah 2010 ini merupakan faktor-faktor pengungkit daya saing daerah yang tercakup dalam enam sub-indeks, yaitu : Sub indeks kinerja ekonomi, sub-indeks iklim bisnis, sub-indeks kinerja investasi, sub-indeks kinerja pemerintah, sub-indeks kapasitas infrastruktur, dan sub-indeks dinamika bisnis.

Kota Singkawang memiliki daya saing di atas median Provinsi Kalimantan Barat dan masuk dalam urutan lima besar dari 14 Kabupaten/ kota dalam kategori daya

saing secara keseluruhan, ini dikarenakan sumbangan yang positif pada empat sub-indeks dari enam sub-indeks yang digunakan untuk menilai daya saing daya saing antara lain kinerja ekonomi (6,08), kapasitas infrastruktur (5,95), kinerja pemerintah (5,48), kinerja investasi (5,27), yang berada di atas median provinsi meskipun hanya satu dari kedua sub-indeks yang berkontribusi kurang signifikan, yakni dinamika bisnis (3,73) terhadap skor agregat Kota Singkawang.

Grafik 2.17
Daya Saing Daerah Tahun 2010



Sumber : GIZ-RED Programme Kulbar 2010

Kelemahan Kota Singkawang terutama pada sub indeks dinamika bisnis, digali berdasarkan data kualitatif berupa persepsi/ tanggapan dunia usaha. Kondisi ini khususnya dipengaruhi oleh rendahnya jumlah perusahaan yang inovatif, jumlah usaha yang berusia di bawah 10 tahun, rendahnya animo kebutuhan pendanaan tambahan, serta rendahnya rasio kebutuhan kredit saat ini dan yang mengajukan aplikasi berada di bawah median provinsi. Sementara hanya satu indikator yang berada di atas median provinsi yaitu persentase jumlah perusahaan yang memiliki omset di atas Rp 500 juta. Sedangkan sub indeks lainnya yang diukur berdasarkan data sekunder dan informasi valid, memperlihatkan gambaran penilaian yang positif.

Pendekatan lain yang digunakan untuk mengetahui aspek daya saing daerah dapat dibedakan menjadi empat fokus, yakni fokus pada kemampuan ekonomi daerah, fokus pada fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumberdaya manusia. Keempatnya memiliki pendekatan yang berbeda, yang pertama, ketiga dan keempat cenderung tidak riil dapat dilihat tetapi dapat dirasakan yakni kekuatan ekonomi yang meliputi kekuatan ekonomi penduduk dan pemerintahannya. Sedangkan yang kedua terukur/ riil yakni berupa keunggulan fasilitas wilayah/ infrastruktur.

1. Iklim Investasi

Nilai investasi merupakan salah satu instrumen yang menunjukkan baik tidaknya kinerja ekonomi suatu daerah, dengan pengertian makin besar nilai investasi maka berpeluang makin baik pula kinerja perekonomian suatu daerah. Jumlah investor di Kota Singkawang pada tahun 2012 dibandingkan pada tahun 2009 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sementara besaran nilai investasinya juga cenderung linear atau terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah investor sebanyak 1047 unit atau bertambah sebanyak 946 unit dibandingkan dengan tahun 2009, sedangkan nilai investasi tahun 2012 sebesar Rp 3.481.619.000.000 bertambah sebanyak Rp 3.325.519.000.000 dibandingkan tahun 2009. Data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.13
Realisasi PMDN 2008 – 2012

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah investor berskala nasional	-	101	777	1110	1047
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (juta Rp)	90.820	156.100	435.082	2.154.205	3.481.619
3	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rp)	-	71,88	178,72	395,13	61,62

Sumber : Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Singkawang

Indikator fokus iklim berinvestasi adalah jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah serta jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha. Dalam kurun 2008-2012 jumlah dan macam pajak/ retribusi daerah cenderung tetap, sedangkan jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim usaha cenderung meningkat. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2.14
Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah serta Perda yang Mendukung Iklim Usaha

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	21	21	21	21	21
2	Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha	2	3	6	9	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Singkawang

2. Sumber Daya Manusia

Indikator fokus sumberdaya manusia adalah jumlah pegawai negeri sipil (PNS), jumlah pegawai tidak tetap (PTT), rasio ketergantungan, dan pemberian bantuan tugas belajar/ ikatan dinas. Jumlah PNS cenderung naik dengan sangat landai. Rasio PNS per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang

dapat diberikan oleh seorang PNS dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Rasio antara jumlah PNS dengan jumlah penduduk akan mempengaruhi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan standar nasional, idealnya satu orang PNS melayani 50 penduduk. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kuantitas dan kualitas aparat yang bertanggungjawab melaksanakannya. Untuk mengetahui Rasio PNS terhadap Penduduk disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.15
Proporsi Sumberdaya Manusia Tahun 2008-2013

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah PNS	4.140	4.226	4.578	4.666	4.520	4.438
2	Jumlah Penduduk	178.939	182.694	186.462	190.801	194.410	196.742
3	Rasio Penduduk terhadap PNS	23,14	23,13	24,55	24,45	23,25	22,33
4	Perbandingan	43,22	43,23	40,73	40,89	43,01	44,78

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Singkawang

Berdasarkan tabel diatas, diketahui angka rasio pada Tahun 2008 adalah sebesar 23,14 atau dapat juga diartikan 1 orang PNS melayani 43,22 orang penduduk dan Tahun 2013 adalah sebesar 22,33 atau dapat juga diartikan 1 orang PNS melayani 44,78 orang penduduk. Pada tahun 2013 jumlah PNS di Kota Singkawang adalah sebanyak 4.438 orang, jika diasumsikan proporsi ideal 1 PNS melayani 50 penduduk, maka di Tahun 2013 idealnya jumlah PNS adalah sebanyak 3.975 orang.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah PNS di Kota Singkawang telah melebihi jumlah ideal, dengan kata lain inefisiensi. Pada kondisi yang demikian tidak diperlukan kebijakan untuk menambah PNS baru, namun diperlukan upaya pemerataan distribusi PNS secara proporsional, peningkatan mutu layanan publik, pemberdayaan serta peningkatan kompetensi dan kapasitas aparat yang ada.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan realisasi renstra SKPD oleh masing-masing SKPD dan/ atau dari Laporan pertanggung jawaban APBD.

Sebagai bagian dari langkah evaluasi secara berkala terhadap RPJMD 2013-2017, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam matriks sasaran pokok RPJMD 2013-2017.

Pengamatan terhadap realisasi pencapaian target RPJMD menunjukkan bahwa di antara beberapa indikator yang ditargetkan maka hasil evaluasi menunjukkan sebagian mencapai target, namun sebagian lainnya belum memenuhi target yang diharapkan.

Sesuai dengan terminologi pembangunan yang bermakna proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana maka sangat perlu dilakukan analisis terhadap kendala pencapaian target sasaran dan langkah kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi kendala serta mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya. Seyogianyalah segala program kegiatan yang dilaksanakan memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan pembangunan, yakni peningkatan standar hidup (*levels of living*) bagi setiap warga, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan; penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*) bagi setiap warga; dan peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*) bagi setiap warga.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu yang meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/ pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Secara umum semua program telah dilaksanakan semua SKPD dengan baik dan telah terealisasi dan kinerja yang diharapkan dari terlaksananya program tersebut telah tercapai. Capaian terhadap RPJMD tahun 2012 selain sebagai hasil kinerja pencapaian tahun terakhir RPJMD periode tahun 2008-2012 juga menjadi titik awal kinerja RPJMD Tahun 2013-2017 yang akan datang. Implikasinya adalah perlunya peningkatan kinerja dari akhir tahun RPJMD Tahun 2008-2012 dan melanjutkan kinerja yang telah tercapai sebelumnya.

Beberapa kendala yang menyebabkan belum tercapainya beberapa sasaran pokok diantaranya adalah keterpaduan program atau sinergitas program antar-SKPD dan keterbatasan dukungan penganggaran yang selama ini masih bertumpu pada alokasi dana perimbangan bersumber dari Pemerintah. Dalam upaya membangun kemandirian keuangan daerah sebagai konsekuensi otonomi daerah, secara bertahap tentu saja kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) akan terus ditingkatkan sesuai potensinya. Koeksistensi antara dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan tingkat kota, Rencana Strategis SKPD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan tingkat SKPD dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun, dengan daya dukung anggaran yang terbatas sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan. Terkait dengan lemahnya pengukuran (*assesment*) dari program kerja yang dilaksanakan masing-masing SKPD, maka ke depan pengukuran kinerja tersebut harus didasari dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), baik dalam lingkup Pemerintah Kota Singkawang maupun lingkup SKPD.

Beberapa kelemahan yang telah diungkapkan tersebut tentu saja perlu diperbaiki

melalui sejumlah pendekatan, diantaranya peningkatan kapasitas pemerintah daerah sekaligus pemberdayaan masyarakat di seluruh lapisan. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah akan menciptakan sebuah kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumberdaya ekonomi daerah. Sedangkan pemberdayaan masyarakat akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram serta meningkatkan harkat, martabat dan harga diri.

Namun demikian, tantangan menuju tercapainya sasaran pembangunan daerah tersebut masih terkendala oleh beberapa hal, sehingga perlu disiapkan sejumlah langkah yang komprehensif dan berkelanjutan, diantaranya berupa peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, koordinasi yang semakin baik antar-stakeholders, pemanfaatan sumberdaya secara berkualitas, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas, serta pemeliharaan stabilitas dunia usaha yang kondusif.

Sehagian langkah yang sangat perlu dan mendesak dicapai dalam jangka pendek adalah mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antardistrict, antar-subdistrict, antarwarga masyarakat (pemerataan dan keadilan), memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan atau menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). Dalam konteks perencanaan pembangunan nasional sasaran ini sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu dikenal dengan sebutan *triple track plus*.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/ provinsi yang bersifat mandatory.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai lima tahun mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi. Adapun permasalahan pembangunan Kota Singkawang adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya infrastruktur dasar antara lain prasarana dan sarana perhubungan, listrik, air bersih, dan komunikasi;

- b. Belum tertatanya sistem drainase yang terintegrasi sesuai dengan kondisi topografi;
- c. Belum optimalnya pelayanan pemerintahan yang disebabkan oleh belum tertatanya kelembagaan secara memadai, terbatasnya prasarana dan sarana pemerintahan, serta terbatasnya jumlah dan mutu sumberdaya aparatur;
- d. Penyediaan penyertaan modal pada lembaga keuangan swasta untuk menggiatkan setiap lini masyarakat agar mampu dan mandiri dalam mengembangkan usahanya terutama masyarakat petani, nelayan dan UKM.
- e. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi dalam pengembangan ekonomi daerah;
- f. Masih terbatasnya produksi dan produktivitas pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam terutama pertanian dan perikanan;
- g. Belum optimalnya investasi swasta;
- h. Belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan kualitas pendidikan terutama di daerah pinggiran;
- i. Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas sebagai akibat terbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan terutama di daerah pinggiran.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Hal mendasar perencanaan tahunan adalah kemampuannya dalam memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara lebih akurat dari apa yang sudah diprediksikan dalam RPJMD tahun berkenaan; sehingga dapat diketahui belanja langsung yang dapat dialokasikan bagi program/ kegiatan prioritas. Untuk itu, dibutuhkan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah tahun rencana berdasarkan gambarnya di masa lalu. Rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah bermakna sebagai hasil dari strategi pembangunan yang telah berjalan sekaligus menjadi dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun rencana.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 menetapkan bahwa tema pembangunan nasional adalah *"Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan"*. Tema ini mengindikasikan adanya upaya secara nasional untuk memperluas basis pertumbuhan baik secara sektoral maupun wilayah dan memperkuat perekonomian nasional demi tercapainya percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Unsur-unsur yang terkandung dalam RKP Tahun 2015 terdiri dari dua strategi yakni: (1) Melanjutkan agenda reformasi nasional, termasuk didalamnya pemeliharaan stabilitas sosial dan politik; dan (2) Percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Implikasinya daerah provinsi/ kabupaten/ kota harus memasukkan kriteria tersebut sebagai dasar plafon anggaran untuk program prioritas.

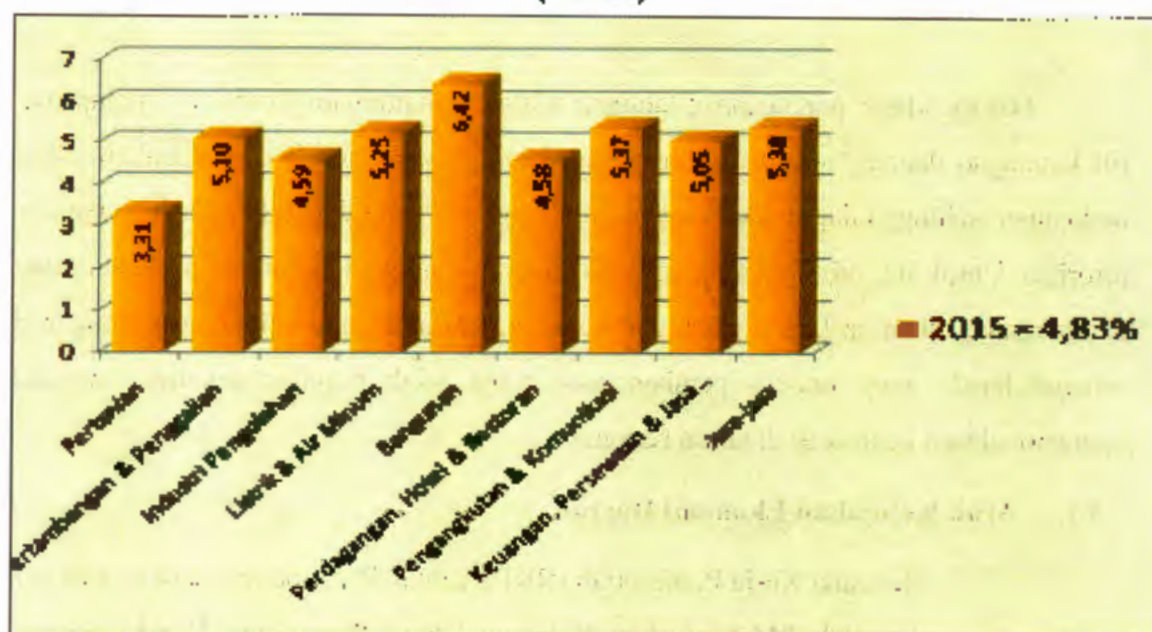
Di Kota Singkawang, arah kebijakan ekonomi daerah tercermin pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2013-2017.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Daerah Tahun 2015

Kondisi perekonomian Kota Singkawang pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya kestabilan ekonomi global, nasional, dan Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing adalah sebesar 6,36 persen dan 10,20 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Singkawang diperkirakan sebesar 4,83 persen dengan tingkat pertumbuhan dominan adalah pada sektor bangunan sebesar 6,42 persen, sektor jasa-jasa sebesar 5,38 persen dan sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,37 persen. Implikasi dari penguatan kondisi ekonomi pada sektor sekunder-tersier tersebut berdampak pada perlambatan aktifitas ekonomi pada sektor primer yang dapat dilihat pada rendahnya tingkat pertumbuhan pada sektor

pertanian sebesar 3,31 persen di tahun yang sama.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Singkawang Tahun 2015
(Persen)



Sumber/ Source : Bappeda / data diolah

Laju inflasi pada tahun 2013 dan tahun 2014 adalah sebesar 6,15 persen dan 7,91 persen, sedangkan untuk tahun 2015 angka inflasi diperkirakan sebesar 8,62 persen. Karakter inflasi masih didominasi oleh *volatile food's inflation* (inflasi bahan makanan). Kenaikan inflasi ini tentunya sangat riskan bagi kelompok rentan. Inflasinya perlu dipersiapkan kebijakan dalam mengurangi resiko masyarakat tidak mampu membeli makanan, rentan kesehatan, rentan putus sekolah karena tidak mampu memenuhi biaya sekolah.

Realisasi gabungan nilai investasi di Kota Singkawang secara umum menunjukkan peningkatan. Gabungan nilai investasi pada tahun 2014 tumbuh sebesar 17,13 persen, meningkat dari tahun 2013 sebesar 3,52 triliun rupiah menjadi 4,12 triliun rupiah di tahun 2014 dan diprediksikan pada tahun 2015 sebesar 4,44 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 7,76 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai investasi tersebut masih didominasi oleh investasi usaha menengah dan kecil, namun perkembangan investasi usaha besar diperkirakan akan meningkat pada tahun-tahun yang akan datang.

Tabel 3.1
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun 2012-2016

No	Indikator Makro	Revisi		Bertambah / Berkurang	Revisi		
		2012	2013		2014	2015	2016
1	PDRB Harga Basaku	3.126.651,50	3.524.877,66	398.226,16	4.128.622,18	4.449.191,89	4.769.761,59
2	PDRB Harga Konstan	1.390.546,87	1.479.043,97	88.497,10	1.629.963,94	1.708.718,11	1.787.472,27
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Basaku Tahun Tertentu (persen)	10,28	12,74	2,46	17,13	7,76	7,21
4	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Harga Konstan Tahun Tertentu (persen)	6,18	6,36	0,18	10,20	4,83	4,61
5	Tingkat Inflasi (persen)	4,21	6,15	1,94	7,91	8,62	9,33
6	Tingkat Kemiskinan (persen)	5,32	6,50	1,18	5,75	5,69	5,63
7	Tingkat Pengangguran	2,23	4,58	2,36	3,49	3,32	3,29
8	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :						
	- Pendapatan Perkapita	16.042.255	17.735.947	1.693.692,62	17.777.229	18.780.265	19.745.487
	- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	69,21	70,66	1,45	70,48	70,98	71,23

Sumber: Source : Bappeda Kota Singkawang

Pada Tahun 2015 diproyeksikan kontribusi sektor terhadap struktur PDRB masih akan didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata perkembangan dalam 5 (lima) tahun sampai dengan tahun rencana 2017 kontribusinya diproyeksikan sebesar 41 persen. Sedangkan sektor primer kontribusinya terus menunjukkan trend yang semakin menurun dengan sumbangan sektor sebesar 11,87 persen. Data ini menunjukkan bergesernya peran sektor sekunder ke sektor tersier dengan perdagangan, hotel dan restoran sebagai sektor unggulan dan semakin menurunnya kontribusi sektor primer, yang mengindikasikan semakin menurunnya daya dukung sektor pertanian.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

Berdasarkan perkembangan perekonomian Kota Singkawang hingga tahun 2013, proyeksi tahun 2015 dan beberapa fenomena ekonomi global termasuk terjadinya krisis keuangan di beberapa negara pada tahun berjalan, diperoleh sebuah gambaran dinamika pengaruhnya terhadap ekonomi lokal. Telaahan terhadap kondisi eksisting menemukan beberapa poin penting perkiraan berkaitan dengan tantangan dan prospek perekonomian pada tahun 2015 mendatang. Selengkapnya dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Tantangan

Pada tahun 2015 mendatang, diperkirakan perekonomian Kota Singkawang masih akan menghadapi sejumlah tantangan:

1. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang prima.
2. Atas dasar alasan keamanan, investor cenderung menaruh minat berinvestasi ke kabupaten/ kota yang selama ini telah menjadi daerah tujuan investor, seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sintang. Berdasarkan data Bank Indonesia, daerah tersebut berturut-turut memiliki nilai pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan Kota Singkawang. Ketersediaan sumberdaya alam yang cukup, seperti perkebunan dan pertambangan, membuat mereka lebih siap menangkap peluang investasi.
3. Banyaknya komoditi pertanian maupun produk industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sejenis yang dihasilkan daerah lain menyebabkan persaingan yang ketat.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, kesehatan lingkungan dan gaya hidup sehat.
5. Era pasar bebas menyebabkan persaingan ketat yang berpotensi mengancam produk-produk lokal yang pada umumnya masih memiliki

daya saing rendah.

B. Prospek Perekonomian Tahun 2015

Kondisi ekonomi global selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Singkawang. Berdasarkan pada kondisi perekonomian tahun 2012-2014 dan perkiraan tahun 2015 serta tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Prospek Perekonomian Tahun 2015

No	Indikator	Nilai
1.	Pertumbuhan Ekonomi	4,83%
2.	Inflasi	8,62%
3.	PDRB atas Harga Konstan	1.708.718,11
4.	PDRB Perkapita atas Harga Berlaku	4.449.191,89

Perekonomian Kota Singkawang pada tahun 2015 diperkirakan berkorelasi pada perbaikan iklim investasi yang berkualitas. Meningkatnya indikator ekonomi makro dimaknai dengan terjadinya peningkatan kontribusi sektor unggulan perdagangan, jasa dan sektor pertanian terhadap perekonomian. Hal ini juga menggambarkan secara signifikan, kenaikan kuantitas dan kualitas SDM dan pendapatan per kapita tenaga kerja yang bekerja pada tiga sektor tersebut.

Kaitan dengan hal tersebut maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah:

1. Memaksimalkan upaya pembangunan dan penataan wilayah hinterland Kota Singkawang yang masih memerlukan banyak fasilitas perkotaan menuju Sistem Pelayanan Perkotaan (SPP) yang makin mantap.
2. Memaksimalkan upaya pembangunan terkait dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif, penguatan regulasi hukum, serta mengembangkan sentra ekonomi yang dapat menjadi pemacu tumbuh dan berkembangnya industri produktif yang semakin pesat.
3. Mengoptimalkan fasilitas hasil kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja dan proses pelayanan publik.
4. Memanfaatkan peluang dukungan pemerintah yang cukup besar terhadap isu-isu kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan.
5. Memanfaatkan peluang terhadap permintaan lokal, regional, nasional

maupun internasional atas produk-produk agribisnis menuju tercapainya produsen unggul.

6. Mengoptimalkan upaya memperoleh alokasi dana pemerintah yang masih tersedia dalam pembiayaan pembangunan, baik Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP) maupun jenis bantuan dana pemerintah lainnya.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum arah kebijakan keuangan daerah baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada prinsipnya mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan program prioritasnya. Arah kebijakan keuangan daerah difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2015, yaitu: (1) Penyelenggaraan birokrasi dan tata kelola pemerintahan (governance) untuk menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan; (2) Memantapkan pertumbuhan ekonomi kreatif dengan memperkuat jaringan usaha ekonomi rakyat di bidang industri, perdagangan, dan pariwisata; (3) Perluasan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi; (4) Pemeliharaan dan perluasan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan.

Tabel 3.3
Evaluasi/ Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2014

No	Uraian	Tahun 2014	Proyeksi Tahun 2015
1	PENDAPATAN	710.011.478.597,00	748.879.921.265,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	62.784.670.224,00	87.230.680.900,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.320.000.000,00	24.320.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.133.216.400,00	6.195.016.282,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.331.453.824,00	55.115.664.618,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	530.829.983.550,00	557.956.493.375,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.404.442.550,00	18.998.868.375,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	467.557.081.000,00	478.943.765.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	47.868.460.000,00	60.013.860.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	116.396.824.823,00	103.692.746.990,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.091.840.823,00	30.799.805.990,00

No	Uraian	Tahun 2014	Proyeksi Tahun 2015
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	69.890.184.000,00	72.892.941.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.414.800.000,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	54.176.696.321,00	33.919.923.027,00
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	74.801.696.321,00	45.794.923.027,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.557.962.465,00	14.031.923.027,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	57.243.733.856,00	31.763.000.000,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00
Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (1) + (3)		764.188.174.918,00	782.799.844.292,00

Tabel 3.4
Proyeksi / Target Penerimaan Daerah Kota Singkawang Tahun 2015

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2015	Proyeksi RKPD Tahun 2015	Tambah/ (Kurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	717.111.593.382,97	748.879.921.265,00	-31.768.327.882,03
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.412.516.926,24	87.230.680.900,00	-23.818.163.973,76
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	24.563.200.000,00	24.320.000.000,00	243.200.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.244.548.564,00	6.195.016.282,00	5.049.532.282,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.020.000.000,00	1.600.000.000,00	420.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	25.584.768.362,24	55.115.664.618,00	-29.530.896.255,76
1.2	DANA PERIMBANGAN	536.138.283.385,50	557.956.493.375,00	-21.818.209.989,50
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	15.558.486.975,50	18.998.868.375,00	-3.440.381.399,50
1.2.2	Dana Alokasi Umum	472.232.651.810,00	478.943.765.000,00	-6.711.113.190,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.347.144.600,00	60.013.860.000,00	-11.666.715.400,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	117.560.793.071,23	103.692.746.990,00	13.868.046.081,23
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.362.759.231,23	30.799.805.990,00	-3.437.046.758,77
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	70.589.085.840,00	72.892.941.000,00	-2.303.855.160,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.608.948.000,00	0,00	19.608.948.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	54.718.463.284,21	33.919.923.027,00	20.798.540.257,21
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.549.713.284,21	45.794.923.027,00	29.754.790.257,21
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.733.342.089,65	14.031.923.027,00	3.701.619.062,65
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	57.816.171.194,56	31.763.000.000,00	26.053.171.194,56
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kapasitas Keuangan Daerah (1) + (3)		771.830.856.667,18	782.799.844.292,00	-10.969.787.624,82

Tabel 3.5
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Singkawang

No	Uraian	Periode					Rata-rata Pertumbuhan
		Per 31 Desember 2008	Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2010	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2012	
1	A S E T						
1.1	ASET LANCAR	41,167,035,940.20	7,040,989,063.58	20,223,951,052.57	24,307,652,522.63	52,555,178,476.22	60.11
	Kas di Kas Daerah	36,629,363,221.80	3,107,694,206.58	13,298,328,224.57	19,381,039,377.83	42,851,704,614.79	100.81
	Kas di Bendahara Pengeluaran	128,561,476.00	329,544,265.00	145,812,858.00	350,055,356.00	7,422,904.00	35.69
	Kas di Bendahara Penerimaan	129,956,736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	(100.00)
	Piutang Pajak	365,682,707.00	320,839,411.00	71,629,048.00	86,909,216.00	40,360,376.00	(30.54)
	Piutang Retribusi	0.00	0.00	348,389,341.00	872,822,055.00	3,759,206,103.43	240.61
	Piutang Lainnya	0.00	0.00	3,087,042,512.00	0.00	0.00	(100.00)
	Persediaan	3,913,471,359.00	3,282,911,181.00	3,274,649,099.00	3,696,826,517.80	5,896,484,478.00	14.01
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	8,428,017,185.08	8,834,669,185.00	9,584,379,105.00	10,266,016,857.57	12,457,701,589.89	10.44
	Investasi Non Pemmanen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi dalam Modal Beragulir	3,033,472,185.00	2,740,124,185.00	2,739,834,185.00	2,621,471,857.57	2,896,871,589.89	(0.87)
	Investasi Non Pemmanen Lainnya	3,039,545,000.00	3,039,545,000.00	3,039,545,000.00	3,039,545,000.00	2,955,830,000.00	(0.69)
	Investasi Pemmanen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2,355,000,000.00	3,055,000,000.00	3,805,000,000.00	4,605,000,000.00	6,605,000,000.00	29.68
1.3	ASET TETAP	772,427,141,702.40	944,664,036,407.40	1,093,519,704,285.00	1,225,365,311,978.87	1,343,400,902,318.02	14.94
	Tanah	164,023,541,700.00	165,658,645,700.00	194,605,091,675.00	194,826,479,592.50	41,663,261,722.22	(15.01)
	Peralatan dan Mesin	87,010,991,022.00	111,261,189,972.00	132,529,118,990.00	154,043,099,676.00	185,437,977,710.00	20.90
	Gedung dan Bangunan	237,597,569,712.40	289,975,784,693.40	311,310,468,818.00	353,747,484,173.35	395,240,077,708.35	14.35
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	279,399,481,508.00	355,094,442,338.00	429,628,270,898.00	508,440,939,211.02	704,775,308,551.45	26.26

No	Uraian	Periode					Ratio-ratio Pertumbuhan
		Per 31 Desember 2008	Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2010	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2012	
	Aset Tetap Lainnya	1.741.442.104,00	2.082.723.704,00	4.482.783.904,00	9.559.648.826,00	13.147.296.626,00	71,40
	Konstruksi dalam Pengerjaan	7.654.115.656,00	20.641.250.000,00	20.963.970.000,00	4.747.660.500,00	3.136.980.000,00	14,99
1.4	ASET LAINNYA	1.435.004.935,00	0,00	0,00	199.727.200,00	173.827.200,00	(13,97)
	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	37.600.000,00	11.700.000,00	(34,44)
	Aset lain-lain	1.435.004.935,00	0,00	0,00	162.127.200,00	162.127.200,00	(50,00)
	JUMLAH ASET	823.457.199.322,60	960.539.694.655,96	1.123.329.934.552,57	1.260.218.708.559,07	1.408.587.609.564,13	14,39
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	8.500.000.000,00	30.004.074.159,00	1.067.932.866,91	5.996.415.235,22	206,02
	Utang Pada PT Bank Kalbar	0,00	8.500.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00	76,47
	Utang Pada Pihak Ketiga	0,00	0,00	4.074.159,00	0,00	0,00	(100,00)
	Utang Pada Kementerian Keuangan (PDAM)	0,00	0,00	0,00	1.067.932.866,91	5.996.415.235,22	461,50
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	10.161.863.345,97	447.547.378,34	(95,60)
	Utang pada PT Bank Kalbar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang pada Kementerian Keuangan (PDAM)	0,00	0,00	0,00	10.161.863.345,97	447.547.378,34	(95,60)
3	EKUITAS DANA						
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	41.167.035.500,20	(1.059.010.936,42)	(9.778.223.076,43)	23.319.719.653,72	46.558.763.221,00	56,95
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLIPA)	36.757.924.697,80	3.437.238.471,58	13.440.066.923,57	19.731.094.733,83	42.859.127.518,79	91,10
	Pendapatan yang Ditangguhkan	129.956.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
	Cadangan Piutang	365.682.707,00	320.839.411,00	3.507.060.901,00	959.731.271,00	3.799.566.479,43	301,02
	Cadangan Persediaan	3.913.471.359,00	3.282.911.181,00	3.274.649.099,00	3.696.826.517,80	5.896.484.478,00	14,01

No	Uraian	Periode					Rata-rata Pertumbuhan
		Per 31 Desember 2006	Per 31 Desember 2009	Per 31 Desember 2010	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2012	
	Dana yang harus disediakan untuk bayar Utang Jangka Pendek	0,00	(8,500,000,000.00)	(30,000,000,000.00)	(1,067,932,866.91)	(5,996,415,255.22)	206.00
3.2	EKUITAS DANA INVESTASI	782,290,163,822.40	953,498,785,592.40	1,103,104,083,470.00	1,225,669,192,690.47	1,355,584,883,729.57	14.82
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	8,428,017,185.00	8,834,669,185.00	9,584,379,185.00	10,266,016,857.57	12,457,701,589.89	10.44
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	772,427,141,702.40	944,664,036,407.40	1,093,519,704,285.00	1,225,365,311,978.87	1,343,400,902,318.02	14.94
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	1,435,004,935.00	0,00	0,00	199,727,200.00	173,827,200.00	(12.97)
	Dana yang harus disediakan untuk bayar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	(10,161,863,345.97)	(447,547,378.34)	(95.60)
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	813,457,199,322.60	960,509,694,655.98	1,123,329,934,552.57	1,260,218,708,559.07	1,408,587,609,584.13	14.39

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur dan penganggarannya harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD Kota Singkawang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara khusus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Diantaranya merencanakan pendapatan daerah pada RKPD ini adalah diambil kebijakan sebagai berikut :

- a. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- b. Dana Perimbangan yaitu DAU dan DAK sementara mempertimbangkan angka tahun 2014;
- c. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja

daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung dibagi menjadi : (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Bunga, (c) Belanja Subsidi (d) Belanja Hibah (e) Belanja Bantuan Sosial, (f) Belanja Bagi Hasil, (g) Belanja Bantuan Keuangan, dan (h) Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung dibagi menjadi : (a) Belanja Pegawai, (b) Belanja Barang dan Jasa dan (c) Belanja Modal.

Belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan untuk Tahun 2015 belanja langsung digunakan untuk belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2015 berpedoman pada RPJMD 2013-2017 dengan tetap melaksanakan program kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Keempat belas prioritas pembangunan nasional pada Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan ketujuh prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dituangkan RKPD Provinsi Kalimantan Barat 2015 diekuivalensi dalam RKPD Kota Singkawang 2015 ini.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun 2011-2015

Uraian	Realisasi Peng Indikatif					Proyeksi Tahun 2015
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5		6
BELANJA DAERAH						
Belanja Tidak Langsung	257.072.698.669,69	287.241.032.449,00	369.803.212.882,00	397.346.436.223,00		388.188.001.885,00
Belanja Pegawai	238.172.655.451,00	265.708.611.225,00	349.515.057.610,00	381.136.953.871,00		373.368.114.619,00
Belanja Bunga	2.400.120.753,85	2.606.619.730,00	641.180.620,00	650.000.000,00		0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Belanja Hibah	6.569.195.560,00	10.253.952.523,00	15.725.703.500,00	11.687.000.000,00		11.304.720.000,00
Belanja Bantuan Sosial	6.554.082.768,00	6.358.100.000,00	1.429.500.000,00	1.763.511.200,00		1.195.280.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	1.931.159.652,00	2.266.607.971,00	991.771.152,00	658.971.152,00		869.887.266,00
Belanja Tidak Terduga	1.445.484.484,84	47.141.000,00	1.500.000.000,00	1.450.000.000,00		1.450.000.000,00
Belanja Langsung	212.103.337.659,00	228.360.456.656,00	345.265.161.432,00	366.841.738.695,00		394.611.842.407,00
Belanja Pegawai	26.930.063.461,00	29.108.710.990,00	31.496.136.507,00	30.731.599.268,00		43.156.554.420,00
Belanja Barang dan Jasa	68.388.668.649,00	83.042.663.639,00	105.150.836.250,00	124.953.108.257,00		135.110.418.242,00
Belanja Modal	116.784.605.549,00	116.209.082.027,00	208.618.188.675,00	211.157.031.170,00		216.344.869.745,00
TOTAL JUMLAH BELANJA	469.176.036.328,69	515.601.489.105,00	715.068.374.314,00	764.188.174.918,00		782.799.844.292,00

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah Kota Singkawang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Upaya untuk menutup defisit anggaran diutamakan berasal dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah yang tidak akan menjadi beban bagi daerah di masa mendatang, misalnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.
2. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah serta sedapat mungkin menghindari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Pinjaman Daerah.
3. Sumber pengeluaran pembiayaan daerah diperuntukkan sebagai penyertaan modal (investasi) pada PDAM serta sedapat mungkin hanya dialokasikan untuk menutup keperluan yang menjadi kewajiban daerah dan tidak dapat ditunda pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), penerimaan pinjaman, dan penerimaan piutang. Pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok hutang.

Sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2010-2014 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2011-2015

Uraian	Realisasi Pengu Indikatif					Proyeksi Tahun 2015
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5		6
PEMBIAYAAN DAERAH						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.930.563.960,06	21.436.954.084,31	84.738.062.866,79	74.801.696.321,00	45.794.923.027,00	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	13.440.066.923,57	19.731.094.733,83	42.851.704.614,79	17.557.962.465,00	14.031.923.027,00	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	36.000.000.000,00	57.243.733.856,00	31.763.000.000,00	
Penerimaan Piutang Daerah	490.497.036,49	1.705.859.350,48	5.886.358.252,00	0,00	0,00	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	13.930.563.960,06	21.436.954.084,31	84.738.062.866,79	74.801.696.321,00	45.794.923.027,00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	31.751.081.450,43	5.074.308.606,00	9.879.730.694,00	20.625.000.000,00	11.875.000.000,00	
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PEMBIAYAAN NETTO	-17.820.517.490,37	16.362.645.478,31	74.858.332.172,79	54.176.696.321,00	33.919.923.027,00	

Tabel realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah tersebut diatas, dirangkum dalam tabel realisasi dan proyeksi (pagu indikatif) kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2011-2015 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi dan Proyeksi Target Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2011-2015

Uraian	Realisasi Pada Indikator					Proyeksi Tahun 2015
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	
PENDAPATAN DAERAH	496.654.771.679,89	533.343.671.145,48	640.210.042.141,21	710.011.478.597,00	748.879.921.265,00	
Pendapatan Asli Daerah	35.346.798.485,44	37.321.499.060,04	51.106.840.240,21	62.784.670.224,00	87.230.680.900,00	
Pajak Daerah	10.151.938.826,00	15.174.662.841,00	17.850.000.000,00	24.320.000.000,00	24.320.000.000,00	
Retribusi Daerah	20.401.923.280,68	17.119.256.478,37	25.758.978.592,00	11.133.216.400,00	6.195.016.282,00	
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	1.070.825.770,23	1.312.224.556,18	1.612.224.556,00	2.000.000.000,00	1.600.000.000,00	
Lain-lain Pendapatan Asli yang sah	3.722.110.608,53	3.715.355.184,49	5.885.637.092,21	25.331.453.824,00	55.115.664.618,00	
Dana Perimbangan	368.558.783.740,00	436.385.253.668,00	519.457.222.717,00	530.829.983.550,00	557.956.493.375,00	
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23.201.221.740,00	28.663.080.668,00	26.133.784.717,00	15.404.442.550,00	18.998.868.375,00	
Dana Alokasi Umum	309.175.562.000,00	373.908.313.000,00	431.527.888.000,00	467.557.081.000,00	478.943.765.000,00	
Dana Alokasi Khusus	36.182.000.000,00	33.813.860.000,00	61.795.550.000,00	47.868.460.000,00	60.013.860.000,00	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang SAH	92.749.189.454,45	59.636.918.417,44	69.645.979.184,00	116.396.824.823,00	103.692.746.990,00	
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.531.075.614,45	25.580.932.417,44	25.780.193.184,00	27.091.840.823,00	30.799.805.990,00	
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	77.218.113.840,00	34.055.986.000,00	34.055.986.000,00	69.890.184.000,00	72.892.941.000,00	
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau	0,00	0,00	9.809.800.000,00	19.414.800.000,00	0,00	

Uraian	Realisasi Pengeluaran					Proyeksi Tahun 2015
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	
Pemerintah Daerah Lainnya						
BELANJA DAERAH	469.176.036.328,69	515.601.489.105,00	715.068.374.314,00	764.188.174.918,00	781.799.844.292,00	
Belanja Tidak Langsung	257.072.698.669,69	287.241.032.449,00	369.803.212.882,00	397.346.436.223,00	388.188.001.885,00	
Belanja Pegawai	238.172.655.451,00	265.708.611.225,00	349.515.057.610,00	381.136.953.871,00	373.368.114.619,00	
Belanja Bunga	2.400.120.753,85	2.606.619.730,00	641.180.620,00	650.000.000,00	0,00	
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Belanja Hibah	6.569.195.560,00	10.253.952.523,00	15.725.703.500,00	11.687.000.000,00	11.304.720.000,00	
Belanja Bantuan Sosial	6.554.082.768,00	6.358.100.000,00	1.429.500.000,00	1.763.511.200,00	1.195.280.000,00	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kota dan Pemerintahan Desa	1.931.159.652,00	2.266.607.971,00	991.771.152,00	658.971.152,00	869.887.266,00	
Belanja Tidak Terduga	1.445.484.484,84	47.141.000,00	1.500.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	
Belanja Langsung	212.103.337.659,00	228.360.456.656,00	345.265.161.432,00	366.841.738.695,00	394.611.842.407,00	
Belanja Pegawai	26.930.063.461,00	29.108.710.990,00	31.496.136.507,00	30.731.599.268,00	43.156.554.420,00	
Belanja Barang dan Jasa	68.388.668.649,00	83.042.663.639,00	105.150.836.250,00	124.953.108.257,00	135.110.418.242,00	
Belanja Modal	116.784.605.549,00	116.209.082.027,00	208.680.188.675,00	211.157.031.170,00	216.344.869.745,00	
Surplus/Defisit	27.478.735.351,30	17.742.182.040,48	-74.858.332.172,79	-54.176.696.321,00	-33.919.923.027,00	
PEMBIAYAAN DAERAH						
Penerimaan Pembiayaan	13.930.563.960,06	21.436.954.084,31	84.738.062.866,79	74.801.696.321,00	45.794.923.027,00	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	13.440.066.923,57	19.731.094.733,83	42.851.704.614,79	17.557.962.465,00	14.031.923.027,00	

Uraian	Realisasi Page Indikator					Proyeksi Tahun 2015
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014		
1	2	3	4	5	6	
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	36.000.000.000,00	57.243.733.856,00	31.763.000.000,00	
Penerimaan Piutang Daerah	490.497.036,49	1.705.859.350,48	5.886.358.252,00	0,00	0,00	
Pengeluaran Pembiayaan	31.751.081.450,43	5.074.308.606,00	9.879.730.694,00	20.625.000.000,00	11.875.000.000,00	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pembayaran Pokok Utang	800.000.000,00	2.000.000.000,00	4.500.000.000,00	10.625.000.000,00	11.875.000.000,00	
Pembiayaan Netto	-17.820.517.490,37	16.362.645.478,31	74.858.332.172,79	54.176.696.321,00	33.919.923.027,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	19.731.094.733,83	42.851.704.614,79	17.557.962.465,00	14.031.923.027,00	0,00	

BAB IV

TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tema Pembangunan Daerah

RKPD Kota Singkawang Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2013-2017.

Tema Pembangunan Daerah Tahun 2015 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pembangunan Daerah Tahun 2015 merupakan bagian dari tahapan Lima Tahun III (2013-2018) dan tahapan Lima Tahun III (2015 - 2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025. Penekanan pada tahapan Lima Tahun II (2010-2014) adalah pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung utama keunggulan daerah yang memiliki daya dukung berantai positif (*backward effect & forward effect*) untuk mendorong kemajuan daerah dan melanjutkan pembangunan kompetensi SDM yang berdaya saing unggul secara lebih luas serta menggerakkan potensi ekonomi dan industri unggulan. Sedangkan penekanan tahapan Lima Tahun III (2015 - 2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017. Pembangunan Daerah Tahun 2015 adalah bagian dari RPJMD Tahun 2013-2017 untuk mewujudkan visi Daerah Kota Singkawang yang lebih Maju, Aman dan Sejahtera.
3. Dinamika dan realita kondisi umum daerah, yang didalamnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014
 - b. Capaian-capaian pada tahun-tahun sebelumnya
 - c. Isu Strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani:
 - 1) Optimalisasi pelayanan air bersih untuk memenuhi target MDG's;
 - 2) Kesenjangan mutu pendidikan antara kawasan pusat kota dan pinggiran;
 - 3) Pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan yang belum merata;
 - 4) Pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan ;
 - 5) Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan sesuai prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan;

- 6) Penanggulangan bencana banjir dan genangan, kebakaran lahan, abrasi kawasan pantai/ pesisir dan mitigasi bencana;
 - 7) Kesenjangan pendapatan antar wilayah kecamatan (pusat kota – pinggiran) dan antar sektor pertanian – non-pertanian;
 - 8) Aset daerah dan batas wilayah;
 - 9) Pengembangan UMKM terutama sektor perdagangan dan industri;
 - 10) Kemampuan sumber daya aparatur dan kualitas birokrasi;
 - 11) Pelestarian dan pengembangan budaya lokal;
 - 12) Masih rendahnya derajat kualitas hidup masyarakat;
 - 13) Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah:
 - 1) Peningkatan daya saing pariwisata.
 - 2) Peningkatan infrastruktur perkotaan dan tataruang.
4. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2015 sebagai satu kesatuan rencana pembangunan nasional, dengan tema yaitu ***“Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”***, dengan sasaran yang harus dicapai pada Tahun 2015, adalah:
- 1) Pertumbuhan ekonomi ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen;
 - 2) Inflasi ditargetkan pada kisaran 3,0 persen sampai dengan 5,0 persen;
 - 3) Jumlah penduduk miskin berkisar antara 9,0 persen sampai dengan 10,0 persen;
 - 4) Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5 persen sampai dengan 5,7 persen.
5. Berdasarkan tema dan sasaran tersebut di atas, dalam RKP Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 terdapat 9 (sembilan) bidang pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, dengan isu-isu strategis pada masing-masing bidang sebagai berikut:
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
 - a. Pengendalian Jumlah Penduduk;
 - b. Reformasi Pembangunan Kesehatan:
 - 1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (demand and supply);
 - 2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
 - c. Reformasi Pembangunan Pendidikan;
 - d. Sinergi Percepatan.
 2. Bidang Ekonomi
 - a. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas;

- b. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja;
 - c. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi;
 - d. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi;
 - e. Reformasi Keuangan Negara.
- 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - a. Peningkatan Kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Peningkatan Ketahanan Air;
 - b. Penguatan Konektivitas Nasional:
 - 1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah;
 - 2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi;
 - 3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan.
 - c. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional;
 - 2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi;
 - 3) Penataan Perumahan/ Permukiman.
- 5. Bidang Politik
 - a. Konsolidasi Demokrasi.
- 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
 - a. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatasus POLRI dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan;
 - b. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri.
- 7. Bidang Hukum dan Aparatur
 - a. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik;
 - b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 8. Bidang Wilayah dan Tata Ruang
 - a. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
 - b. Pengelolaan Risiko Bencana;
 - c. Sinergi Pembangunan Perdesaan.
- 9. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan
 - a. Perkuatan Ketahanan Pangan;
 - b. Peningkatan Ketahanan Energi;
 - c. Percepatan Pembangunan Kelautan;
 - d. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan mempertimbangan hal-hal di atas maka ditetapkan Tema Pembangunan Tahun 2015 adalah **"Memantapkan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi dan Berdaya Saing**

menuju Singkawang Berkarakter, Maju dan Sejahtera”.

Makna memantapkan adalah upaya untuk menguatkan kembali, meneguhkan kembali, menekankan kembali dan menegaskan kembali konsep pemerataan pembangunan daerah yang menjadi pondasi kebijakan strategis terkait pembangunan daerah jangka pendek, menengah dan jangka panjang di Kota Singkawang dimana program/ kegiatan pemerintah daerah diarahkan dalam rangka memacu peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan yang mencakup pada pembangunan fisik, ekonomi dan sosial budaya. Pembangunan Terintegrasi adalah pembangunan yang lebih menitikberatkan pada kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang dilaksanakan Pemkot Singkawang pada tahun 2015 merupakan pembangunan 'terencana' dengan keterlibatan stakeholder lintas sektoral yang kompeten serta berorientasi pada kelestarian alam dan keberlangsungan ekosistem. Berdaya Saing adalah bahwa pembangunan daerah Kota Singkawang pada tahun 2015 memiliki sifat yang Unggul, Kompetitif dan Komparatif dibandingkan dengan pembangunan di Wilayah Singbebas mencakup pada daya saing ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan ekonomi wilayah. Berkarakter adalah bahwa pembangunan daerah Kota Singkawang dijiwai oleh semangat gotong-royong, rela berkorban, berkelanjutan yang merupakan ciri khas masyarakat Kota Singkawang. Maju dan Sejahtera adalah merupakan tujuan akhir dari pembangunan yang ingin dicapai, yakni suatu kondisi perekonomian yang baik tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu Singkawang yang Sejahtera dapat juga dimaknai sebagai Kota Singkawang yang masyarakatnya memiliki tingkat ekonomi yang cukup, tingkat pendidikan yang layak dan tingkat kesehatan yang memadai. Dalam konteks ekonomi dapat digambarkan memiliki daya beli yang tinggi, lapangan kerja yang luas dan keuntungan usaha yang besar. Secara lugas dalam satu kesatuan, tema ini bermakna menjadikan pembangunan yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan melalui penguatan kegiatan ekonomi berbasis kerakyatan yang mantap serta penguatan kinerja ekonomi swasta yang memiliki multiplier effect lintas sektor dan lintas wilayah.

Beritik tolak dari uraian di atas, maka rencana kerja terkait program/ kegiatan Pemerintah Kota Singkawang pada Tahun 2015 akan dijiwai dan terfokus pada pencapaian substansi tema pembangunan dimaksud. Hal tersebut dapat dipahami mengingat rumusan tema pembangunan tadi berhubungan erat dengan isu strategis, masalah mendesak, skala prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun ketiga RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017.

4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kota Singkawang merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2013-2017 sebagai dasar utama untuk diterjemahkan dalam Rencana Kerja Tahun 2015.

Tahap ke III RPJP Kota Singkawang dilaksanakan oleh visi Walikota dan Wakil

Walikota Singkawang kurun waktu 2013-2017. Untuk melaksanakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Singkawang selama 5 (lima) tahun (2013-2017) dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Hubungan Visi dan Misi Tujuan/ Sasaran Pembangunan

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
VISI :			
<i>Singkawang Aman, Nyaman, Maju, dan Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri</i>			
MISI :			
1.	Memfasilitasi aktifitas ibadah masyarakat terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1. Peningkatan suasana kehidupan yang harmonis, saling menghormati, aman dan damai	a) Peningkatan jati diri sebagai kota religius b) Peningkatan kerukunan hidup umat beragama c) Meningkatkan kerukunan, suasana kehidupan yang saling menghormati baik intern maupun antar umat beragama d) Peningkatan internalisasi nilai-nilai universal agama, toleransi dan saling menghormati dalam kemajemukan
2.	Memelihara, membangun dan menata fasilitas umum yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat (fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar dan air bersih)	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan utilitas kota	a) Meningkatnya panjang jalan kota dalam kondisi baik tahun 2017. b) Meningkatnya rasio panjang jalan kota per jumlah kendaraan tahun 2017. c) Meningkatnya fungsi dan peranan pelabuhan laut/ udara/ terminal bis untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi kota. d) Meningkatnya jumlah rumah tangga bersanitasi tahun 2017. e) Menurunnya persentase kawasan kumuh tahun 2017. f) Meningkatnya rasio pemukiman layak huni tahun 2017. g) Meningkatnya rasio pemukiman layak huni tahun 2017. h) Meningkatnya jumlah hidra kota yang dapat digunakan tahun 2017.
3.	Meningkatkan kemudahan usaha masyarakat berpenghasilan rendah	1. Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan	a) Menurunnya angka indeks rata-rata lama proses perijinan untuk setiap jenis perijinan

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
		perijinan	
		2. Meningkatkan kedudukan, fungsi dan peranan UKMK dalam perekonomian daerah	a) Meningkatkan jumlah koperasi aktif tahun 2017. b) Meningkatnya usaha mikro kecil menengah non BPR/LKM/UKM tahun 2017. c) Meningkatnya produktivitas dan akses UKMK kepada sumber daya produktif d) Tersedianya dua unit pasar induk dan pasar tradisional yang layak pada tahun 2017 e) Tersedianya pasar tradisional modern yang tertata, bersih, nyaman dan berdaya saing.
		3. Menciptakan kesempatan kerja dan lapangan kerja	a) Meningkatnya partisipasi angkatan kerja tahun 2017 menjadi 62,28% b) Meningkatnya pekerja yang ditempatkan tahun 2017 menjadi 87,4% c) Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja. d) Menurunnya angka sengketa antara pengusaha dan pekerja tahun 2017 menjadi 3100 kasus. e) Menurunnya jumlah tenaga kerja dibawah umur tahun 2017 menjadi 20%. f) Meningkatnya rasio lulusan S1/S2/S3 dibandingkan jumlah penduduk tahun 2017. g) Menurunnya rasio ketergantungan. h) Meningkatnya Upah Minimum Regional (UMR) sesuai dengan peningkatan kebutuhan hidup minimum tahun 2017 menjadi Rp 1,77 juta.
		4. Meningkatkan fungsi dan peranan sektor keuangan	a) Meningkatnya jumlah BPR/LKM aktif. b) Meningkatnya jumlah dan jenis bank beserta cabang-cabangnya tahun 2017 menjadi 1.973 kantor. c) Meningkatnya jenis dan jumlah perusahaan asuransi. d) Meningkatkan realisasi kredit investasi dan modal kerja

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
			perbankan kepada UMKM.
4.	Melaksanakan pendistribusian, pemerataan dan penguatan ekonomi kewilayahan	1. Meningkatkan daya saing dan kinerja ekonomi wilayah	a) Tercapainya pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2017. b) Meningkatnya PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017. c) Meningkatnya PDRB atas dasar harga konstn 2000 tahun 2017 d) Tercapainya pendapatan perkapita tahun 2017. e) Terkendalinya laju inflasi rata-rata pertahun sampai dengan tahun 2017 dibawah 1 (satu) digit f) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2017. g) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2017. h) Meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2017. i) Meningkatnya produktivitas rata-rata industri pertahun dalam perekonomian kota. j) Meningkatnya kontribusi hasil sektor industri terhadap PDRB tahun 2017. k) Meningkatnya kontribusi hasil sektor industri terhadap PDRB tahun 2017. l) Meningkatnya ekspor bersih pedagang tahun 2017. m) Meningkatnya produktivitas bahan pangan (beras) tahun 2017. n) Meningkatnya jumlah produksi perikanan tahun 2017. o) Meningkatnya jumlah rata-rata konsumsi ikan tahun 2017. p) Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita tahun 2017. q) Meningkatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan tahun 2017.
		2. Meningkatkan iklim investasi dan kualitas pelayanan	a) Meningkatkan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2017.

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
		perijinan	b) Meningkatnya nilai realisasi PMDN tahun 2017.
			c) Meningkatnya nilai realisasi PMA tahun 2017.
			d) Meningkatnya jumlah persetujuan investasi tahun 2017.
			e) Tersedianya kawasan ekonomi khusus dan kawasan perdagangan terpadu lainnya.
		3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan barang daerah	a) Meningkatnya pendapatan daerah dalam APBD tahun 2017 menjadi 4,1 triliun
			b) Meningkatnya rasio realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan daerah
			c) Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tahun 2017 menjadi 32%
			d) Meningkatnya rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD
			e) Meningkatnya proporsi belanja langsung dalam APBD
			f) Meningkatnya alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah dalam APBD
5.	Melanjutkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam agar dapat bermanfaat bagi masyarakat kota	1. Meningkatkan penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup	a) Tersedianya revisi RTRW Kota Singkawang tahun 2012-2032
			b) Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB tahun 2017 menjadi 183,11%
			c) Meningkatnya rasio rumah ber-IMB tahun 2017 menjadi 75,78%
			d) Meningkatnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTRW
			e) Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah daerah dan masyarakat
			f) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan hukum lingkungan
			g) Meningkatnya cakupan pengawasan terhadap pelaksana Amdal
			h) Menurunnya luas wilayah

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
			kebanjiran tahun 2017 menjadi 3,77%
			i) Meningkatnya luas wilayah produktif tahun 2017 menjadi 2,32%
			j) Meningkatnya luas pemukiman yang tertata
			k) Menurunnya luasan lingkungan pemukiman kumuh tahun 2017 menjadi 0,79%
			l) Meningkatnya volume sampah yang ditangani tahun 2017 menjadi 82,46%
			m) Meningkatnya rasio rumah layak huni tahun 2017 menjadi 89,28%
			n) Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam
			o) Meningkatnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 2 DAS
		2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	a) Terlaksananya revisi peraturan daerah tentang PSK dan PKL
			b) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah tentang restribusi pelayanan kebersihan
			c) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan tentang hewan berkaki empat
			d) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan peraturan daerah tentang IMB
			e) Meningkatnya penyelesaian kasus tanah negara
			f) Meningkatnya penyelesaian ijin lokasi
6.	Melanjutkan pemeliharaan, pembangunan dan penataan infrastruktur transportasi	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan utilitas kota	a) Meningkatnya jumlah orang melalui dermaga/ bandara/ terminal tahun 2017.
			b) Meningkatnya jumlah barang melalui dermaga/ bandara/ terminal tahun 2017.
			c) Meningkatnya jumlah angkutan darat tahun 2017.
			d) Meningkatnya jumlah arus penumpang angkutan umum
			e) Meningkatnya rasio ijin trayek

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
			perjumlah penduduk
			f) Meningkatnya jumlah uji KIR angkutan umum
7.	Menjamin ketentraman, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kota	1. Meningkatkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum	a) Menurunnya tingkat kriminalitas
			b) Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani
			c) Menurunnya jumlah demo
			d) Meningkatnya rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk tahun 2017
			e) Meningkatnya rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk tahun 2017.
			f) Meningkatnya rasio pos siskamling per jumlah kelurahan tahun 2017.
			g) Meningkatnya keamanan daerah guna menunjang aktifitas perekonomian masyarakat khususnya dunia investasi dan usaha
			h) Meningkatnya pembinaan politik daerah
			i) Meningkatnya pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
8.	Memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam bidang kebudayaan dan olahraga serta pengelolaan panti anak yatim piatu dan lanjut usia	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota	a) Meningkatnya jumlah gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk tahun 2017.
			b) Meningkatnya rasio lapangan olahraga per 1000 penduduk tahun 2017.
			c) Meningkatnya jumlah klub olahraga per 1000 penduduk tahun 2017.
			d) Meningkatnya jumlah gedung olahraga per 1000 penduduk.
			e) Meningkatnya partisipasi dan peran serta pemuda dalam pembangunan kota.
			f) Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional.
			g) Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional, nasional dan internasional
			h) Meningkatnya jumlah PKK

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
			aktif tahun 2017
			i) Meningkatnya penduduk yang memiliki lahan
			j) Meningkatnya luas lahan bersertifikat
			k) Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
			l) Meningkatnya rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
			m) Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
			n) Meningkatnya efektivitas, fungsi dan peran organisasi kepemudaan
			o) Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan tahun 2017, kegiatan
			p) Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan pada tahun 2017, organisasi
			q) Meningkatnya fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota
			r) Meningkatnya fasilitas/ prasarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota
		2. Meningkatnya kualitas dan melestarikan budaya daerah	a) Meningkatnya jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tahun 2017, yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat
			b) Meningkatnya jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk pada tahun 2017
			c) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya yang didukung oleh suasana
			d) Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya
			e) Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah tahun 2017.

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SABARAN
			f) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017. g) Meningkatnya jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk tahun 2017. h) Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2017 menjadi 34 kegiatan i) Meningkatnya jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya j) Meningkatnya ketahanan budaya lokal k) Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman, kreativitas seni dan budaya l) Meningkatnya ketersediaan restoran tahun 2017. m) Meningkatnya ketersediaan perhotelan tahun 2017. n) Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat o) Meningkatkan rasio jumlah pengunjung perpustakaan daerah p) Meningkatnya jumlah perpustakaan daerah tahun 2017.
9.	Reformasi birokrasi dan tatalaksana pemerintahan.	1. Meningkatkan koordinasi dan hubungan dengan pemerintah, pemerintah propinsi dan dengan pemerintah daerah lainnya 2. Meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan DPRD	a) Tepatnya penyampaian laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah tingkat atasan b) Meningkatnya implementasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2017 sesuai dengan ketetapan SPM pemerintah a) Meningkatnya efektivitas implementasi pelaksanaan keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Singkawang b) Tepatnya penyampaian laporan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
			daerah kepada DPRD
			c) Meningkatnya konsultasi publik antar pemerintah Kota Singkawang dengan DPRD
		3. Implementasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan	a) Tersedianya peraturan daerah tentang standar pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
			b) Tersedianya peraturan daerah tentang konsultasi publik
			c) Tersedianya peraturan daerah lainnya yang dibutuhkan sebagai dasar kerangka regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
		4. Meningkatkan fungsi perundang-undangan	a) Tersedianya peraturan daerah dan peraturan serta aturan pelaksana lainnya yang memenuhi azas hukum
			b) Meningkatnya implementasi pelaksanaan fungsi perundang-undangan (hak inisiatif eksekutif-legislatif)
			c) Meningkatnya efektivitas pengambilan keputusan DPRD
			d) Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan antara kota-propinsi-pusat
			e) Tersedianya regulasi ketahanan pangan
		5. Meningkatkan keterbukaan dan pertanggungjawaban publik	a) Meningkatnya opini kewajaran laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang
			b) Meningkatnya efektivitas tindak lanjut temuan sistem pengendalian internal dan kepatuhan dalam laporan keuangan pemerintah Kota Singkawang
			c) Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel
			d) Tumbuhnya iklim budaya takut Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
			e) Terlaksananya survey audit kinerja pemerintah Kota Singkawang secara periodik
		6. Meningkatkan pelayanan	a) Meningkatnya kepemilikan akte kelahiran tahun 2017 menjadi

NO	VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN
		administrasi kependudukan	46,39%
			b) Meningkatnya rasio bayi berakta tahun 2017 menjadi 100%
			c) Meningkatnya rasio pasangan berakta tahun 2017 menjadi 100%
			d) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur pengurusan pelayanan kependudukan dan catatan sipil termasuk kepastian biaya
			e) Terlaksananya sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK) khususnya PAA aplikasi KTP/KK tahun 2011
		7. Meningkatkan keselarasan program pusat dan daerah	a) Meningkatkan rasio kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan nasional tahun 2017 menjadi 100%
			b) Meningkatnya rasio program nasional yang dilaksanakan oleh SKPD tahun 2017 menjadi 100%
			c) Meningkatnya jumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Singkawang

Tujuan dan sasaran RPJMD 2013-2017 diatas dikerangka-kan dalam prioritas RPJMD sebagai berikut :

1. Air Bersih
2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat
4. Infrastruktur dan Sarana Perkotaan
5. Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Alam
6. Inovasi dan Kreativitas Daerah bagi Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Daerah.

Tujuan, sasaran, dan prioritas RPJMD 2013-2017 akan menjadi ruh utama dalam tiap tahapan RKPD dengan tekanan yang berbeda sesuai alur kerangka pencapaian visi kota, yang dirumuskan dalam tema pembangunan tahunan, yang menjadi payung bagi perumusan tujuan, sasaran, dan prioritas.

4.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah/ tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait.

Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan evaluasi lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) pada tahun rencana. Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, yakni bagaimana kondisinya terhadap:

1. Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan masalah keberlanjutan;
2. Pencapaian visi dan misi Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Singkawang Tahun 2013-2017;
3. Pengembangan sektor/ bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah;
4. Isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional Tahun 2010-2014 meliputi:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik;
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi

Disamping itu, upaya pencapaian visi nasional juga didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang, yakni:

1. Politik, hukum dan keamanan;
2. Perekonomian

3. Kesejahteraan Rakyat

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota Singkawang tahun 2015 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, adalah:

1. Optimalisasi pelayanan air bersih untuk memenuhi target MDG's;
2. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan antara kawasan pusat kota dan pinggiran;
3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan;
4. Pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan;
5. Perluasan akses dan pembangunan infrastruktur perkotaan;
6. Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan sesuai prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
7. Penanggulangan bencana banjir dan genangan, kebakaran lahan, abrasi kawasan pantai/pesisir dan mitigasi bencana;
8. Pengembangan UMKM terutama sektor perdagangan dan industri;
9. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan kualitas birokrasi;
10. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal;
11. Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang berdayaguna;
12. Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

Untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah Kota Singkawang, ditetapkan dengan perumusan program-program prioritas dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2015

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RPMD)
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1 Optimalisasi pelayanan air bersih untuk memenuhi target MDG's;
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2 Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan antara kawasan pusat kota dan pinggiran;
3	Program Pendidikan Menengah	3 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan;
4	Program Pendidikan Non Formal	4 Pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan;
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5 Perluasan akses dan pembangunan infrastruktur perkotaan;
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	6 Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan sesuai prinsip pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
7	Program Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Dasar	7 Penanggulangan bencana banjir dan genangan, kebakaran lahan, abrasi kawasan pantai/ pesisir dan

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJPD)
		mitigasi bencana;
8	Program Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Menengah	8 Pengembangan UMKM terutama sektor perdagangan dan industri;
9	Program Pendampingan Penerapan Pendidikan Karakter	9 Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan kualitas birokrasi;
10	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar	10 Pelestarian dan pengembangan budaya lokal;
11	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah	11 Peningkatan Pertumbuhan ekonomi yang berdayaguna;
12	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	12 Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
13	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	
14	Program Pengawasan Obat dan Makanan	
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
16	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	
17	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	
18	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
19	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
20	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
21	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	
22	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	
23	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	
24	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	
25	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
26	Program Pembangunan Infrastruktur Kesehatan	
27	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	
28	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	
29	Program Pengelolaan Manajemen Pelayanan Kesehatan	
30	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	
31	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	
32	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Brojong	

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJPD)
33	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
34	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	
35	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	
36	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran Lainnya	
37	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	
38	Program Pengendalian Banjir	
39	Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Infrastruktur Daerah	
40	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	
41	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	
42	Program Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	
43	Program Perencanaan Tata Ruang	
44	Program Pemanfaatan Ruang	
45	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
46	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	
47	Program Revitalisasi Penyediaan Air Bersih	
48	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	
49	Program Kerjasama Pembangunan	
50	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
51	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	
52	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
53	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
54	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	
55	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	
56	Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	
57	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
58	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	
59	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	
60	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	
61	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu	

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
	Lintas	
62	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	
63	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
64	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	
65	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
66	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
67	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	
68	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup	
69	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
70	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
71	Program Pengelolaan Limbah Perkotaan	
72	Program Lingkungan Sehat Perumahan	
73	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	
74	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan	
75	Program Keluarga Berencana	
76	Program Pelayanan Kontrasepsi	
77	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	
78	Program Pengembangan Kebijakan Daerah Perlindungan Keluarga Dan Anak	
79	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
80	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	
81	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
82	Program Pembinaan Anak Terlantar	
83	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	
84	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial	
85	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	
86	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	
87	Program Penanggulangan Korban Bencana Alam	

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)
88	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
89	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
90	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
91	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
92	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	
93	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	
94	Program Revitalisasi Pasar Tradisional	
95	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	
96	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	
97	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	
98	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal	
99	Program Pengembangan Nilai Budaya	
100	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	
101	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	
102	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	
103	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	
104	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
105	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	
106	Program Pengembangan Kemitraan	
107	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
108	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
109	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
110	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	
111	Program Pendidikan Politik Masyarakat	
112	Program Pengembangan Pendidikan Organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat	
113	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	
114	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	
115	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
116	Program Peningkatan Kinerja Kemitraan	

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
		(RKPD)
	Penyediaan Air Bersih	
117	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pemerintahan	
118	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	
119	Program Pengembangan Kinerja Organisasi	
120	Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi	
121	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	
122	Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	
123	Program Optimalisasi Sistem Informasi E-Gov	
124	Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah	
125	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	
126	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
127	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
128	Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah	
129	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
130	Program Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance)	
131	Program Profesionalisasi PNS	
132	Program Pengusulan Formasi dan Sistem Seleksi Sumberdaya Aparatur	
133	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
134	Program Pendidikan Kedinasan	
135	Program Penguatan Sistem Disiplin dan Etika PNS	
136	Program Penataan Administrasi Kependudukan	
137	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	
138	Program Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	
139	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	
140	Program Pembangunan Infrastruktur	
141	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
142	Program Pengembangan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Perpustakaan	

No	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan Daerah
		(RKPD)
143	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	
144	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	
145	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
146	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	
147	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
148	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	
149	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	
150	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	
151	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	
152	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	
153	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	
154	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	
155	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	
156	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	

Selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam program prioritas dan SKPD pelaksana kegiatan, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.3.
Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No	Pembangunan Daerah (RKPD)	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)		Kinerja		SKPD
				Indikator	Target	
1	Optimalisasi pelayanan air bersih untuk memenuhi target MDG's;	1	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku			Dinas Dina Marga, SDA, ESDM
		2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah			Dinas Tatakota Pertanahan dan Cipta Karya
		3	Program Revitalisasi Penyediaan Air Bersih			Dinas Tatakota Pertanahan dan Cipta Karya
		4	Program Peningkatan Kinerja Kemitraan Penyediaan Air Bersih			Sekretariat Daerah
2	Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan antara kawasan pusat kota dan pinggiran;	5	Program Pendidikan Anak Usia Dini			Dinas Pendidikan
		6	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun			Dinas Pendidikan
		7	Program Pendidikan Menengah			Dinas Pendidikan
		8	Program Pendidikan Non Formal			Dinas Pendidikan
		9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			Dinas Pendidikan

No	Pembangunan Daerah (RP/MD)	Program Prioritas Tahun Rencana (RP/MD)		Klasifikasi		SKPD
				Indikator	Target	
		10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			Dinas Pendidikan
		11	Program Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan
		12	Program Pengembangan Karakter Siswa Pendidikan Menengah			Dinas Pendidikan
		13	Program Pendampingan Penerapan Pendidikan Karakter			Dinas Pendidikan
		14	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan
		15	Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah			Dinas Pendidikan
		16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		17	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		18	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
		19	Program Pengembangan Inovasi Daerah dalam Pelayanan Perpustakaan			Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
		20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
3	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pemerataan fasilitas kesehatan;	21	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan			Dinas Kesehatan
		22	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			Dinas Kesehatan
		23	Program Pengawasan Obat dan Makanan			Dinas Kesehatan
		24	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat			Dinas Kesehatan
		25	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			Dinas Kesehatan
		26	Program Pengembangan Lingkungan Sehat			Dinas Kesehatan
		27	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular			Dinas Kesehatan
		28	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan/ RSUD dr. Abdul Azis
		29	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya			Dinas Kesehatan
		30	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan			Dinas Kesehatan
		31	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita			Dinas Kesehatan
		32	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia			Dinas Kesehatan

No	Program Pengembangan Daerah (RPMD)	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)		Kinerja		SKPD
				Indikator	Target	
4	Pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan ;	33	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan			Dinas Kesehatan
		34	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			Dinas Kesehatan
		35	Program Pembangunan Infrastruktur Kesehatan			Dinas Kesehatan
		36	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata			RSUD dr. Abdul Aziz
		37	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata			RSUD dr. Abdul Aziz
		38	Program Pengelolaan Manajemen Pelayanan Kesehatan			RSUD dr. Abdul Aziz
		39	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		40	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		41	Program Pembinaan Anak Terlantar			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		42	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		43	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Sosial			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		44	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		45	Program Peningkatan Kesempatan Kerja			Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan			Dinas Tata Kota Perumahan dan Cipta Karya/ Kecamatan Singkawang Tengah/ Kecamatan Singkawang Utara/ Kecamatan Singkawang Selatan/ Kecamatan Singkawang Timur/ Kecamatan Singkawang Barat

No	Pembagian Daerah (SKD/PD)	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Kinerja		SKPD
			Indikator	Tangen	
		47	Program Keluarga Berencana		Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
		48	Program Pelayanan Kontrasepsi		Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
		49	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
		50	Program Pengembangan Kebijakan Daerah Perlindungan Keluarga Dan Anak		Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
		51	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera		Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
		52	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		53	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		54	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		55	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		56	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan		Kecamatan Singkawang Tengah/ Kecamatan Singkawang Utara/ Kecamatan Singkawang Selatan/ Kecamatan Singkawang Timur/ Kecamatan Singkawang

No	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJPD)	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)		Kinerja		SKPD
				Indikator	Target	
5	Perluasan akses dan pembangunan infrastruktur perkotaan	57	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			Barni Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		58	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		59	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Brojong			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		60	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		61	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		62	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		63	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		64	Program Pengembangan Sistem Informasi/ Database Infrastruktur Daerah			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		65	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		66	Program Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		67	Program Perencanaan Tata Ruang			Dinas Tatakota Pertanahan dan Cipta Karya
		68	Program Pemanfaatan Ruang			Dinas Tatakota Pertanahan dan Cipta Karya
		69	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			Dinas Tatakota Pertanahan dan Cipta Karya
		70	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah			Dinas Tatakota Pertanahan dan Cipta Karya
		71	Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman			Dinas Kebersihan dan Perumahan
		72	Program Kerjasama Pembangunan			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		73	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		74	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Program Pembangunan Daerah (RPJPD)	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Kinerja		SKPD
			Indikator	TARGET	
		75	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		76	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		77	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		78	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		79	Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		80	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		81	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		82	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		83	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		84	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		85	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		86	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		87	Program Pembangunan Infrastruktur		Kecamatan Singkawang Barat
6	Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan sesuai prinsip pembangunan	88	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Badan Lingkungan Hidup
		89	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Badan Lingkungan Hidup

No	Pembangunan Daerah (RPJMD)	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)		Kinerja		SKPD
				Realisasi	Tertarget	
	lingkungan hidup yang berkelanjutan;	90	Program Peningkatan Pengendalian Polusi			Badan Lingkungan Hidup
		91	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup			Badan Lingkungan Hidup
		92	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			Dinas Kebersihan dan Perumahan
		93	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Dinas Kebersihan dan Perumahan
		94	Program Pengelolaan Limbah Perkotaan			Dinas Kebersihan dan Perumahan
		95	Program Lingkungan Sehat Perumahan			Dinas Kebersihan dan Perumahan
		96	Program Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup			Kecamatan Singkawang Tengah/ Kecamatan Singkawang Utara/ Kecamatan Singkawang Selatan/ Kecamatan Singkawang Timur/ Kecamatan Singkawang Barat
7	Penanggulangan bencana banjir dan genangan, kebakaran lahan, abrasi kawasan pantai/ pesisir dan mitigasi bencana;	97	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		98	Program Pengendalian Banjir			Dinas Bina Marga, SDA, ESDM
		99	Program Penanggulangan Korban Bencana Alam			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		100	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			Dinas Pertanian dan Kehutanan
8	Pengembangan UMKM terutama sektor perdagangan dan industri;	101	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			Dinas Pertanian dan Kehutanan
		102	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		103	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		104	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

No	Prioritas Pembangunan Daerah (SADP)	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)		Kinerja		SKPD
				Indikator	Target	
		105	Program Revitalisasi Pasar Tradisional			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		106	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		107	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
		108	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah			Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
9	Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan kualitas birokrasi;	109	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah			Sekretariat Daerah
		110	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			Sekretariat Daerah
		111	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			Sekretariat Daerah
		112	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pemerintahan			Sekretariat Daerah
		113	Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi			Sekretariat Daerah
		114	Program Pengembangan Kinerja Organisasi			Sekretariat Daerah
		115	Program Penguatan Ketatalaksanaan Organisasi			Sekretariat Daerah
		116	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah			Sekretariat Daerah
		117	Program Optimalisasi Sistem Informasi E-Gov			Sekretariat Daerah
		118	Program Peningkatan Pelaksanaan Peraturan Daerah			Sekretariat Daerah
		119	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			Sekretariat DPRD
		120	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			Inspektorat Daerah
		121	Program Pencapaian Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance)			Inspektorat Daerah
		122	Program Profesionalisasi PNS			Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
		123	Program Pengusulan Formasi dan Sistem Seleksi Sumberdaya Aparatur			Badan Kepegawaian dan

No	Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Kinerja		SKPD
			Indikator	TARGET	
		124	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Diklat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
		125	Program Pendidikan Kedinasan		Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
		126	Program Penguatan Sistem Disiplin dan Etika PNS		Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
		127	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		128	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Penanaman Modal		Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
		129	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Kecamatan Singkawang Tengah
		130	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset
		131	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset
		132	Program Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah		Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset
10	Pelestarian dan pengembangan budaya lokal:	133	Program Pengembangan Nilai Budaya		Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		134	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		135	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		136	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

No	Program Pembangunan Daerah (RPMD)	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)		Kinerja		SKPD
				Indikator	Target	
		137	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
		138	Program Pengembangan Kemitraan			Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
11	Memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdayaguna;	139	Program Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah			Sekretariat Daerah
		140	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan			Dinas Pertanian dan Kehutanan
		141	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan			Dinas Pertanian dan Kehutanan
		142	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			Dinas Pertanian dan Kehutanan
		143	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan			Dinas Pertanian dan Kehutanan/ Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
		144	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
		145	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan			Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
		146	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan			Kantor Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
		147	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			Dinas Kelautan dan Perikanan
		148	Program Pengembangan Budidaya Perikanan			Dinas Kelautan dan Perikanan
		149	Program Pengembangan Perikanan Tangkap			Dinas Kelautan dan Perikanan
		150	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan			Dinas Kelautan dan Perikanan
12	Stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.	151	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat/ Kantor Sahuan

No	Pembangunan Daerah (RSDPA)	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Kinerja		SKPD
			Indikator	Tanggal	
					Polisi Pamong Praja
		152 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		153 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		154 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		155 Program Pendidikan Politik Masyarakat			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
		156 Program Pengembangan Pendidikan Organisasi/ Lembaga Swadaya Masyarakat			Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal.

Pemilihan prioritas disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kota Singkawang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah di mana kemampuan pendanaan memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh. Sehubungan dengan itu, maka prioritas pembangunan Kota Singkawang tahun 2015, difokuskan pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia serta didukung oleh upaya-upaya untuk menciptakan pembangunan yang terarah dan tepat guna, adil dan demokratis.

Daftar program/ kegiatan berikut komponen-komponennya disusun menurut urusan Pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang. Daftar program/ kegiatan RKPD Kota Singkawang Tahun 2015 merupakan substansi RKPD yang meliputi uraian nama program dan kegiatan, deskripsi dan target output dan outcome yang harus diwujudkan berikut jumlah dana yang dibutuhkan serta lokasi pelaksanaan kegiatan adalah sebagaimana tabel 5.1 yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2015; tabel 5.2 yang memuat Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 dan Rencana Plafon Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Urusan Per SKPD Tahun Anggaran 2015; tabel 5.3 yang memuat Rencana Plafon Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2015; serta tabel 5.4 yang memuat Rencana Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD Tahun Anggaran 2015.

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Pendidikan

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Kesehatan

[illegible]

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Rumah Sakit

Dr. Abdul Azis

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM

PROGRAM/KEGIATAN SEMESTER KOTA SINGARAWANG
TARIKIN ANGGARAN 2015

KAPITEL 1: ALLGEMEINE DATEN										KAPITEL 2: TECHNISCHE DATEN										KAPITEL 3: WIRTSCHAFTLICHE DATEN										KAPITEL 4: SONSTIGE DATEN									
PROJEKT-NR.	PROJEKT-NAMEN	PROJEKT-LEITER	PROJEKT-STATUS	PROJEKT-ART	PROJEKT-GRÜNDUNG	PROJEKT-DAUER	PROJEKT-BUDGET	PROJEKT-GEWINN	PROJEKT-RISIKO	PROJEKT-ANFANG	PROJEKT-ENDE	PROJEKT-ORT	PROJEKT-ANFANG	PROJEKT-ENDE	PROJEKT-ORT	PROJEKT-ANFANG	PROJEKT-ENDE	PROJEKT-ORT	PROJEKT-ANFANG	PROJEKT-ENDE	PROJEKT-ORT	PROJEKT-ANFANG	PROJEKT-ENDE	PROJEKT-ORT	PROJEKT-ANFANG	PROJEKT-ENDE	PROJEKT-ORT	PROJEKT-ANFANG	PROJEKT-ENDE	PROJEKT-ORT									
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1										
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1										
3	3.1	3.1.1	3.1.1.1	3.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1										
4	4.1	4.1.1	4.1.1.1	4.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1											
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1											
6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1											
7	7.1	7.1.1	7.1.1.1	7.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1											
8	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1												
9	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1												
10	10.1	10.1.1	10.1.1.1	10.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1												
11	11.1	11.1.1	11.1.1.1	11.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1												
12	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1												
13	13.1	13.1.1	13.1.1.1	13.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	13.1.1.1.1.1.1.1.1																						

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Tata Kota, Pertanahan dan Cipta Karya

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Badan Lingkungan Hidup

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Badan Lingkungan Hidup

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Kebersihan dan Perumahan

[illegible]

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

[illegible]

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM KEGIATAN SKPD KOTA SINGKARAWANG
TASUL ANGGARAN 2015

[illegible]

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Sekretariat Daerah

Region	Population (millions)	GDP (billions \$)	GDP per capita (\$)	Economic Indicators				Social Indicators				Environmental Indicators			
				Unemployment (%)	Inflation (%)	Trade Balance (\$)	FDI Inflow (\$)	Life Expectancy (years)	Infant Mortality (per 1,000)	Urbanization (%)	Renewable Energy (%)	CO2 Emissions (kg/capita)	Forest Cover (%)		
North America	350	15,000	42,857	5.2	2.1	120	150	78	12	75	78	15	25	18	
Europe	730	12,000	16,439	6.8	1.5	80	100	82	8	70	72	10	20	12	
Asia	4,500	8,000	1,778	8.5	3.5	200	250	70	15	65	68	12	18	10	
South America	420	3,000	7,143	9.5	4.5	50	60	68	18	60	62	14	16	8	
Africa	1,200	1,500	1,250	12.5	6.5	20	30	55	25	50	52	16	12	5	
Oceania	35	1,000	28,571	4.5	1.8	10	15	85	5	80	82	8	22	15	

[illegible][illegible]

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Sekretariat DPRD

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Inspektorat Daerah

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Badan Kepegawaian Daerah

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Kecamatan Singkawang Tengah

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Kecamatan Singkawang Utara

Kode	PROGRAM KEGIATAN	Tipe/Modalitas Kegiatan	Mekanisme Kegiatan	Lokasi	Cakupan Program	Tahap	Estimasi Biaya	Tahap	Berkas	Tahap	Rincian Biaya (Rp)				Total Anggaran	Pencapaian
											Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo		
1.01.11.11.01	Pengembangan Sistem Informasi	01	01	01	01	01	01	01	01	01	1.111.000.000	0	0	0	1.111.000.000	0%
Jumlah Total Anggaran																

Kode	PROGRAM KEGIATAN	Tipe/Modalitas Kegiatan	Mekanisme Kegiatan	Lokasi	Cakupan Program	Tahap	Estimasi Biaya	Tahap	Berkas	Tahap	Rincian Biaya (Rp)				Total Anggaran	Pencapaian
											Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo		
1.01.11.11.02	Pengembangan Sistem Informasi	01	01	01	01	01	01	01	01	01	1.111.000.000	0	0	0	1.111.000.000	0%
Jumlah Total Anggaran																

Kode	PROGRAM KEGIATAN	Tipe/Modalitas Kegiatan	Mekanisme Kegiatan	Lokasi	Cakupan Program	Tahap	Estimasi Biaya	Tahap	Berkas	Tahap	Rincian Biaya (Rp)				Total Anggaran	Pencapaian
											Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo		
1.01.11.11.03	Pengembangan Sistem Informasi	01	01	01	01	01	01	01	01	01	1.111.000.000	0	0	0	1.111.000.000	0%
Jumlah Total Anggaran																

Kode	PROGRAM KEGIATAN	Tipe/Modalitas Kegiatan	Mekanisme Kegiatan	Lokasi	Cakupan Program	Tahap	Estimasi Biaya	Tahap	Berkas	Tahap	Rincian Biaya (Rp)				Total Anggaran	Pencapaian
											Anggaran	Realisasi	Saldo	Saldo		
1.01.11.11.04	Pengembangan Sistem Informasi	01	01	01	01	01	01	01	01	01	1.111.000.000	0	0	0	1.111.000.000	0%
Jumlah Total Anggaran																

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Kecamatan Singkawang Selatan

PENGALAMAN & PENGETAHUAN BLOK 2013														PILIHAN BLOK 2013										PILIHAN BLOK 2014										PILIHAN BLOK 2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
BLOK		PROGAM KEGIATAN		TRADISI BUDAYA		BALOK BUDAYA		LOKASI		CARA/PROSEDUR		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH		KETERANGAN		TARJAH		WAKTU		TARJAH	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEMUKHAAN									
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										KEMENTERIAN KEM									

No 4		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A. D.		L. W. A	
------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	---------	--

No. P		No. 1		No. 2		No. 3		No. 4		No. 5		No. 6		No. 7		No. 8		No. 9		No. 10		No. 11		No. 12		No. 13		No. 14		No. 15		No. 16		No. 17		No. 18		No. 19		No. 20		No. 21		No. 22		No. 23		No. 24		No. 25		No. 26		No. 27		No. 28		No. 29		No. 30		No. 31		No. 32		No. 33		No. 34		No. 35		No. 36		No. 37		No. 38		No. 39		No. 40		No. 41		No. 42		No. 43		No. 44		No. 45		No. 46		No. 47		No. 48		No. 49		No. 50		No. 51		No. 52		No. 53		No. 54		No. 55		No. 56		No. 57		No. 58		No. 59		No. 60		No. 61		No. 62		No. 63		No. 64		No. 65		No. 66		No. 67		No. 68		No. 69		No. 70		No. 71		No. 72		No. 73		No. 74		No. 75		No. 76		No. 77		No. 78		No. 79		No. 80		No. 81		No. 82		No. 83		No. 84		No. 85		No. 86		No. 87		No. 88		No. 89		No. 90		No. 91		No. 92		No. 93		No. 94		No. 95		No. 96		No. 97		No. 98		No. 99		No. 100		No. 101		No. 102		No. 103		No. 104		No. 105		No. 106		No. 107		No. 108		No. 109		No. 110		No. 111		No. 112		No. 113		No. 114		No. 115		No. 116		No. 117		No. 118		No. 119		No. 120		No. 121		No. 122		No. 123		No. 124		No. 125		No. 126		No. 127		No. 128		No. 129		No. 130		No. 131		No. 132		No. 133		No. 134		No. 135		No. 136		No. 137		No. 138		No. 139		No. 140		No. 141		No. 142		No. 143		No. 144		No. 145		No. 146		No. 147		No. 148		No. 149		No. 150		No. 151		No. 152		No. 153		No. 154		No. 155		No. 156		No. 157		No. 158		No. 159		No. 160		No. 161		No. 162		No. 163		No. 164		No. 165		No. 166		No. 167		No. 168		No. 169		No. 170		No. 171		No. 172		No. 173		No. 174		No. 175		No. 176		No. 177		No. 178		No. 179		No. 180		No. 181		No. 182		No. 183		No. 184		No. 185		No. 186		No. 187		No. 188		No. 189		No. 190		No. 191		No. 192		No. 193		No. 194		No. 195		No. 196		No. 197		No. 198		No. 199		No. 200		No. 201		No. 202		No. 203		No. 204		No. 205		No. 206		No. 207		No. 208		No. 209		No. 210		No. 211		No. 212		No. 213		No. 214		No. 215		No. 216		No. 217		No. 218		No. 219		No. 220		No. 221		No. 222		No. 223		No. 224		No. 225		No. 226		No. 227		No. 228		No. 229		No. 230		No. 231		No. 232		No. 233		No. 234		No. 235		No. 236		No. 237		No. 238		No. 239		No. 240		No. 241		No. 242		No. 243		No. 244		No. 245		No. 246		No. 247		No. 248		No. 249		No. 250		No. 251		No. 252		No. 253		No. 254		No. 255		No. 256		No. 257		No. 258		No. 259		No. 260		No. 261		No. 262		No. 263		No. 264		No. 265		No. 266		No. 267		No. 268		No. 269		No. 270		No. 271		No. 272		No. 273		No. 274		No. 275		No. 276		No. 277		No. 278		No. 279		No. 280		No. 281		No. 282		No. 283		No. 284		No. 285		No. 286		No. 287		No. 288		No. 289		No. 290		No. 291		No. 292		No. 293		No. 294		No. 295		No. 296		No. 297		No. 298		No. 299		No. 300		No. 301		No. 302		No. 303		No. 304		No. 305		No. 306		No. 307		No. 308		No. 309		No. 310		No. 311		No. 312		No. 313		No. 314		No. 315		No. 316		No. 317		No. 318		No. 319		No. 320		No. 321		No. 322		No. 323		No. 324		No. 325		No. 326		No. 327		No. 328		No. 329		No. 330		No. 331		No. 332		No. 333		No. 334		No. 335		No. 336		No. 337		No. 338		No. 339		No. 340		No. 341		No. 342		No. 343		No. 344		No. 345		No. 346		No. 347		No. 348		No. 349		No. 350		No. 351		No. 352		No. 353		No. 354		No. 355		No. 356		No. 357		No. 358		No. 359		No. 360		No. 361		No. 362		No. 363		No. 364		No. 365		No. 366		No. 367		No. 368		No. 369		No. 370		No. 371		No. 372		No. 373		No. 374		No. 375		No. 376		No. 377		No. 378		No. 379		No. 380		No. 381		No. 382		No. 383		No. 384		No. 385		No. 386		No. 387		No. 388		No. 389		No. 390		No. 391		No. 392		No. 393		No. 394		No. 395		No. 396		No. 397		No. 398		No. 399		No. 400		No. 401		No. 402		No. 403		No. 404		No. 405		No. 406		No. 407		No. 408		No. 409		No. 410		No. 411		No. 412		No. 413		No. 414		No. 415		No. 416		No. 417		No. 418		No. 419		No. 420		No. 421		No. 422		No. 423		No. 424		No. 425		No. 426		No. 427		No. 428		No. 429		No. 430		No. 431		No. 432		No. 433		No. 434		No. 435		No. 436		No. 437		No. 438		No. 439		No. 440		No. 441		No. 442		No. 443		No. 444		No. 445		No. 446		No. 447		No. 448		No. 449		No. 450		No. 451		No. 452		No. 453		No. 454		No. 455		No. 456		No. 457		No. 458		No. 459		No. 460		No. 461		No. 462		No. 463		No. 464		No. 465		No. 466		No. 467		No. 468		No. 469		No. 470		No. 471		No. 472		No. 473		No. 474		No. 475		No. 476		No. 477		No. 478		No. 479		No. 480		No. 481		No. 482		No. 483		No. 484		No. 485		No. 486		No. 487		No. 488		No. 489		No. 490		No. 491		No. 492		No. 493		No. 494		No. 495		No. 496		No. 497		No. 498		No. 499		No. 500		No. 501		No. 502		No. 503		No. 504		No. 505		No. 506		No. 507		No. 508		No. 509		No. 510		No. 511		No. 512		No. 513		No. 514		No. 515		No. 516		No. 517		No. 518		No. 519		No. 520		No. 521		No. 522		No. 523		No. 524		No. 525		No. 526		No. 527		No. 528		No. 529		No. 530		No. 531		No. 532		No. 533		No. 534		No. 535		No. 536		No. 537		No. 538		No. 539		No. 540		No. 541		No. 542		No. 543		No. 544		No. 545		No. 546		No. 547		No. 548		No. 549		No. 550		No. 551		No. 552		No. 553		No. 554		No. 555		No. 556		No. 557		No. 558		No. 559		No. 560		No. 561		No. 562		No. 563		No. 564		No. 565		No. 566		No. 567		No. 568		No. 569		No. 570		No. 571		No. 572		No. 573		No. 574		No. 575		No. 576		No. 577		No. 578		No. 579		No. 580		No. 581		No. 582		No. 583		No. 584		No. 585		No. 586		No. 587		No. 588		No. 589		No. 590		No. 591		No. 592		No. 593		No. 594		No. 595		No. 596		No. 597		No. 598		No. 599		No. 600		No. 601		No. 602		No. 603		No. 604		No. 605		No. 606		No. 607		No. 608		No. 609		No. 610		No. 611		No. 612		No. 613		No. 614		No. 615		No. 616		No. 617		No. 618		No. 619		No. 620		No. 621		No. 622		No. 623		No. 624		No. 625		No. 626		No. 627		No. 628		No. 629		No. 630		No. 631		No. 632		No. 633		No. 634		No. 635		No. 636		No. 637		No. 638		No. 639		No. 640		No. 641		No. 642		No. 643		No. 644		No. 645		No. 646		No. 647		No. 648		No. 649		No. 650		No. 651		No. 652		No. 653		No. 654		No. 655		No. 656		No. 657		No. 658		No. 659		No. 660		No. 661		No. 662		No. 663		No. 664		No. 665		No. 666		No. 667		No. 668		No. 669		No. 670		No. 671		No. 672		No. 673		No. 674		No. 675		No. 676		No. 677		No. 678		No. 679		No. 680		No. 681		No. 682		No. 683		No. 684		No. 685		No. 686		No. 687		No. 688		No. 689		No. 690		No. 691		No. 692		No. 693		No. 694		No. 695		No. 696		No. 697		No. 698		No. 699		No. 700		No. 701		No. 702		No. 703		No. 704		No. 705		No. 706		No. 707		No. 708		No. 709		No. 710		No. 711		No. 712		No. 713		No. 714		No. 715		No. 716		No. 717		No. 718		No. 719		No. 720		No. 721		No. 722		No. 723		No. 724		No. 725		No. 726		No. 727		No. 728		No. 729		No. 730		No. 731		No. 732		No. 733		No. 734		No. 735		No. 736		No. 737		No. 738		No. 739		No. 740		No. 741		No. 742		No. 743		No. 744		No. 745		No. 746		No. 747		No. 748		No. 749		No. 750		No. 751		No. 752		No. 753		No. 754		No. 755		No. 756		No. 757		No. 758		No. 759		No. 760		No. 761		No. 762		No. 763		No. 764		No. 765		No. 766		No. 767		No. 768		No. 769		No. 770		No. 771		No. 772		No. 773		No. 774		No. 775		No. 776		No. 777		No. 778		No. 779		No. 780		No. 781		No. 782		No. 783		No. 784		No. 785		No. 786		No. 787		No. 788		No. 789		No. 790		No. 791		No. 792		No. 793		No. 794		No. 795		No. 796		No. 797		No. 798		No. 799		No. 800		No. 801		No. 802		No. 803		No. 804		No. 805		No. 806		No. 807		No. 808		No. 809		No. 810		No. 811		No. 812		No. 813		No. 814		No. 815		No. 816		No. 817		No. 818		No. 819		No. 820		No. 821		No. 822		No. 823		No. 824		No. 825		No. 826		No. 827		No. 828		No. 829		No. 830		No. 831		No. 832		No. 833		No. 834		No. 835		No. 836		No. 837		No. 838		No. 839		No. 840		No. 841		No. 842		No. 843		No. 844		No. 845		No. 846		No. 847		No. 848		No. 849		No. 850		No. 851		No. 852		No. 853		No. 854		No. 855		No. 856		No. 857		No. 858		No. 859		No. 860		No. 861		No. 862		No. 863		No. 864		No. 865		No. 866		No. 867		No. 868		No. 869		No. 870		No. 871		No. 872		No. 873		No. 874		No. 875		No. 876		No. 877		No. 878		No. 879		No. 880		No. 881		No. 882		No. 883		No. 884		No. 885		No. 886		No. 887		No. 888		No. 889		No. 890		No. 891	
-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	-------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

No. P Klasifikasi		1. WAKTU 1.1.1. Waktu		2. WAKTU 2.1.1. Waktu		3. WAKTU 3.1.1. Waktu		4. WAKTU 4.1.1. Waktu		5. WAKTU 5.1.1. Waktu		6. WAKTU 6.1.1. Waktu		7. WAKTU 7.1.1. Waktu		8. WAKTU 8.1.1. Waktu		9. WAKTU 9.1.1. Waktu		10. WAKTU 10.1.1. Waktu	
BLOK		PROGAM KEGIATAN		PROGAM KEGIATAN		PROGAM KEGIATAN		PROGAM KEGIATAN		PROGAM KEGIATAN		PROGAM KEGIATAN		PROGAM KEGIATAN		PROGAM KEGIATAN		PROGAM KEGIATAN		PROGAM KEGIATAN	
No		No		No		No		No		No		No		No		No		No		No	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
1		2																			

No		1. Nama		2. Identitas Sekolah, Saat Pengisian Bulatan Berisi		3. Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten										4. Tahun Berapa, Bulan, Hari				5. Waktu, Hari, Bulan		6. Jumlah, Hari, Bulan	
No		1. Nama		2. Identitas Sekolah, Saat Pengisian Bulatan Berisi		3. Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten		4. Tahun Berapa, Bulan, Hari		5. Waktu, Hari, Bulan		6. Jumlah, Hari, Bulan		7. Jumlah, Hari, Bulan		8. Jumlah, Hari, Bulan		9. Jumlah, Hari, Bulan					
No		1. Nama		2. Identitas Sekolah, Saat Pengisian Bulatan Berisi		3. Nama Desa, Kecamatan, Kabupaten		4. Tahun Berapa, Bulan, Hari		5. Waktu, Hari, Bulan		6. Jumlah, Hari, Bulan		7. Jumlah, Hari, Bulan		8. Jumlah, Hari, Bulan		9. Jumlah, Hari, Bulan					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
1		2		3		4		5															

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Kecamatan Singkawang Timur

• **THE EFFECTS OF THE 1997-1998 EL NIÑO ON THE TROPICAL RAIN FOREST**

[illegible]

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Kecamatan Singkawang Barat

[illegible]

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Pertanian dan Kehutanan



- In Japan, PPTA is used both as a monomer and as a polymer.
- In France
- In Germany
- In Italy
- In the U.S.

PROGRAM KECILATAN SMPD KOTA SENGKAWANG
TAKWIM ANGGARAN 2015

ID	CODE	PROJECT NAME	STATUS	TYPE	PRIORITY	DUE DATE	ASSIGNED TO	ESTIMATED COST		ACTUAL COST		VARIANCE	BUDGET	SPENT
								ESTIMATED	ACTUAL	ESTIMATED	ACTUAL			
1	01	Project Alpha	In Progress	Software	High	2023-12-31	John Doe	\$1,200,000	\$1,150,000	\$50,000	\$1,200,000	\$1,150,000	\$50,000	
2	02	Project Beta	Completed	Marketing	Medium	2023-06-15	Jane Smith	\$800,000	\$800,000	\$0	\$800,000	\$800,000	\$0	
3	03	Project Gamma	On Hold	Research	Low	2024-03-01	Mike Johnson	\$500,000	\$100,000	\$400,000	\$500,000	\$100,000	\$400,000	
4	04	Project Delta	In Progress	Operations	Medium	2023-09-30	Sarah Lee	\$300,000	\$180,000	\$120,000	\$300,000	\$180,000	\$120,000	
5	05	Project Epsilon	Planned	Development	High	2024-06-01	David Kim	\$900,000	\$0	\$900,000	\$900,000	\$0	\$900,000	
6	06	Project Zeta	Completed	Marketing	Medium	2023-03-31	Emily White	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$600,000	\$0	
7	07	Project Eta	On Hold	Research	Low	2024-09-01	Chris Brown	\$400,000	\$40,000	\$360,000	\$400,000	\$40,000	\$360,000	
8	08	Project Theta	In Progress	Operations	Medium	2023-11-30	Alex Green	\$200,000	\$180,000	\$20,000	\$200,000	\$180,000	\$20,000	
9	09	Project Iota	Planned	Development	High	2024-09-30	Mia Black	\$700,000	\$0	\$700,000	\$700,000	\$0	\$700,000	
10	10	Project Kappa	Completed	Marketing	Medium	2023-08-15	Noah Grey	\$900,000	\$900,000	\$0	\$900,000	\$900,000	\$0	
11	11	Project Lambda	On Hold	Research	Low	2024-12-31	Olivia Blue	\$1,000,000	\$50,000	\$950,000	\$1,000,000	\$50,000	\$950,000	
12	12	Project Mu	In Progress	Operations	Medium	2023-10-31	Peter Red	\$350,000	\$245,000	\$105,000	\$350,000	\$245,000	\$105,000	
13	13	Project Nu	Planned	Development	High	2024-12-31	Quinn Yellow	\$850,000	\$0	\$850,000	\$850,000	\$0	\$850,000	
14	14	Project Xi	Completed	Marketing	Medium	2023-05-31	Ryan Purple	\$750,000	\$750,000	\$0	\$750,000	\$750,000	\$0	
15	15	Project Omicron	On Hold	Research	Low	2024-03-31	Sophia Pink	\$450,000	\$67,500	\$382,500	\$450,000	\$67,500	\$382,500	
16	16	Project Pi	In Progress	Operations	Medium	2023-12-31	Tyler Orange	\$250,000	\$225,000	\$25,000	\$250,000	\$225,000	\$25,000	
17	17	Project Rho	Planned	Development	High	2024-06-30	Uma Silver	\$600,000	\$0	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	
18	18	Project Sigma	Completed	Marketing	Medium	2023-07-31	Victor Gold	\$800,000	\$800,000	\$0	\$800,000	\$800,000	\$0	
19	19	Project Tau	On Hold	Research	Low	2024-09-30	Wendy Bronze	\$550,000	\$55,000	\$495,000	\$550,000	\$55,000	\$495,000	
20	20	Project Upsilon	In Progress	Operations	Medium	2023-11-30	Xavier Copper	\$250,000	\$225,000	\$25,000	\$250,000	\$225,000	\$25,000	

[illegible]

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



**Kantor Penyuluh
Pertanian, Perikanan,
Kehutanan dan
Ketahanan Pangan**



PROGRAM KEGIATAN BKPD KOTA SINGGAH AND
TAPLIN ANGGARAN 2013

TABELIN ANGGAHAN 2011

[illegible]

• THE FUTURE

100

[illegible]

Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Kota Singkawang Tahun 2015



Dinas Kelautan dan Perikanan

Tabel 5.2
Realisasi dan Rencana Plafon Anggaran Belanja Langsung berdasarkan Urusan per SKPD
Tahun Anggaran 2014-2015

NO	NAMA URUSAN/URUP	PLAFON ANGGARAN		Realisasi/Revisi Rp	KOMPONEN T.A 2015 Rp	Keterangan
		2014	2015			
1	1	2	3	4	5	7
1	URUSAN WAJIB	333.897.679.386,00	378.943.297.347,00	36.697.486.797,00	32,39	
1	PEMBERIKAN	45.898.175.988,00	27.814.165.883,00	(6.346.872.817,00)	9,31	
	1 Dana Pendidikan	45.815.025.900,00	37.514.100.087,00	(8.700.072.817,00)	-	-
	2 Kacamatan Singharung Tengah	9.950.000,00	-	(9.950.000,00)	-	-
	3 Kacamatan Singharung Utara	9.250.000,00	-	(9.250.000,00)	-	-
	4 Kacamatan Singharung Selatan	14.000.000,00	-	(14.000.000,00)	-	-
	5 Kacamatan Singharung Timur	9.950.000,00	-	(9.950.000,00)	-	-
2	KEMERIAHAN	46.382.466.764,50	84.167.388.139,00	23.894.813.344,00	27,33	
	1 Dana Kesehatan	32.549.921.947,50	19.643.909.431,40	(2.906.014.516,50)	-	-
	2 RSUD dr. Abdul Aziz	37.692.292.817,00	64.513.179.408,00	26.821.077.001,00	-	-
	3 Kacamatan Singharung Tengah	10.230.000,00	-	(10.230.000,00)	-	-
	4 Kacamatan Singharung Utara	9.850.000,00	-	(9.850.000,00)	-	-
	5 Kacamatan Singharung Selatan	11.300.000,00	-	(11.300.000,00)	-	-
	6 Kacamatan Singharung Timur	8.850.000,00	-	(8.850.000,00)	-	-
3	PEKERJAAN UMUM	113.642.475.375,00	151.143.779.889,00	1.399.279.428,00	26,67	
	1 Dana Bina Marga, SD, ESDM	94.647.944.800,00	80.694.932.000,00	(13.953.032.800,00)	-	-
	2 Dana Teknik Perumahan dan Cipta Karya	16.994.530.575,00	32.007.050.000,00	15.012.519.425,00	-	-
	3 Dana Kebutuhan dan Perawatan	-	440.000.000,00	440.000.000,00	-	-
4	PERUMAHAN	6.122.248.000,00	28.681.297.000,00	14.523.000.000,00	4,33	
	1 Dana Kebutuhan dan Perawatan	6.122.248.000,00	20.451.797.500,00	14.329.055.000,00	-	-
5	PERAYAAN BUNANG	3.978.145.350,00	4.896.638.900,00	1.326.473.700,00	1,33	
	1 Dana Teknik Perumahan dan Cipta Karya	3.465.790.000,00	4.856.638.900,00	1.450.858.900,00	-	-
	2 Revisi Perencanaan Pembangunan Daerah	144.385.250,00	-	(144.385.250,00)	-	-
6	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	4.893.946.900,00	5.385.473.300,00	323.489.400,00	1,35	
	1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.750.314.750,00	5.150.467.230,80	394.347.480,00	-	-
	2 Sekretariat Daerah	138.749.150,00	54.811.100,00	(71.938.050,00)	-	-
7	PERMULINGAN	13.796.188.821,00	34.363.933.882,00	31.489.424.000,00	6,19	
	1 Dana Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.794.101.822,00	24.263.533.882,00	11.469.432.060,00	-	-
8	LINGKUNGAN HIDUP	14.743.844.899,00	16.237.789.830,00	1.494.145.730,00	4,11	
	1 Badan Lingkungan Hidup	1.304.136.800,00	5.377.860.900,00	2.873.784.100,00	-	-
	2 Dana Kebutuhan dan Perawatan	11.235.315.500,00	10.823.644.470,00	(411.671.030,00)	-	-
	3 Sekretariat Daerah	204.372.500,00	8.711.100,00	(195.661.400,00)	-	-
	4 Dana Perawatan dan Kebutuhan	-	27.750.000,00	27.750.000,00	-	-
9	PEKERTANABAN	3.178.000.000,00	390.000.000,00	(1.706.000.000,00)	0,10	
	1 Dana Teknik Perumahan dan Cipta Karya	150.000.000,00	390.000.000,00	40.000.000,00	-	-
	2 Dana Pengadaan Peralatan Kantor, dan Lain	1.800.000.000,00	-	(1.800.000.000,00)	-	-
10	KEMERUBAHAN BANGGATATAN UMUM	3.343.747.106,13	1.484.989.368,00	(998.897.703,13)	0,30	
	1 Dana Kebutuhan dan Perawatan Sipt	2.343.747.106,13	1.440.955.311,00	(902.791.733,13)	-	-
	2 Kacamatan Singharung Tengah	-	11.064.000,00	11.064.000,00	-	-
	3 Kacamatan Singharung Utara	-	8.135.000,00	8.135.000,00	-	-
	4 Kacamatan Singharung Selatan	-	8.337.500,00	8.337.500,00	-	-
	5 Kacamatan Singharung Timur	-	7.317.500,00	7.317.500,00	-	-
	6 Kacamatan Singharung Barat	-	9.110.000,00	9.110.000,00	-	-
11	PENYERBAYAAN PERSEKUTUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	893.472.100,00	642.923.700,00	(250.548.400,00)	0,34	
	1 Badan Penyelenggara Masyarakat, Perumahan dan KB	893.472.100,00	642.923.700,00	(250.548.400,00)	-	-
12	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA BERAKTIF	1.852.372.000,00	1.482.654.000,00	(431.483.000,00)	0,30	
	1 Badan Penyelenggara Masyarakat, Perumahan dan KB	1.011.172.000,00	1.482.654.000,00	431.482.100,00	-	-
13	BORISAL	1.467.862.700,00	1.123.477.400,00	(146.888.300,00)	0,34	
	1 Badan Penyelenggara Pembangunan Daerah	-	87.480.500,00	87.480.500,00	-	-
	2 Dana Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.147.445.300,00	1.071.627.840,00	(75.817.460,00)	-	-
	3 Sekretariat Daerah	316.117.400,00	163.399.300,00	(150.748.100,00)	-	-
	4 Kacamatan Singharung Selatan	6.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	-
14	KEPERAGAKEMAHAN	179.000.000,00	227.000.000,00	47.978.260,00	0,06	
	1 Dana Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	179.000.000,00	227.000.000,00	47.978.260,00	-	-
15	KOPERASI DAN USAHA KECIL, MENENGAH	6.792.497.827,30	1.121.691.500,00	(5.670.806.327,30)	0,18	
	1 Dana Perencanaan, Pengembangan, Koperasi dan UKM	6.792.497.827,30	1.121.691.500,00	(5.670.806.327,30)	-	-
16	PEKERJAAN MODAL	769.972.000,00	779.004.000,00	9.893.000,00	0,30	
	1 Kantor Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu	769.972.000,00	779.004.000,00	9.893.000,00	-	-
17	KERUKUYAAN	1.113.131.975,00	1.143.421.300,00	(1.970.506.325,00)	0,33	
	1 Dana Kebutuhan dan Perawatan Penderita dan Obat Raga	1.113.131.975,00	1.143.421.300,00	(1.970.506.325,00)	-	-
18	PERUBA DAN ULURRAGA	1.090.527.500,00	781.932.900,00	(308.594.600,00)	0,30	
	1 Dana Kebutuhan dan Perawatan Penderita dan Obat Raga	1.090.527.500,00	781.932.900,00	(308.594.600,00)	-	-
19	MIBATUN BAKURIA DAN POLYTER, GALANG HIGGABIS	3.042.813.813,80	4.404.300.000,00	1.491.486.186,20	1,14	
	1 Badan Penyelenggara Baccata Daerah	683.505.328,80	735.549.000,00	52.043.671,20	-	-
	2 Badan Kesehatan Energi, Politik dan Pertahanan Masyarakat	148.915.000,00	464.744.945,00	(315.829.945,00)	-	-
	3 Kantor Sekretariat Politik dan Pertahanan Masyarakat	1.592.093.485,00	3.203.946.055,00	1.611.852.570,00	-	-
	4 Kacamatan Singharung Selatan	30.300.000,00	-	(30.300.000,00)	-	-
20	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEMERAWAHAN DAN PERSEKUTUAN	39.633.298.100,00	44.204.096.616,00	(14.371.894.329,00)	11,36	
	1 Dana Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	53.000.000,00	-	(53.000.000,00)	-	-
	2 Sekretariat Daerah	1.214.573.800,00	14.252.083.830,00	(12.937.510.030,00)	-	-

NO	NAMA URUSAN/URUP	PELAKSANA ANGGARAN		Dibayarkan/ Dibekukan Rp	KOMPONEN T.A 2012	Keterangan
		2012	2012			
1	Sekretariat DPRD	8.090.554.850,00	9.481.401.350,00	491.046.700,00		-
4	Dinas Pengolahan Hasil-hasil Kelautan, dan Air	22.725.060.770,00	10.231.730.670,00	(12.493.329.894,00)		-
5	Sekretariat Daerah	1.452.153.225,00	1.289.273.100,00	(262.880.125,00)		-
6	Badan Kepegawaian dan Officer Daerah	4.301.851.450,00	4.101.043.340,00	(199.198.890,00)		-
7	Kecamatan Singkawang Tengah	1.123.284.000,00	1.212.394.440,00	79.020.440,00		-
8	Kecamatan Singkawang Utara	1.035.535.000,00	1.034.643.400,00	(891.600,00)		-
9	Kecamatan Singkawang Selatan	941.724.000,00	980.811.900,00	19.087.900,00		-
10	Kecamatan Singkawang Timur	836.974.000,00	836.623.580,00	(350.420,00)		-
11	Kecamatan Singkawang Barat	977.400.000,00	1.027.613.600,00	190.200.750,00		-
12	KEKABUPATEN PANGKAJ	8.452.097.340,00	4.300.147.000,00	(1.329.700.700,00)	1,09	
1	Dinas Perikanan dan Kelautan	5.479.532.340,00	4.280.472.350,00	(1.279.059.700,00)		-
2	Kantor Penyelidik Perikanan, Perikanan, Kelautan dan Kelautan Pesisir	53.373.000,00	92.473.000,00	39.100.000,00		-
23	PERKHIDAYAAAN MASYARAKAT BELA	900.753.700,00	40.000.000,00	(462.717.700,00)	0,01	
1	Dinas Tatakelola Pemerintahan dan Cipta Karya	100.000.000,00	40.000.000,00	(60.000.000,00)		-
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perumahan dan K3	400.713.700,00	-	(400.713.700,00)		-
23	STATISTIK	180.000.000,00	-	(710.000.000,00)	0,00	
1	Dinas Kelangkaan dan Perikanan	180.000.000,00	-	(180.000.000,00)		-
24	KEMAHIRAN	11.000.000,00	71.342.000,00	50.342.000,00	0,02	
1	Kantor Perencanaan dan Kewirausahaan	11.000.000,00	71.342.000,00	50.342.000,00		-
25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.340.000.000,00	864.773.000,00	(475.227.000,00)	0,21	
1	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	137.370.900,00	362.582.000,00	225.211.100,00		-
2	Sekretariat Daerah	1.197.580.000,00	435.600.000,00	(761.980.000,00)		-
3	Kecamatan Singkawang Tengah	1.440.000,00	-	(1.440.000,00)		-
26	PERPOSTALAN	1.578.134.000,00	904.334.700,00	(1.673.799.300,00)	0,15	
1	Kantor Perencanaan dan Kewirausahaan	1.578.134.000,00	904.334.700,00	(1.673.799.300,00)		-
27	URUSAN PERILAH	25.004.777.400,00	34.094.040.000,00	(1.089.262.600,00)	0,11	
1	PERANTARAN	5.519.817.300,00	3.347.402.000,00	(2.172.415.300,00)	0,00	
1	Sekretariat Daerah	123.400.000,00	7.081.200,00	(116.318.800,00)		-
2	Dinas Perikanan dan Kelautan	4.492.673.600,00	2.738.706.210,00	(1.753.967.390,00)		-
3	Kantor Penyelidik Perikanan, Perikanan, Kelautan dan Kelautan Pesisir	903.656.500,00	681.323.000,00	(222.333.500,00)		-
2	KERUJUKAN	773.400.000,00	1.000.000.000,00	922.600.000,00	0,43	
1	Dinas Perikanan dan Kelautan	773.400.000,00	1.000.000.000,00	922.600.000,00		-
3	KEPERINGKARAN SUMBERDAYA MINERAL	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	0,73	
1	Dinas Etna, Energi, SDA, ESDM	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)		-
2	Sekretariat Daerah	50.000.000,00	94.255.000,00	44.255.000,00		-
4	PARIWISATA	342.807.000,00	573.346.000,00	199.300.700,00	0,13	
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan 1,5% Kaps	342.807.000,00	573.346.000,00	199.300.700,00		-
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	16.140.000.000,00	5.000.000.000,00	(4.440.000.000,00)	1,30	
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.142.000.000,00	1.500.000.000,00	(4.642.000.000,00)		-
6	PERdagangan	3.072.000.000,00	9.483.000.000,00	6.411.000.000,00	1,40	
1	Dinas Perencanaan, Perdagangan, Koperasi dan UKM	3.072.000.000,00	9.483.000.000,00	6.411.000.000,00		-
2	Sekretariat Daerah	45.000.000,00	-	(45.000.000,00)		-
7	INDUSTRI	443.000.000,00	646.734.700,00	3.074.700,00	0,14	
1	Dinas Perencanaan, Perdagangan, Koperasi dan UKM	443.000.000,00	646.734.700,00	3.074.700,00		-
8	KETRAHANSAHAN	80.187.000,00	-	(80.187.000,00)	0,00	
1	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	80.187.000,00	-	(80.187.000,00)		-
Jumlah Total		277.400.000.000,00	394.000.000.000,00	73.400.000.000,00	0,40	

Tabel 5.3
Rekapitulasi Rencana Plafon Anggaran Belanja Langsung berdasarkan SKPD
Tahun Anggaran 2015

NO	SKPD	PLAFON	PERSENTASE	
1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN	37.514.103.083,00	9,51	-
2	DINAS KESEHATAN	19.643.909.431,00	4,98	-
3	RSUD dr. ABDUL AZIS	64.523.370.698,00	16,35	-
4	DINAS BINA MARGA, SDA, ISDM	83.500.912.000,00	21,16	-
5	DINAS TATAKOTA PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA	37.293.688.960,00	9,45	-
6	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.238.142.730,00	1,33	-
7	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	24.626.116.082,00	6,24	-
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	5.377.860.960,00	1,36	-
9	DINAS KEBERSIHAN DAN PERUMAHAN	31.915.770.770,00	8,09	-
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	1.440.955.355,00	0,37	-
11	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KH	2.125.577.800,00	0,54	-
12	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.298.692.900,00	0,33	-
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	735.549.000,00	0,19	-
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	11.251.486.900,00	2,85	-
15	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	779.864.500,00	0,20	-
16	DINAS KEHUTAYAAN DAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.446.800.400,00	0,62	-
17	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	464.744.945,00	0,12	-
18	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3.283.961.975,00	0,83	-
19	SEKRETARIAT DAERAH	15.036.012.330,00	3,81	-
20	SEKRETARIAT DPRD	9.481.601.550,00	2,40	-
21	DINAS PENKUALIFIKASI PENDAPATAN KEUANGAN, DAN ASET	10.231.730.876,00	2,59	-
22	INSPEKTORAT DAERAH	1.249.233.100,00	0,32	-
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.501.043.340,00	1,14	-
24	KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	1.223.368.640,00	0,31	-
25	KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	1.042.780.400,00	0,26	-
26	KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	989.169.400,00	0,25	-
27	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	837.940.880,00	0,21	-
28	KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	1.036.725.600,00	0,26	-
29	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	662.673.762,00	0,17	-
30	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	8.663.047.760,00	2,20	-
31	KANTOR PENYUTUHI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN	694.000.000,00	0,18	-
32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.501.006.280,00	1,39	-
JUMLAH TOTAL		394.611.842.487,00	100,00	

Tabel 5.4
Rekapitulasi Rencana Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung berdasarkan SKPD
Tahun Anggaran 2015

1	2	3	4	5
1	DINAS PENDIDIKAN	219.274.741.898,00	56,49	-
2	DINAS KESEHATAN	24.455.890.863,00	6,30	-
3	RSUD dr. ABDUL AZIS	20.208.013.213,00	5,21	-
4	DINAS BINA MARGA, SDA, ESDM	3.012.129.749,00	0,78	-
5	DINAS TATAKOTA PERTANAHAN DAN CIPTA KARYA	2.437.686.605,00	0,63	-
6	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.921.116.907,00	0,49	-
7	DINAS PERJURUGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.697.835.332,00	0,69	-
8	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1.566.028.548,00	0,40	-
9	DINAS KEBERSIHAN DAN PERUMAHAN	5.343.739.204,00	1,38	-
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL	2.420.159.830,00	0,62	-
11	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB	2.107.580.785,00	0,54	-
12	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.727.974.952,00	0,70	-
13	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	538.615.960,00	0,14	-
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	3.216.408.572,00	0,83	-
15	KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	1.136.263.184,00	0,29	-
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	2.491.238.392,00	0,64	-
17	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.749.484.834,00	0,45	-
18	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.048.411.253,00	1,04	-
19	PPKD	14.819.887.266,00	3,82	-
20	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	6.406.241.638,00	1,65	-
21	WALIKOTA DAN WAKD. WALIKOTA	722.748.722,00	0,19	-
22	SEKRETARIAT DAERAH	10.684.199.385,00	2,75	-
23	SEKRETARIAT DPRD	2.717.997.064,00	0,70	-
24	DINAS PENGELOLAAN PENDAPATAN KEUANGAN, DAN ASET	13.609.651.235,00	3,51	-
25	INSPEKTORAT DAERAH	2.159.630.393,00	0,56	-
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4.188.787.750,00	1,08	-
27	KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH	4.927.159.942,00	1,27	-
28	KECAMATAN SINGKAWANG UTARA	5.031.637.718,00	1,30	-
29	KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN	4.028.731.863,00	1,04	-
30	KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR	4.058.184.678,00	1,05	-
31	KECAMATAN SINGKAWANG BARAT	3.939.341.121,00	1,01	-
32	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	888.582.092,00	0,23	-
33	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	3.334.779.959,00	0,86	-
34	KANTOR PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.947.947.115,00	0,76	-
35	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.369.173.863,00	0,61	-
JUMLAH TOTAL		308.188.001.885,00	100,00	

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Singkawang Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun ketiga yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah periode 2013 – 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KU-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPAS-APBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini memerlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

RKPD ini menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Singkawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyusun kebijakan publik yaitu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015. Selain itu RKPD ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya serta untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dokumen RKPD Kota Singkawang 2015 dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015. Adapun kaidah dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka perencanaan, masing-masing SKPD perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2015.
2. SKPD Kota Singkawang berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Kota Singkawang Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya, serta diharapkan dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha (*stakeholders*). SKPD wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif.
3. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, Kepala SKPD wajib melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan agar indikator sasaran program dan kegiatan dapat tercapai. Selanjutnya melaporkan hasilnya kepada Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maupun kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Peran serta segenap *stakeholders* sangat diharapkan, baik dalam perancangan perumusan kebijakan yang akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan, maupun dalam perencanaan pembangunan melalui partisipasi aktif dalam usulan program dan kegiatan. Di samping itu, masyarakat juga diharapkan dapat ikut berpartisipasi secara aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan program-program pembangunan daerah.
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Singkawang berkewajiban melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap sinergisitas dan konsistensi RKPD Tahun 2015, kedalam Rencana Kerja SKPD Tahun 2015, KUA Tahun Anggaran 2015 dan PPAS Tahun Anggaran 2015 yang memuat prioritas dan pagu indikatif SKPD Tahun 2015.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Kota Singkawang serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kota Singkawang, bersama-sama masyarakat termasuk sektor swasta dan dunia pendidikan perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Kota Singkawang Tahun 2015 agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Kota Singkawang.

Lebih lanjut lagi, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan baik dari pemerintah, dunia usaha dan stakeholder lain yang terkait dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

AWANG ISHAK

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan



YASMALIZAR, SH

Pembina

NIP. 19681016 199803 1 004